



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD)
TAHUN 2005 - 2025**

BAPPEDA



**BUPATI DHARMASRAYA
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2005 – 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3747);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan

- Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembantuan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 694);
 17. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Nomor);
 18. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Teknik Pembentukan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008 Nomor 10);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 39);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

dan

BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2005 – 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada

pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat dengan RPJP Nasional adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Arah kebijakan pembangunan adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka panjang.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai

acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD sebelum disepakati dengan DPRD

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah terhitung sejak tahun 2005-2025.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada RPJP Nasional dan RPJPD Propinsi Sumatera Barat

Pasal 3

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sistematika RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab III : Analisis Isu-Isu Strategis

Bab IV : Visi dan Misi Daerah

Bab V : Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Bab VI : Kaidah Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan pedoman dalam penyusunan RPJMD.

- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Bupati dalam menyusun KUA dan PPAS
- (4) KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama.
- (5) KUA dan PPAS yang telah disepakati Bupati bersama DPRD menjadi pedoman SKPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
- (6) Rencana Kerja dan Anggaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD dilaksanakan oleh Kepala SKPD.
- (3) Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya visi dan misi pembangunan daerah yang dilakukan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 30 November 2015

Pj. BUPATI DHARMASRAYA,

ttd.

SYAFRIZAL

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 30 November 2015

SEKRETARIS DAERAH

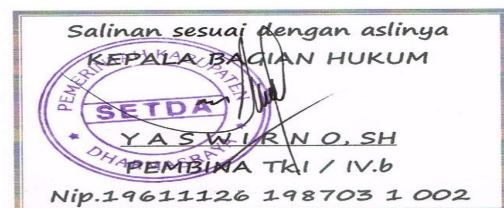
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd.

Ir. H. BENNY MUKHTAR, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 195608151986101001



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2015 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2005 – 2025

I. UMUM

RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan dalam jangka waktu 20 tahun, yang menerjemahkan cita-cita dan aspirasi pembangunan daerah kedalam rumusan visi, misi dan arah pembangunan sebagai dasar membangun komitmen dan pengambilan kebijakan dalam setiap tahapan pembangunan jangka menengah daerah.

Setiap tahapan pembangunan jangka menengah daerah tersebut dirumuskan dalam RPJMD yang disusun oleh Bupati yang dipilih secara langsung oleh rakyat yang selanjutnya dijabarkan kedalam RKPD.

Jangka waktu RPJPD mengikuti RPJPN, sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. Akan tetapi, periode RPJMD tidak harus mengikuti periode RPJPN karena pemilihan presiden dan kepala daerah tidak dilaksanakan secara bersamaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penyusunan RPJPD mengacu kepada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat agar terwujud sinkronisasi rencana pembangunan daerah kabupaten berdasarkan kewenangan otonomi daerah dengan rencana pembangunan provinsi dan nasional.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 56

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya	I-5
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-7
1.5 Maksud dan Tujuan	I-8
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II-1
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-12
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-13
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	II-25
2.2.3 Fokus Seni Budaya	II-40
2.2.4 Fokus Kepemudaan dan Olah raga	II-40
2.3 Aspek Pelayanan Umum	II-41
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib	II-41
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan	II-54
2.4 Aspek Daya Saing Daerah	II-64
2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah	II-64
BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	
3.1 Permasalahan Pembangunan	III-2
3.1.1 Perumusan Permasalahan Daerah	III-2
3.1.1.1 Identifikasi Permasalahan Daerah Terkait Urusan Wajib	III-5
3.1.1.2 Identifikasi Permasalahan Daerah Terkait Urusan Pilihan	III-9
3.1.1.3 Identifikasi Permasalahan serta Strategi pemecahannya	III-10
3.2 Isu-Isu Strategis.....	III-15
3.2.1 Penelaahan Isu-isu Strategis Nasional dan Provinsi Sumatera Barat	III-15
3.2.2 Isu-isu Strategis Kabupaten Dharmasraya	III-18
BAB IV VISI DAN MISI DAERAH	
4.1 Visi	IV-1
4.2 Misi	IV-3
BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH	
5.1 Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan.....	V-1
5.2 Tahapan dan Prioritas Pembangunan	V-6
5.2.1 Prioritas Pembangunan Tahap I (2005-2010)	V-7
5.2.2 Prioritas Pembangunan Tahap II (2010-2015)	V-7
5.2.3 Prioritas Pembangunan Tahap III (2015-2020)	V-8
5.2.4 Prioritas Pembangunan Tahap IV (2020-2025)	V-8
5.3 Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	V-30

5.3.1 Integritas dan Sinkronisasi RPJPD Tahun 2005-2025 dengan RTRW Tahun 2011-2031	V-30
5.3.2 Arah Kebijakan Dalam RPJP yang Terkait dengan Pemerataan Pembangunan	V-39
BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN	IV-1

DAFTAR TABEL

1. Luas Wilayah, Banyaknya Nagari dan Jorong Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya	II-2
2. Kelerengan Lahan di Kabupaten Dharmasraya	II-4
3. Status Penggunaan Lahan Kabupaten Dharmasraya	II-7
4. Komposisi Penduduk Dharmasraya Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2013	II-9
5. Luas Daerah dan kepadatan Penduduk Dharmasraya Tahun 2013	II-12
6. PDRB Kabupaten Dharmasraya Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha (Jutaan Rupiah) 2007-2013	II-15
7. Basis Ekonomi Kabupaten Dharmasraya Berdasarkan Indeks Location Quotion (LQ)	II-16
8. Kontribusi Sektor-sektor Terhadap PDRB Kabupaten Dharmasraya Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2007-2013	II-17
9. Lima Komoditi Unggulan Kabupaten Dharmasraya	II-19
10. Tingkat Inflasi	II-20
11. Banyaknya Uang Beredar	II-21
12. Transfer Dana Masuk dan Keluar Melalui Jasa Bank	II-21
13. Perbandingan Pendapatan Perkapita Kabupaten Dharmasraya dengan Propinsi Sumatera Barat	II-22
14. Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin	II-23
15. Gini Rasio Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2013	II-24
16. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008-2013.....	II-25
17. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat Tahun 2008-2013	II-26
18. Jumlah Sarana Pendidikan Pelayanan Skala Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013	II-27
19. Penduduk Usia 15-44 Tahun yang Melek Huruf Tahun 2013	II-29
20. Angka Buta Huruf Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013.....	II-29
21. Indikator Angka Partisipasi Kasar Tahun 2005-2013	II-30
22. Distribusi Jumlah dan Proporsi Penduduk Dharmasraya Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2013	II-31
23. Perkembangan APM Tahun 2007-2013	II-31
24. Perbandingan APM antar Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013..	II-33
25. Angka Kematian Bayi Kabupaten Dharmasraya Per 1000 KH	II-34
26. Angka Kematian Bayi Provinsi Sumatera Barat	II-34
27. Angka Kematian Ibu Kabupaten Dharmasraya Per 100.000 KH	II-35
28. Angka Kelahiran Kabupaten Dharmasraya per Puskesmas Tahun 2013	II-36
29. Angka Kematian di Kabupaten Dharmasraya per Puskesmas Tahun 2013	II-37
30. Jumlah Penderita Gizi Buruk per Puskesmas Tahun 2013	II-38
31. Status Gizi Balita Menurut Jenis kelamin, Kecamatan, dan Puskesmas Kabupaten/Kota Dharmasraya Tahun 2013	II-39
32. Jumlah Peserta KB Baru dan KB Aktif Menurut Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten/Kota Dharmasraya Tahun 2013	II-39
33. Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013	II-41
34. Rasio Murid Per Guru di Kabupaten Dharmasraya	II-42
35. Rasio Kelas Per Guru di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013	II-43
36. Rasio Guru Per Sekolah di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013	II-44
37. Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013.....	II-45

38. Distribusi Tenaga Medis, Keperawatan dan Bidan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013	II-46
39. Tipe Pengairan di Kabupaten Dharmasraya	II-50
40. Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Dharmasraya.....	II-52
41. Luas Lahan Kritis di Kabupaten Dharmasraya	II-57
42. Kawasan Alokasi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan Sumberdaya Pertambangan Lainnya diluar Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) di Kabupaten Dharmasraya Per Kecamatan	II-59
43. Pasar Menurut Lokasi dan Jumlah di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013.....	II-62
44. Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Dharmasraya	II-64
45. Derajat Otonomi Fiskal Daerah Di Sumatera Barat Tahun 2013	II-65
46. Pengeluaran Rata-rata pekapita Perbulan Menurut Kelompok Barang.....	II-66
47. Banyaknya Peristiwa Kamtibmas dan Pelanggaran	II-67
48. Wilayah Potensi Pengembangan Komoditi Kelapa Sawit dan Karet Di Sumatera Barat Tahun 2013	II-68
49. Permasalahan Daerah dan Strategis/ Faktor Penentu Keberhasilan Urusan Kewenangan Wajib	III-5
50. Permasalahan Daerah dan Strategis/ Faktor Penentu Keberhasilan Urusan Kewenangan	III-11 Pilihan
51. Keterkaitan Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Dengan Isu Nasional dan Provinsi	III-17
52. Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Dharmasraya...	IV-4
53. Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025	V-2
54. Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Dharmasraya...	V-10
55. Arah Kebijakan Pembangunan dalam RPJP Untuk mewujudkan Rencana Pusat Kegiatan Perkotaan dalam RTRW.....	V-30
56. Arah Kebijakan Pembangunan dalam RPJPD Untuk Mewujudkan Rencana Peruntukan Ruang Dalam RTRW.....	V-32
57. Arah Kebijakan Pembangunan Dalam RPJPD untuk Mewujudkan Rencana Kawasan Strategis Dalam RTRW.....	V-36
58. Arah Kebijakan Pembangunan dalam RPJPD untuk Mewujudkan Pemerataan Pembangunan.....	V-39

DAFTAR GAMBAR

1.	Kerangka Perencanaan Pembangunan	I-2
2.	Skema Hubungan Dokumen Perencanaan	I-5
3.	I-6
4.	Hubungan Rencana Pembangunan Dana Rencana Tata Ruang	I-7
5.	Hubungan Antara RPJPD Kabupaten Dharmasraya Dengan Dokumen Terkait	II-2
6.	Lainnya	II-3
7.	Posisi Kabupaten Dharmasraya dalam Lingkup Wilayah	II-5
8.	II-7
9.	Wilayah Administrasi Kabupaten Dharmasraya	II-11
10.	II-14
11.	Topografi Kabupaten Dharmasraya	II-18
12.	II-18
13.	Status Lahan Kabupaten Dharmasraya	II-28
14.	II-46
15.	Piramida Penduduk Dharmasraya Hasil Sensus Penduduk Tahun 2013	II-53
16.	Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB	II-55
17.	II-58
18.	Kontribusi Sektoral Tahun 2013	II-60
19.	Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB Pertanian Tahun 2013	II-63

20.	II-69
21.	Sebaran Sarana Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya	III-4
22.	Sebaran Sarana Kesehatan di Kabupaten Dharmasraya	V-9
23.	Jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013	V-36
34.	Kawasan Perkebunan Besar di Kabupaten Dharmasraya Peta Kawasan Hutan di Kabupaten Dharmasraya Peta Area Ijin Usaha Pertambangan di Kabupaten Dharmasraya Sebaran Pasar di Kabupaten Dharmasraya..... Lahan Terpakai Untuk Kelapa Sawit (%) di Sumatera Barat Kerangka Pembangunan Daerah Berdasarkan Pendekatan Pemeliharaan, Pemupukan dan Pengembangan Modal Daerah (<i>Assets-Based Development</i>) ... Tema/ Agenda Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2015 Rencana Pola Ruang Kabupaten Dharmasraya Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Dharmasraya	V-39

RPJPD KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2005-2025

BAB I PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

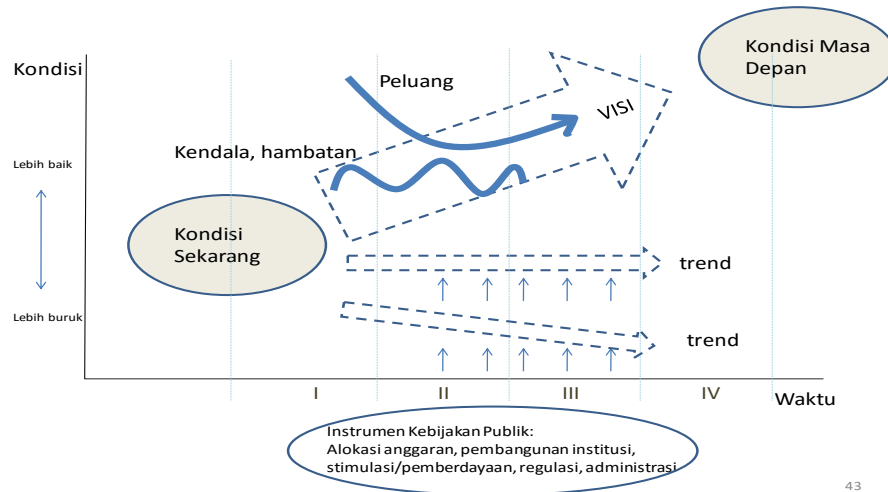


Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005 – 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun untuk periode 20 (duapuluh) tahun, yang selanjutnya berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya untuk periode 5 (lima) tahunan. Dokumen perencanaan jangka panjang daerah ini bersifat makro yang memuat Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Jangka Panjang.

Perencanaan Pembangunan adalah upaya mewujudkan kondisi masa depan yang diharapkan berdasarkan visi pembangunan yang ditetapkan dengan memanfaatkan berbagai peluang dan mengatasi berbagai kendala/hambatan pembangunan. Upaya tersebut berupa pengerahan berbagai instrumen pembangunan seperti pengalokasian anggaran pembangunan, pembangunan institusi, stimulasi/ pemberdayaan masyarakat, penguatan aspek regulasi, dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Dengan berbagai upaya pembangunan tersebut, kecenderungan (*trend*) ekonomi, fisik, sosial, budaya, administrasi pemerintahan dan kelembagaan pembangunan yang tidak

selaras dengan visi pembangunan perlu diubah arahnya sesuai dengan visi yang ditetapkan.

Gambar 1.1 : Kerangka Perencanaan Pembangunan



Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005 - 2025 memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah, yaitu :

1. RPJP Daerah Kabupaten mengacu pada RPJP Provinsi dan Nasional;
2. Memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang RPJP Daerah;

Dalam upaya merumuskan visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, maka penyusunan RPJP Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005 - 2025 dilaksanakan melalui tata cara dan proses sebagai berikut :

1. Penyiapan rancangan RPJPD Kabupaten guna memperoleh gambaran awal visi, misi, dan arah pembangunan daerah;
2. Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang dilaksanakan guna memperoleh masukan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan.
3. Seluruh masukan dan komitmen hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah menjadi masukan utama penyempurnaan rancangan RPJPD hingga menjadi Rancangan Akhir RPJPD;
4. Penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJPD, dibawah koordinasi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi hukum; dan
5. Rancangan Akhir RPJPD beserta lampirannya disampaikan kepada DPRD sebagai inisiatif Pemerintah Daerah guna diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005 - 2025.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005 - 2025 mengacu kepada:

1. Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 Ayat 6 tentang Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan Tugas Pembantuan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
7. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
8. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3747);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
21. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
22. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-

2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);

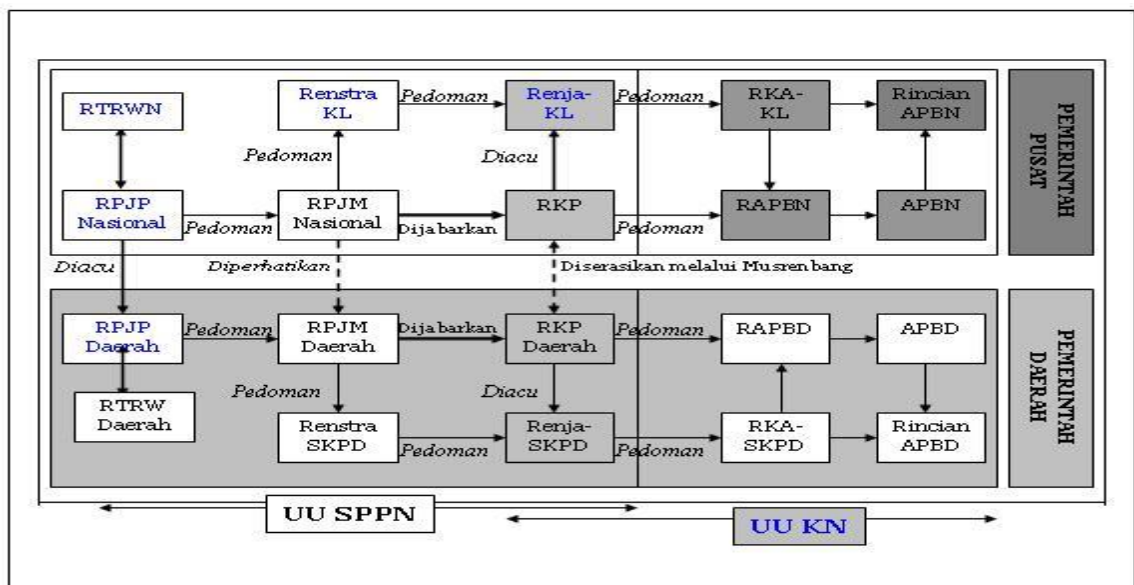
23. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya; (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Teknik Pembentukan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 - 2031; (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 49).

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya

Penyusunan RPJPD Kabupaten Dharmasraya mengacu kepada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat serta memperhatikan dokumen RPJPD Kabupaten lain yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Dharmasraya. Selain itu, munculnya dokumen Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI) menjadi suatu *blueprint* penting yang juga mesti menjadi perhatian daerah dalam perwujudan pencapaian target RPJP Nasional yang menjadi satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Secara skematis, hubungan antara RPJP Nasional, RPJP Daerah Provinsi Sumatera Barat, RPJP Daerah Kabupaten Dharmasraya dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai berikut :

Gambar 1.2 : Skema Hubungan Dokumen Perencanaan

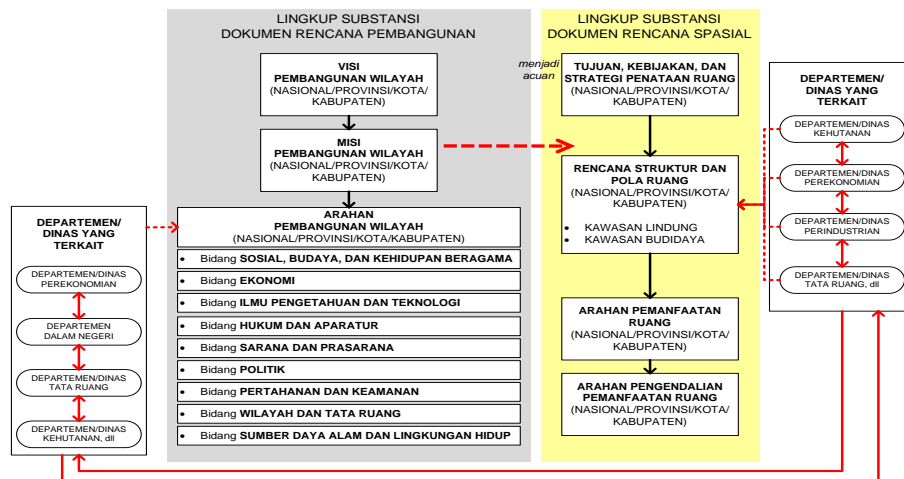


Keterangan :

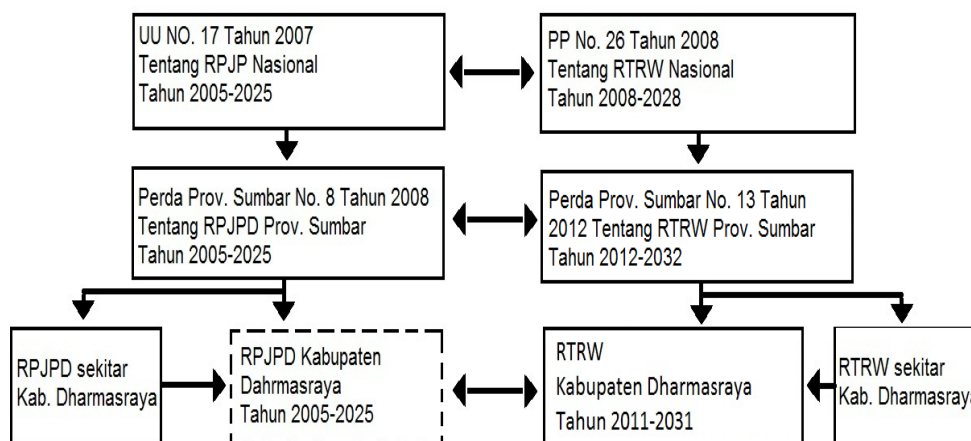
- a) Renstra-KL atau Rencana Strategis Kementerian/Lembaga adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode lima tahun.
- b) Renja-KL atau Rencana Kerja Kementerian/Lembaga adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode satu tahun
- c) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode satu tahun (Rencana Pembangunan Tahunanan Nasional)
- d) Renstra-SKPD (Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode lima tahun
- e) Renja- SKPD (Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode satu tahun
- f) Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun
- g) RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga), adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperoleh untuk melaksanakannya
- h) RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan

Selain mengacu pada dokumen RPJP Nasional maupun RPJPD Provinsi Sumatera Barat, Proses penyusunan RPJPD kabupaten Dharmasraya juga memperhatikan RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 serta RPJPD dan RTRW daerah sekitar.

Gambar 1.3 : Hubungan Rencana Pembangunan Dan Rencana Tata Ruang



Gambar 1.4 : Hubungan Antara RPJPD Kabupaten Dharmasraya Dengan Dokumen Terkait Lainnya



RPJPD merupakan rencana pembangunan yang bersifat makro sektoral dan RTRW mengintegrasikan dan mengalokasikan kegiatan pembangunan tersebut ke dalam aspek fisik ruang dalam rencana struktur ruang, pola pemanfaatan ruang, arahan/indikasi program pembangunan, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang. Kedua dokumen rencana pembangunan berjangka panjang daerah tersebut perlu terintegrasi dan tersinkronisasi.

RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025 selanjutnya akan menjadi acuan dan dasar dalam penyusunan RPJM maupun RKPD Kabupaten Dharmasraya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya
- 1.4. Sistematika Penulisan
- 1.5. Maksud dan Tujuan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Permasalahan Pembangunan

3.2. Isu Strategis

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

4.1. Visi

4.2. Misi

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

5.1. Sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk masing-masing misi

5.2. Tahapan dan Prioritas

5.3 Integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan

BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN

1.5. Maksud dan Tujuan

RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005 - 2025 dimaksudkan sebagai pedoman daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah, rencana tahunan, dan investasi agar kebijakan dan program perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron, dan sinergis sesuai dengan visi pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005 - 2025 adalah menyediakan pedoman kebijakan pembangunan dalam jangka waktu 20 tahun untuk menyelaraskan dan membangun komitmen para pemangku kepentingan pembangunan di kabupaten agar sejalan dengan aspirasi dan kebutuhan pembangunan daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, penyusunan RPJPD Kabupaten Dharmasraya secara rinci:

- Memberi gambaran masa depan dari cita-cita/harapan bersama dalam jangka panjang 20 tahun.
- Merumuskan isu-isu jangka panjang yang perlu ditangani dan diantisipasi dalam jangka menengah.
- Merumuskan perubahan menuju visi masa depan yang perlu disiapkan langkah-langkahnya dalam arah kebijakan pembangunan.
- Menjadi pedoman penyusunan kebijakan dan program pembangunan jangka menengah (dengan memperhatikan visi, misi, dan kebijakan jangka panjang).

RPJPD KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2005-2025

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

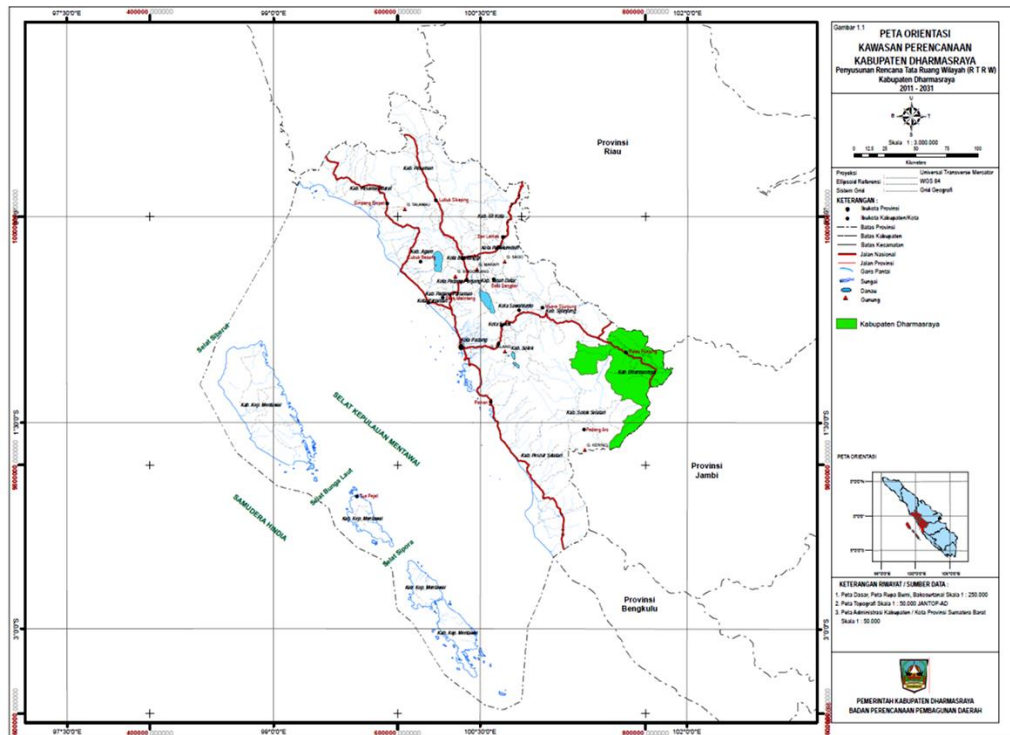
2.1.1. Karakteristik lokasi dan wilayah

a. Luas dan batas wilayah administrasi



Luas wilayah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 yaitu 2.961,13 Km² (296.113 Ha), sedangkan berdasarkan perhitungan pemetaan hasil digitasi peta citra dalam penyusunan RTRW Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Dharmasraya memiliki luas 302.599Ha. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor3 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembentukan Kecamatan, jumlah kecamatan di Kabupaten Dharmasraya dimekarkan dari 4 kecamatan menjadi 11 Kecamatan. Dengan dihapusnya sistem pemerintahan desa, pemerintah yang berada setingkat dibawah kecamatan adalah nagari, dan selanjutnya dibawah nagari adalah jorong. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Nagari terdapat sebanyak 48 nagari. Pada Tahun 2009 dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Penataan Nagari. Dalam Peraturan Daerah tersebut terdapat beberapa nagari yang dimekarkan, dari 48 nagari menjadi 52 nagari dan dengan 260 jorong.

Gambar 2.1 : Posisi Kabupaten Dharmasraya dalam Lingkup Wilayah



Tabel 2.1 : Luas Wilayah, Banyaknya Nagari dan Jorong Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Nagari		Jorong	
			sebelum 2008	Setelah 2008	sebelum 2008	Setelah 2008
1	Sungai Rumbai	5.106	6	4	26	24
2	Asam Jujuhan*	48.541	-	5	-	22
3	Koto Besar*	56.057	-	7	-	32
4	Koto Baru	22.120	7	4	38	26
5	Koto Salak**	12.145	-	5	-	27
6	Padang Laweh**	6.062	-	4	-	17
7	Tiumang**	13.443	-	4	-	17
8	Sitiung	12.457	3	4	20	22
9	Timpeh***	32.301	-	5	-	21
10	Pulau Punjung	44.316	5	6	25	31
11	IX Koto****	50.050	-	4	-	21
Kab. Dharmasraya		302.599	21	52	109	260

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2009

Ket: *: Pemekaran dari Kecamatan Sungai Rumbai
 **: Pemekaran dari Kecamatan Koto Baru
 ***: Pemekaran dari Kecamatan Sitiung
 ****: Pemekaran dari Kecamatan Pulau Punjung

yang terdiri dari: perbukitan terpisah; perbukitan bergelombang; perbukitan agak tertoreh dengan lereng datar sampai bergelombang sampai sangat tertoreh dengan lereng bergelombang sampai curam dan perbukitan karst paralel tertoreh; (d) sistem pergunungan yang merupakan pergunungan sangat tertoreh; dan (e) sistem volkan yang terdiri dari: lereng atas volkan dengan topografi sangat curam; lereng tengah volkan dengan topografi curam; lereng bawah volkan dengan topografi agak curam; dan dataran volkan bergelombang dengan topografi landai.

c. Topografi

Wilayah Kabupaten Dharmasraya terletak pada ketinggian 100-1500 meter diatas permukaan laut (dpl). Ketinggian dari permukaan laut mulai dari 100 meter dpl pada bagian kawasan yang mengarah ke sebelah timur, hingga 1.500 meter dpl pada bagian kawasan yang menjadi bagian dari gugusan Bukit Barisan di sebelah barat. Kelerengan lahan bervariasi dari datar, landai sampai sangat curam. Berdasarkan hasil interpretasi dan analisis terhadap Peta Digitasi Citra Spot 5 Provinsi Sumbar (2007), diperoleh data kelerengan lahan bervariasi dari datar-landai (54,29%), agak curam-curam (34,29%) sampai sangat curam (11,42%) seperti terlihat pada tabel.

Tabel 2.2 : Kelerengan Lahan di Kabupaten Dharmasraya

lasifikasi Kelerengan Lahan	Lereng (%)	Luas	
		(Ha)	(%)
Datar	0-3	23.155	7,65
Agak Landai	3-8	68.786	22,73
Landai	8-15	72.339	23,91
Agak Curam	15-25	74.730	24,70
Curam	25-40	29.023	9,59
Sangat Curam	40-60	34.567	11,42
Jumlah	Luas	302.599	100,00

Sumber : Peta Digitasi Citra Spot 5 Provinsi Sumbar Tahun 2007

d. Geologi

Formasi batuan di wilayah Kabupaten Dharmasraya terdiri dari : Aluvium; Batuan Intrusi; Formasi Barisan; Formasi Kuantan; Formasi Rantauikil; Batuan Gunung Api; Batuan Metamorf; Formasi Kasai; Formasi Palepat; dan Formasi Sangkarewang.

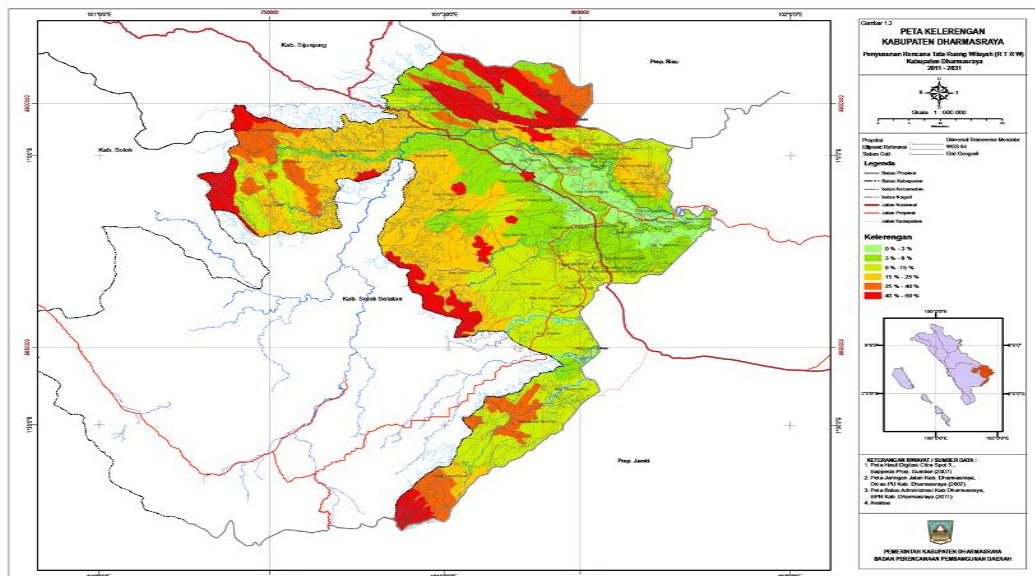
Variasi batuan Kabupaten Dharmasraya terdiri dari beberapa satuan batuan dari tua ke muda, terurai sebagai berikut :

- a) Batuan Lava tua dan muda yang menutupi 45% daerah Dharmasraya, berumur kwarter.

- b) Batuan Gunung Api muda yang terdiri dari breksi pasir, lahar dan tufa dengan kelulusan yang sangat beragam, menutupi 33%, berumur Pleistocen.
- c) Batuan Sedimen dan Aluvial (undak-undak) yang terdiri dari kerikil, kerakal serta pasir, menutupi 20% daerah Dharmasraya.
- d) Batuan Beku Granit dan Granodiorit berupa teobosan/intrusi yang berumur sekarang, menutupi 5-7% daerah Dharmasraya.

Struktur geologi yang ada di daerah Dharmasraya relatif aman. Adanya interpretasi struktur geologi/kelurusan-kelurusan geologi yang terdapat didaerah dekat sungai Batanghari yaitu di Koto Baru arah ke Solok/Padang terdapat jalur Sesar Turun (diperkirakan) yang memanjang dengan arah Barat laut – Tenggara, dimana daerah Gunung Medan merupakan sebagian dari jalur sesar tersebut. Ditemukan juga perlipatan-perlipatan kecil, dimana strukur yang ada hanya sebagian saja yang tidak stabil. Daerah sesar ini merupakan bagian dari sesar Sumatera Fault Zone yang terbentang sepanjang pulau Sumatera. Berdasarkan kondisi tersebut maka Kabupaten Dharmasraya, khususnya daerah bagian barat daya-barat laut yang mengikuti arah pulau Sumatera termasuk daerah rawan gempa/bencana alam meskipun dengan intensitas yang kecil.

Gambar 2.3 : Topografi Kabupaten Dharmasraya



e. Hidrologi



Wilayah Kabupaten Dharmasraya terletak pada Sub Daerah Aliran Sungai (Sub DAS) Batanghari Hulu dan tengah yang merupakan bagian dari DAS Batanghari. Wilayah Kabupaten Dharmasraya dialiri oleh banyak sungai/batang, dan salah satu sungai yang menjadi

bagian dari sistem hidrologi Sumatera Barat dan Jambi adalah Sungai Batanghari.

Saat ini Sungai Batanghari masih menjadi tempat berlangsungnya kegiatan pasar hasil bumi dari wilayah Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok Selatan, yang selanjutnya dijual oleh para pedagang di Kota Jambi dan Kuala Tungkal. Selain Sungai di Kabupaten Dharmasraya juga terdapat beberapa embung yang dijadikan sumber air.

f. Klimatologi

Berdasarkan sistem klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson (1951) wilayah Kabupaten Dharmasraya termasuk ini tergolong pada tipe iklim A (sangat basah). Sementara menurut zona agroklimat L.R. Oldeman termasuk pada zona iklim B1 dengan bulan basah 7-9 bulan dan bulan kering berturut-turut kurang dari 2 bulan. Curah hujan sebagian wilayah Kabupaten Dharmasraya tergolong tinggi yaitu lebih dari 200 mm/bulan.

Suhu udara berkisar antara 21°C hingga 33°C, dengan tingkat kelembaban antara 70 - 80%.

g. Penggunaan lahan

Berdasarkan peta citra satelit SPOT 5, di Kabupaten Dharmasraya terdapat lahan pertanian yang teridentifikasi jelas, hutan dengan vegetasi primer, hutan yang bercampur dengan kebun rakyat, dan hutan tanaman.

- (a) Luas lahan pertanian di Kabupaten Dharmasraya yang teridentifikasi jelas seluas 99.314 Ha (33,52% dari luas wilayah). Lahan pertanian yang dominan di Kabupaten Dharmasraya yaitu perkebunan (sawit dan karet) seluas 89.647 Ha (30,9%). Lahan pertanian tanaman pangan lahan basah/persawahan seluas 9.652 Ha (1,89%) yang terdiri atas lahan sawah beririgasi teknis dan lahan sawah tadah hujan. Lahan pertanian tanaman pangan lahan kering seluas 3.973 Ha (1,34%).
- (b) Luas tutupan lahan hutan di Kabupaten Dharmasraya 172.707 Ha (58,29% dari luas wilayah). Tutupan hutan dengan vegetasi primer di Kabupaten Dharmasraya seluas 7.290 Ha (2,42%) dan hutan dengan vegetasi sekunder yang umumnya bercampur dengan kebun rakyat seluas 157.836 Ha, dan hutan tanaman seluas 6.115 Ha.
- (c) Kawasan potensi pertambangan dan Bahan Galian

Selain sektor perkebunan dan pertanian tanaman pangan potensi lain yang ada di Kabupaten Dharmasraya adalah pertambangan. Bahan galian yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya terdiri dari batu bara, bitumen padat, emas sekunder, bijih besi, perak, batu gamping, pasir kuarsa, batu gunung, tanah urug, tanah liat, sirtukil, mangan, dan suseki.

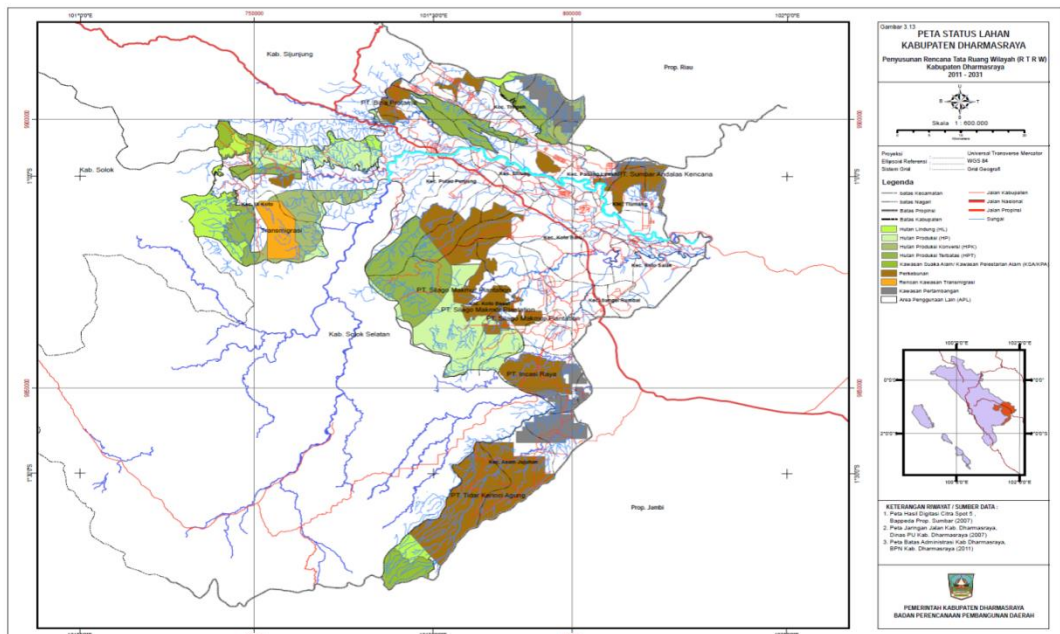
Berdasarkan status penguasaan lahan, luas dan proporsi lahan yaitu: kawasan hutan seluas 87.174 Ha (28,91%); perkebunan seluas 75.840 Ha (25,15%); kawasan pertambangan berdasarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah dikeluarkan serta izin lainnya diluar WIUP (operasi produksi dan eksplorasi) seluas 23.305 Ha (7,73%); lahan masyarakat seluas 113.934 Ha (37,78%); selain itu dicadangkan lahan untuk transmigrasi seluas lebih kurang 1.300 Ha.

Tabel 2.3: Status Penggunaan Lahan Kabupaten Dharmasraya

Status Lahan	Luas	
	(Ha)	%
Kawasan Hutan	87.174	28,91%
– Hutan Lindung (HL)	11.984	3,97%
– Hutan Produksi (HP)	26.161	8,68%
– Hutan Produksi Konversi (HPK)	11.779	3,91%
– Hutan Produksi Terbatas (HPT)	31.845	10,56%
– Kaw. Suaka Alam/Pelest. Alam (KSA/KPA)	5.405	1,79%
Perkebunan Besar	75.840	25,15%
Kawasan Pertambangan	23.305	7,73%
Rencana Kawasan Transmigrasi	1.300	0,43%
Lahan budidaya dan permukiman masyarakat	113.934	37,78%
Total Luas	301.553	100,00%

Sumber: RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031

Gambar 2.4 : Status Lahan Kabupaten Dharmasraya



h. Potensi pengembangan wilayah

Kabupaten Dharmasraya memiliki potensi pengembangan sumberdaya alam yang besar di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini ditunjukkan dengan luas kawasan budidayanya yang terbesar didaratan Provinsi Sumatera Barat dan proporsi luas kawasan lindung dengan budidaya terkecil diantara Kabupaten di Sumatera Barat. Posisi geografis wilayah yaitu termasuk kedalam kawasan hulu sampai tengah DAS Batang Hari dengan dibatasi bukit barisan yang membentang pada arah barat menyebabkan besarnya peluang pengembangan sumberdaya alam Kabupaten Dharmasraya.

Selain potensi pertanian perkebunan juga terdapat peluang pengembangan pertanian tanaman pangan lahan basah, budidaya perikanan darat, hortikultura buah-buahan dan hasil hutan serta pertambangan.

i. Wilayah rawan bencana dan pencemaran lingkungan

Lokasi rawan longsor di Kabupaten Dharmasraya yaitu: Kecamatan IX Koto, Nagari Sialang Kecamatan Pulau Punjung, dan Kampung Surau Kecamatan Pulau Punjung.

Kawasan yang rawan bencana banjir di Kabupaten Dharmasraya terdapat pada dataran banjir dengan morfologi dataran disepanjang aliran sungai Batanghari, Batang Timpeh, Sungai Batang Siat. Bahaya banjir sering terjadi di lokasi potensi banjir: Kampung Surau, Nagari Sungai Kambuik Kecamatan Pulau Punjung, Nagari Gunung Selasih di Kecamatan Pulau Punjung. Banjir Bandang sekitar Batang Timpeh di Kecamatan Timpeh, Jorong Ranah Baru dan Jorong Bonjol di Sungai Batang Siat Kecamatan Koto Besar, dan di Kecamatan Koto Salak, kecamatan Padang laweh, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Tiumang.

Tingkat kerentanan terhadap bahaya longsor Kerawanan sedang dan tinggi terdapat pada kawasan berbukit yang terdapat pada bagian barat dan sebagian timur kabupaten.

Srlain itu terdapat kerawanan pencemaran lingkungan pada sungai di Kabupaten Dharmasraya. Baku mutu air raksa telah dilewati terutama oleh sungai Muaro Pangian dan Sungai Batanghari bagian hulu, dan pada jumlah yang tidak terlalu signifikan pada sungai Batang Abai Siat, Batang Betung, Batang Siat Hilir, Batang Timpeh, dan Muaro Batang Momongan.

j. Demografi

Penduduk sebagai modal dasar pembangunan merupakan titik sentral dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas yang rendah dan dengan pertumbuhan yang tinggi akan memperlambat tercapainya tujuan pembangunan. Berbagai bukti empiris menunjukkan bahwa kemajuan suatu daerah/bangsa sebgaiian besar ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM), bukan oleh melimpahnya sumberdaya alam (SDA). SDA yang melimpah tanpa diimbangi dengan SDM yang baik akan tetap tertinggal.

Masalah kependudukan merupakan masalah serius yang di hadapi oleh negara-negara di Dunia, bahkan tahun-tahun belakangan ini para ahli ekonomi telah memusatkan perhatiannya kepada hubungan antara pembangunan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Perencanaan pembangunan ini dituangkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan dimana kependudukan perlu dipertimbangkan sebagai tolak ukur pembangunan masyarakat.

a) Jumlah Penduduk dan Persebaran

Saat ini penduduk Indonesia diperkirakan mendekati angka sekitar 238 juta jiwa (BPS, 2011), dan keempat terbanyak di dunia. Bila dilihat jumlah penduduk kabupaten Dharmasraya saat ini berdasarkan sensus penduduk (SP) tahun 2010 adalah sebanyak 191.422 jiwa, terdiri 98.892 orang laki-laki (51,66%), dan 92.530 orang perempuan (48,34%), dengan rasio jenis kelamin 106,88. Jumlah ini kemudian menjadi 197.599 jiwa tahun 2011, terdiri dari 102.103 laki-laki dan 95.496 perempuan dan rasio jenis kelamin 106,92.

Rasio jenis kelamin hampir pada setiap kelompok umur mencapai angka lebih dari seratus, yang menunjukkan penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan, kecuali pada kelompok umur 65 tahun ke atas (Tabel 1). Banyaknya jumlah penduduk laki-laki dibanding penduduk perempuan, terutama pada usia kerja dapat diinterpretasikan bahwa migrasi masuk ke daerah ini cukup besar, khususnya laki-laki, apalagi daerah ini merupakan salah satu daerah pengembangan sentra perkebunan Sumatera Barat seperti kelapa sawit dan tanaman karet.

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Dharmasraya termasuk kategori tinggi yakni 3,09 % per tahun, bahkan tertinggi bila dibandingkan dengan rata-rata provinsi Sumatera Barat yakni 1,34 % dan lebih dari dua kali LPP nasional yang hanya pada level 1,49 %.

Tabel 2.4 : Komposisi Penduduk Dharmasraya Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2013

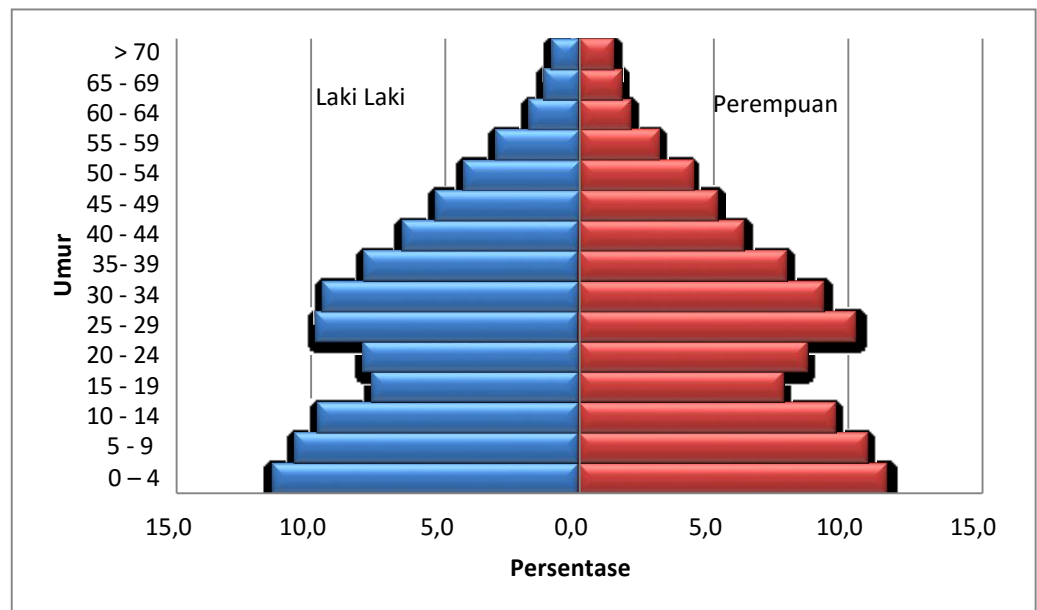
Umur	Penduduk					Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	%	Perempuan	%	Jumlah	
0 – 4	12.828	51,01	12.319	48,99	25.147	1.04
5.-9	10.747	50,65	10.472	49,35	21.219	1.03
10.-14	9.465	51,67	8.854	48,33	18.319	1.07
15 – 19	8.595	52,50	7.775	47,50	16.370	1.11
20 – 24	9.770	51,63	9.152	48,37	18.922	1.07
25 – 29	10.757	51,28	10.219	48,72	20.976	1.05
30 – 34	9.811	51,77	9.139	48,23	18.950	1.07

35- 39	8.856	52,64	7.968	47,36	16.824	1.11
40 – 44	7.412	53,50	6.441	46,50	13.853	1.15
45 – 49	5.940	53,18	5.230	46,82	11.170	1.14
50 – 54	4.684	51,89	4.339	48,07	9.027	1.08
55 – 59	3.699	51,89	3.429	48,11	7.128	1.08
60 – 64	2.615	52,09	2.405	47,91	5.020	1.09
65 – 69	1.520	49,84	1.530	50,16	3.050	0.99
70-74	1.133	47,81	1.237	52,19	2.370	0.92
75+	1.103	47,06	1.241	52,94	2.344	0.89
Jumlah	108.939	51,71	101.750	48,29	210.689	1.07

Berdasarkan data tabel 3 diperoleh Median umur penduduk Dhamasraya tahun 2013 adalah 26,06 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk Dhamasraya termasuk kategori pertengahan atau intermediate. Penduduk suatu wilayah dikategorikan penduduk muda bila median umur < 20, penduduk menengah jika median umur 20-30, dan penduduk tua jika median umur > 30 tahun. Sementara rasio ketergantungan penduduk Dharmasraya adalah 55. Artinya setiap 100 orang usia produktif (15-64 tahun) terdapat sekitar 55 orang usia tidak produktif (0-14 dan 65+), yang menunjukkan banyaknya beban tanggungan penduduk suatu wilayah. Angka ini sedikit lebih rendah bila dibandingkan dengan rasio ketergantungan penduduk perdesaan yakni 56,30, tetapi masih lebih tinggi dari rasio ketergantungan penduduk perkotaan adalah 46,59.

Selanjutnya berdasarkan penduduk kelompok umur dan jenis kelamin di atas dapat dibuat piramida penduduk seperti pada gambar 1. Piramida ini sama halnya dengan piramida penduduk Indonesia yang memperlihatkan ciri-ciri: alas piramida lebih lebar, dan semakin ke atas makin kecil sebagai ciri dari penduduk muda. Dengan ciri yang demikian dapat diprediksi bahwa angka fertilitas cenderung tinggi, sebagaimana disebutkan di atas bahwa LPP Dharmasraya termasuk kategori tinggi.

Gambar 2.5: Piramida Penduduk Dharmasraya Hasil Sensus Penduduk Tahun 2013



Terkait dengan kependudukan, salah satu permasalahan yang dihadapi daerah Dharmasraya adalah LPP yang tinggi sebagaimana disampaikan di atas. LPP yang tinggi bisa karena tingginya pertumbuhan penduduk alamiah (natural increase), dan karena migrasi masuk lebih besar dari migrasi keluar. Mengacu pada bentuk grafik penduduk Dharmasraya tahun 2011, untuk kelompok umur tertentu (usia kerja) ada kemungkinan migrasi masuk cukup besar. Kemudian dengan alas yang masih tetap lebar menunjukkan bahwa untuk keseimbangan pembangunan dan penduduk, maka angka fertilitas perlu diwaspadai. Artinya kebijakan penduduk masih perlu bertumpu pada upaya menurunkan angka fertilitas.

b) Kepadatan Penduduk

Berdasarkan data tabel 4 dapat dilihat bahwa konsentrasi penduduk terdapat di kecamatan Koto Baru, Sungai Rumbai, dan Sitiung. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di kecamatan Sungai Rumbai dengan kepadatan 4,06 jiwa per Ha, berikut Sitiung dengan kepadatan 1,98 jiwa per Ha, dan Koto Baru dengan kepadatan 1,41 jiwa per Ha. Kecamatan dengan kepadatan terendah yaitu kecamatan IX Koto dan Kecamatan Asam Jujuhan dengan kepadatan masing-masingnya 0,16 jiwa dan 0,27 jiwa per Ha.

Tingginya kepadatan penduduk Sungai Rumbai karena daerah tersebut merupakan daerah perbatasan Sumatera Barat dan Jambi. Selain itu, daerah ini dapat dikatakan sebagai gerbang tenggara Sumatera Barat sekaligus juga sebagai pusat perdagangan, sedangkan Kecamatan Sitiung merupakan kawasan konsentrasi transmigrasi. Proses transmigrasi ini terjadi antara tahun 1976

hingga 2002 dan mencapai proporsi sepertiga penduduk Kabupaten. Koto Baru dan Gunung Medan berfungsi sebagai daerah transit bagi penduduk yang melakukan perjalanan antarpropinsi. Kec. IX Koto dan Kec. Asam Jujuhan merupakan kawasan berbukit diperbatasan dan memiliki kawasan lindung yang cukup luas serta jauh dari pusat kegiatan sehingga kepadatan penduduk di kawasan ini rendah.

Tabel 2.5: Luas Daerah dan Kepadatan Penduduk Dharmasraya tahun 2013

No.	Kecamatan	Luas		Penduduk Seluruhnya				Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)
		Ha	%	L	P	L+P	%	
1	Sungai Rumbai	5.106	1,69%	10.842	9.892	18.860	9,54%	4,06
2	Koto Besar	56.057	18,53%	12.517	11.700	23.317	11,80%	0,43
3	Asam Jujuhan	48.541	16,04%	7.160	6.059	11.362	5,75%	0,27
4	Koto Baru	22.120	7,31%	15.917	15.196	29.551	14,96%	1,41
5	Koto Salak	12.145	4,01%	8.077	7.847	15.356	7,77%	1,31
6	Tiumang	13.443	4,44%	5.917	5.540	11.218	5,68%	0,85
7	Padang Laweh	6.062	2,00%	3.355	2.996	5.677	2,87%	1,05
8	Sitiung	12.457	4,12%	12.641	11.976	23.543	11,91%	1,98
9	Timpeh	32.301	10,67%	7.373	6.946	13.742	6,95%	0,44
10	Pulau Punjung	44.316	14,65%	21.122	19.658	37.429	18,94%	0,92
11	IX Koto	50.050	16,54%	4.018	3.940	7.544	3,82%	0,16
Jumlah		302.599	100,00	108.939	101.750	197.599	100,00	0,70

Sumber: BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 dan RTRW Kabupaten Dharmasraya 2011-2031

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan indikator makro pertumbuhan ekonomi dan kontribusi sektor ekonomi, kemudian dilanjutkan dengan indikator sosial ekonomi seperti ketimpangan pendapatan, tingkat kesejahteraan sosial.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak pembangunan yang dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi terbentuk dari perubahan yang terjadi pada berbagai sektor ekonomi dalam suatu daerah yang tersaji dalam data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Dari tahun ketahun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Dharmasraya terus memperlihatkan perkembangan yang cukup baik walaupun terjadi fluktuasi. Pertumbuhan PDRB tahun 2008 sebesar 6,54 persen meningkat menjadi 6,64 persen tahun 2009 dan kembali turun menjadi 6,51 persen pada tahun 2010, lalu tahun 2011 naik kembali menjadi 6,54 persen dan terus naik pada tahun 2012 6,62 persen dan turun kembali menjadi 6,55 persen ditahun 2013, namun demikian secara rata-rata pertumbuhan PDRB dari tahun 2007-2013 masih sebesar 6.54 persen lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata Sumatera Barat yang hanya 5.93 % pada periode tahun tersebut.

Perbandingan pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Pada periode tahun 2007-2008, pertumbuhan ekonomi kabupaten Dharmasraya masih dibawah pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Tetapi pada periode tahun setelah itu, perekonomian Kabupaten Dharmasraya mengalami peningkatan yang sangat pesat dan berada di atas laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

Apabila diperhatikan tabel dibawah ini, ada beberapa lapangan usaha yang mempunyai laju pertumbuhan rata-rata sektoral diatas laju pertumbuhan rata-rata keseluruhan yaitu lapangan usaha pertambangan dan penggalian, lapangan usaha bangunan dan lapangan usaha perdagangan, lapangan usaha keuangan, persewaan dan jasa keuangan dan lapangan usaha jasa Hal ini mengindikasikan bahwa kelima lapangan usaha ini merupakan lapangan usaha yang mempunyai potensi pengembangan cukup besar dan diharapkan menjadi lapangan usaha andalan bagi perekonomian Kabupaten Dharmasraya. Disamping itu kondisi kabupaten Dharmasraya sebagai Kabupaten hasil pemekaran yang pasti baru memulai proses pembangunan sehingga menyebabkan beberapa lapangan usaha melaju dengan cepat seiring dengan dimulainya proses pembangunan.

Tabel 2.6: PDRB Kabupaten Dharmasraya Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha (Jutaan Rupiah) 2007 – 2013

No	LAPANGAN USAHA	2007	2008	2009	2010	2011	2012*	2013**	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1.	Pertanian	376.206,15	380.541,52	407.396,17	429.804,26	453.964,98	477.546,74	505.867,16	5,93
2.	Pertambangan dan Penggalian	37.788,56	59.953,21	63.444,49	70.557,79	76.057,59	82.024,45	84.818,75	3,41
3.	Industri pengolahan	65.484,92	69.374,72	72.302,46	75.907,11	79.801,14	84.940,33	89.399,70	5,25
4.	Listrik dan air	10.084,37	10.286,38	10.343,05	10.705,71	11.412,61	12.184,19	12.847,52	5,44
5.	Bangunan	105.051,62	114.201,62	122.502,72	131.842,72	139.542,33	150.091,73	163.615,00	9,01
6.	Perdagangan, hotel dan Restoran	110.260,13	116.304,39	124.619,02	133.205,25	142.855,03	152.501,59	162.503,23	6,56
7.	Angkutan dan komunikasi	61.544,70	65.009,48	68.861,33	72.734,36	77.616,01	83.990,79	90.765,97	8,07
8.	Keu, persewaan & Jasa Perusahaan	38.402,16	41.696,64	45.106,33	49.642,99	53.463,06	58.238,98	62.275,05	6,93
9.	Jasa-jasa	152.679,86	162.711,56	173.200,42	184.157,33	199.663,39	214.616,91	230.313,09	7,31
Total PDRB		957.502,47	1.020.079,52	1.087.775,99	1.158.557,51	1.234.376,14	1.316.135,71	1.402.405,47	6,55

Sumber: BPS Kabupaten Dharmasraya tahun 2013

Kondisi pembangunan ekonomi sektoral berdasarkan potensi dan daya saing dapat diketahui dengan menggunakan analisis indeks Location Quotient (LQ). Analisis ini mengkategorikan sektor perekonomian menjadi sektor basis dan non-basis. Sektor produksi basis yaitu sektor yang memiliki nilai $LQ > 1$ berarti sektor tersebut mampu memenuhi kebutuhannya sendiri bahkan mengekspor ke daerah lainnya. Dengan kata lain, sektor basis memiliki daya saing dan keunggulan komparatif. Sebaliknya, nilai $LQ < 1$ menunjukkan bahwa produksi suatu sektor tergantung kepada impor atau pemenuhan dari daerah lain. Potensi ekonomi sektoral Kabupaten Dharmasraya secara lengkap disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.7: Basis Ekonomi Kabupaten Dharmasraya Berdasarkan Indeks Location Quotient (LQ)

No	Lapangan Usaha	Indeks LQ	
		2008	2011
1.	Pertanian	1,55	1,61
	Tanaman Pangan & Hortikultura	0,36	0,53
	Tanaman Perkebunan	2,68	3,92
	Peternakan	0,99	1,66
	Kehutanan	1,28	2,30
	Perikanan	0,47	0,88
2.	Pertambangan dan penggalian	1,90	2,03
3.	Industri pengolahan	0,53	0,53
4.	Listrik dan air	0,87	0,83
5.	Bangunan	2,25	2,06
6.	Perdagangan, hotel dan restoran	0,62	0,64
7.	Angkutan dan komunikasi	0,45	0,41
8.	Keuangan persewaan & jasa perusahaan	0,79	0,85
9.	Jasa-jasa	0,99	0,95

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, data diolah

Keterangan: Potensi Pengembangan ekonomi merupakan hasil perhitungan LQ pada tahun 2008 dan 2010.

Berdasarkan metode LQ pada tahun 2011 ditemukan hasil bahwa sektor-sektor basis Kabupaten Dharmasraya yaitu pertambangan (2,03) dan pertanian (1.61) dengan catatan bahwa sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, dan perikanan belum menjadi sektor basis perekonomian. Sementara sektor bangunan memiliki proporsi yang besar (2.06). Subsektor peternakan mengalami transformasi positif pada tahun 2011 (0,99 menjadi 1,66) .

b. Kontribusi Sektoral Pendapatan Regional

Secara sektoral perekonomian Kabupaten Dharmasraya untuk tahun 2009 masih didominasi 4 sektor utama sebagai penghasil nilai tambah terbesar terhadap PDRB , yaitu (1) sektor pertanian, (2) sektor bangunan, dan (3) sektor perdagangan, hotel, dan restoran, serta (4) sektor jasa-jasa. Sementara itu pada tahun 2010 dari total PDRB Kabupaten Dharmasraya sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 37.1%, dilanjutkan dengan sektor bangunan (11.38%), sektor perdagangan hotel dan restoran (11.5%), serta sektor jasa-jasa (15.9%). Pada tahun 2011, sektor pertanian juga masih memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB kabupaten Dharmasraya yaitu sebesar 36,78%.

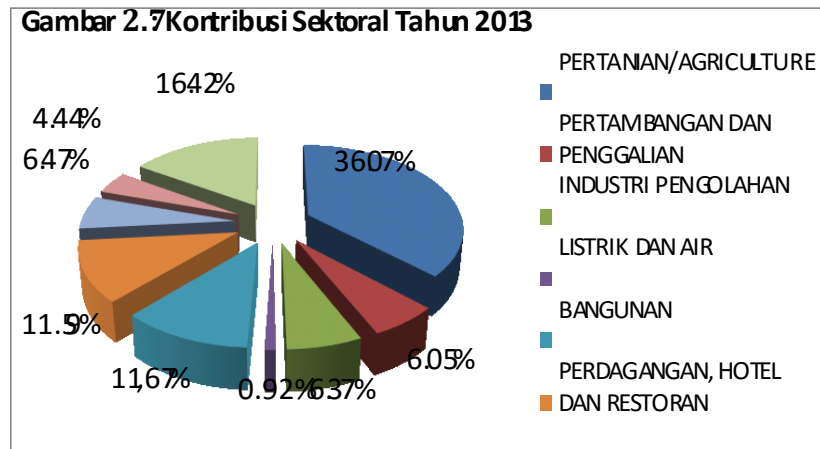
Meskipun demikian apabila dilihat dari tren pertumbuhan kontribusi sektoral, sektor pertanian yang mendominasi perekonomian mempunyai kecenderungan yang menurun dari periode waktu 2007-2011. Hal yang sebaliknya ditunjukkan oleh sektor-sektor yang memberikan sedikit kontribusi tetapi menunjukkan tren yang meningkat seperti sektor pertambangan yang hanya berkontribusi sebesar 6.09 % pada tahun 2010 dan meningkat lagi pada tahun 2011 menjadi 6.16% kontribusinya. Begitu pula dengan sektor lainnya seperti sektor keuangan meskipun hanya berkontribusi sebesar yang kecil yaitu hanya 4.28 % pada tahun 2010 tetapi meningkat pada tahun 2011 menjadi 4.33% dan cenderung menunjukkan peningkatan yang positif dari tahun ke tahun.

Tabel 2.8: Kontribusi Sektor-Sektor Terhadap PDRB Kabupaten Dharmasraya Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2007-2013

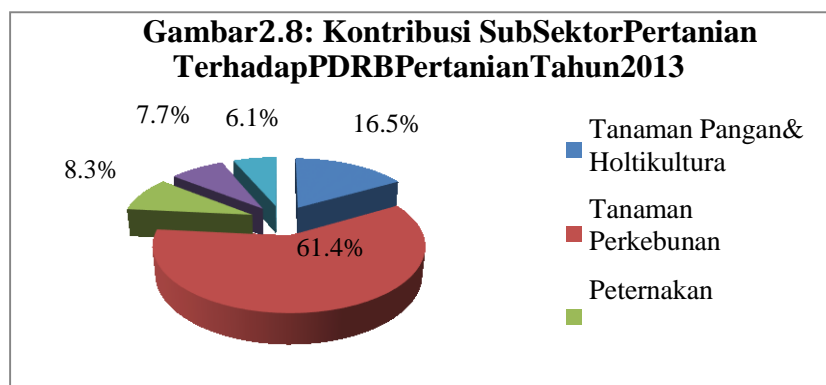
No	Lapangan Usaha	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Pertanian	39,29	37,31	37,45	37,1	36,78	36,28	36,07
2.	Pertambangan dan galian	3,95	5,88	5,83	6,09	6,16	6,23	6,05
3.	Industri Pengolahan	6,84	6,8	6,65	6,55	6,46	6,45	6,37
4.	Listrik dan air	1,05	1,01	0,95	0,92	0,92	0,93	0,92
5.	Bangunan	10,97	11,2	11,26	11,38	11,3	11,4	11,67
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	11,52	11,4	11,46	11,5	11,57	11,59	11,59
7.	Angkutan dan Komunikasi	6,43	6,37	6,33	6,28	6,29	6,38	6,47
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	4,01	4,09	4,15	4,28	4,33	4,42	4,44
9.	Jasa-jasa	15,95	15,95	15,92	15,9	16,18	16,31	16,42

Sumber: BPS Kabupaten Dharmasraya, 2014

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor utama di Wilayah Kabupaten Dharmasraya, yang selalu mendapat prioritas utama dalam kegiatan pembangunan ekonomi saat ini, dimana kontribusi sektor pertanian paling besar terhadap PDRB Kabupaten Dharmasraya. Pada grafik dibawah ini dapat terlihat bahwa pada tahun 2013, kontribusi sektor pertanian sebesar 36.07 %. Tetapi kecenderungan kontribusi sektor pertanian dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan yang menurun.



Sub sektor pertanian yang memberi kontribusi terbesar terhadap sektor pertanian adalah subsektor tanaman perkebunan yaitu sebesar 61,4%. Hal ini sesuai dengan kondisi yang menunjukkan bahwa sebagian besar lahan pertanian yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya didominasi oleh subsektor tanaman perkebunan. Besarnya kontribusi masing-masing subsektor dalam sektor pertanian terlihat dalam gambar dibawah ini.



Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Bank Indonesia Padang terhadap komoditi-komoditi Unggulan di masing-masing Kabupaten/Kota di Sumatera Barat termasuk didalamnya yaitu Kabupaten Dharmasraya, menunjukkan bahwa komoditi unggulan untuk Kabupaten Dharmasraya seperti yang diperlihatkan tabel dibawah ini, dimana dari lima komoditi unggulan Kabupaten Dharmasraya tiga komoditi berasal dari sektor pertanian khususnya sub sektor tanaman perkebunan yaitu komoditi Karet, Kelapa Sawit dan Coklat. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Dharmasraya sebagai Kabupaten yang mempunyai potensi besar di sektor pertanian dan perekonomiannya lebih didominasi oleh sektor pertanian.

Tabel 2.9: Lima Komoditi Unggulan Kabupaten Dharmasraya

No.	KPJU	Sektor Usaha
1.	Karet	Perkebunan
2.	Kelapa Sawit	Perkebunan
3.	Tempe	Industri
4.	Coklat	Perkebunan
5.	Sapi Potong	Peternakan

Sumber: Bank Indonesia, Hasil Penelitian 2013

c. Laju Inflasi dan Uang Beredar

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun; inflasi sedang antara 10%—30% setahun; berat antara 30%—100% setahun; dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun.

Apabila diperhatikan tabel dibawah ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat inflasi di Kabupaten Dharmasraya secara rata-rata dari tahun 2007 sampai tahun 2010 tergolong pada inflasi ringan atau dibawah 10%. Tetapi pada tahun 2007 dan 2008 terjadi inflasi kategori sedang dimana tingkat inflasi diatas 10 %. Pada tahun 2009 sampai tahun 2012 kembali terjadi inflasi ringan dan pada 2013 kembali pada kategori inflasi sedang. Hal ini terjadi dikarenakan pada periode tersebut perekonomian Indonesia secara keseluruhan sedang dilanda krisis yang menyebabkan terjadi peningkatan harga secara umum tidak saja di Kabupaten Dharmasraya tetapi juga di hampir seluruh daerah di Indonesia, sedangkan pada tahun 2013 inflasi lebih disebabkan oleh kenaikan harga BBM pada bulan Juni, kenaikan tarif dasar listrik dan persiapan menghadapi puasa dan tahun ajaran baru.

Apabila dibandingkan dengan tingkat inflasi di Sumatera Barat, maka pada beberapa tahun tertentu yaitu tahun 2007, 2009 dan 2011 tingkat inflasi di Kabupaten Dharmasraya lebih tinggi daripada tingkat inflasi Sumatera Barat. Hal ini dikarenakan pada tahun-tahun tersebut terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap harga hasil produk-produk pertanian seperti kelapa sawit dan karet. Sebagaimana diketahui komoditi pertanian merupakan produk unggulan dan penyumbang terbesar terhadap perekonomian daerah. Kenaikan harga produk pertanian menyebabkan pendapatan masyarakat meningkat dan meningkatkan daya beli yang sudah tentu akan berpengaruh besar terhadap kenaikan harga secara umum di daerah ini.

Tabel 2.10: Tingkat Inflasi

Tahun	Dharmasraya	Sumatera Barat
2007	11,31	6,9
2008	10,70	12,68
2009	4,35	2,05
2010	6,94	7,84
2011	7,36	5,37
2012	4,16	5,37
2013	10,87	4,16

Sumber: BPS Sumatera Barat 2014, data diolah

Penciptaan uang/besarnya uang beredar dalam masyarakat dapat digambarkan sebagai proses pasar. Jumlah Uang Beredar juga mempunyai keterkaitan dengan suku bunga deposito. Semakin banyak jumlah uang yang beredar dimasyarakat, investasi menjadi lebih menarik bila dibandingkan dengan menyimpan dalam bentuk tabungan. Jumlah uang beredar dalam arti luas merupakan penjumlahan uang kartal dan uang quasi. Dimana uang quasi dapat diprosikan sebagai dana simpanan pihak ketiga yang tersimpan pada bank umum.

Menurut data yang ada seperti diperlihatkan tabel dibawah ini, jumlah simpanan dana pihak ketiga di Kabupaten Dharmasraya dari tahun-ketahun berfluktuasi. Peningkatan yang sangat besar terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 765.65%. Pada tahun 2008 sampai tahun 2009 masih terjadi peningkatan yang sangat besar terhadap uang beredar di Kabupaten Dharmasraya. Hal ini secara tidak langsung dipengaruhi oleh peningkatan yang sangat besar terhadap harga produk-produk pertanian khususnya tanaman perkebunan. Tetapi pada tahun 2012 dimana pada tahun ini harga produk perkebunan mengalami penurunan maka secara langsung juga menurunkan jumlah uang beredar sebesar 70,85%. Tetapi pada tahun

2013 terjadi lonjakan yang sangat besar pada jumlah uang yang beredar di kabupaten Dharmasraya.

Tabel 2.11: Banyaknya Uang Beredar

Tahun	Uang Beredar (juta Rp)	Pertumbuhan (%)
2009	953.780	
2010	1.266.389	32,78
2011	1.339.014	5,73
2012	390.272	-70,85
2013	16.129.117	4.032,78

Sumber: 8 Bank Di Kabupaten Dharmasraya

Tingginya jumlah uang yang beredar berpengaruh kepada tingkat bunga dan investasi. Dimana diharapkan investasi akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah uang yang beredar. Tetapi apabila kita perhatikan tabel dibawah ini, dari tahun 2009 sampai tahun 2013 terlihat bahwa terdapat selisih negatif aliran uang di Kabupaten Dharmasraya, Dimana aliran uang masuk lebih sedikit dibandingkan dengan aliran uang keluar. Sangat disayangkan apabila hal ini terjadi setiap saat karena mengindikasikan terjadinya aliran modal keluar dari Kabupaten Dharmasraya. Seharusnya terjadi adalah uang beredar di Kabupaten Dharmasraya dapat digunakan untuk berinvestasi dan mengembangkan perekonomian daerah.

Tabel 2.12: Transfer Dana Masuk dan Keluar Melalui Jasa Bank

Tahun	Masuk(Juta)	Keluar(Juta)	Selisih
2009	10.892.896	12.372.707	-1.479.812
2010	297.410	4.462.001	- 4.164.591
2011	978.988	1.382.080	- 403.093
2012	137.228	412.641	- 275.414
2013	123.453	459.658	- 336.205

Sumber: Delapan Bank di Kabupaten Dharmasraya

d. Pendapatan Perkapita dan Ketimpangan Pendapatan

Dampak kebijakan pembangunan suatu daerah terlihat dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Tingginya PDRB suatu daerah belum tentu mencerminkan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, karena juga sangat tergantung kepada perkembangan jumlah penduduk. Salah satu indikator yang sering digunakan adalah PDRB perkapita dan pendapatan regional perkapita, yang menggambarkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama setahun. Angka-angka perkapita akan menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah. Untuk melihat gambaran secara riil keadaan tersebut digunakan PDRB atas dasar harga berlaku.

Tahun 2013 kenaikan pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Dharmasraya tercatat sebesar 10.96 persen dengan nilai sebesar Rp. 18.710.677,33 per orang per tahun sedangkan tahun 2012 hanya sebesar Rp. 16.862.823,92 per orang per tahun. Begitu juga dengan Pendapatan Regional Perkapita yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sekitar 10,93 persen Peningkatan nilai PDRB Perkapita maupun Pendapatan Regional Perkapita pada tahun 2013 dibandingkan tahun sebelumnya mencerminkan semakin meningkatnya kesejahteraan penduduk Kabupaten Dharmasraya.

Apabila dibandingkan dengan perkembangan pendapatan perkapita penduduk Sumatera Barat, maka pendapatan perkapita masyarakat Dharmasraya masih berada dibawah pendapatan perkapita Sumatera Barat secara keseluruhan atau tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dharmasraya masih dibawah tingkat kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat seperti yang diperlihatkan tabel dibawah ini. Tetapi dengan mempertimbangkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya yang lebih tinggi dari pada laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat maka bisa dipastikan suatu saat tingkat pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Dharmasraya akan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pendapatan perkapita masyarakat di Sumatera Barat umumnya.

Tabel 2.13: Perbandingan Pendapatan Perkapita Kabupaten Dharmasraya dengan Propinsi Sumatera Barat

Tahun	Kabupaten Dharmasraya		Sumatera Barat	
	PDRB/kapita	Pendapatan Regional/kapita	PDRB/kapita	Pendapatan Regional/kapita
2007	10.180.286,52	9.678.778,66	12.808.637,46	11.762.362,70
2008	11.314.964,39	10.766.881,98	15.003.730,16	13.769.096,99
2009	12.417.559,87	11.811.441,54	15.996.690,68	14.663.662,45

2010	13.939.562,78	13.283.416,09	17.928.312,05	16.409.542,21
2011	15.473.246,80	14.766.732,14	20.061.825,54	18.389.408,79
2012	16.862.823,92	16.081.246,59	22.035.049,28	20.123.077,38
2013	18.710.677,33	17.839.431,87	25.086.340,80	22.965.421,35

Sumber: BPS Kabupaten Dharmasraya 2014

Tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah juga bisa dilihat dengan sebesar besar penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Headcount Index, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan adalah beras, gula pasir, telur, mie instan, tahu dan tempe. Untuk komoditi bukan makanan adalah biaya perumahan, biaya listrik, angkutan dan minyak tanah. Disamping itu unsur Inflasi juga sangat berpengaruh dengan jumlah penduduk miskin. Peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin meningkat karena harga barang-barang kebutuhan pokok naik. Akibatnya penduduk yang tergolong tidak miskin namun penghasilannya berada disekitar garis kemiskinan banyak yang bergeser posisinya menjadi miskin.

Dari tahun ke tahun garis kemiskinan semakin meningkat seiring meningkatnya inflasi. Sedangkan persentase penduduk miskin Kabupaten Dharmasraya semakin menurun. Perkembangan jumlah penduduk miskin dari tahun 2006 sampai tahun 2013, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 7,14 % atau 8.980 jiwa, artinya terjadi pengurangan jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun atau bisa juga diartikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat dari tahun ketahun seiring dengan penurunan jumlah penduduk miskin.

Tabel 2.14: Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin

Tahun	Garis Kemiskinan Rp/Kap/Bln	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Penduduk Miskin (%)	Perubahan per tahun (%)
2006	169,588	170.440	25.400	14,93	
2007	175,577	175.573	23.800	14,42	-0,51
2008	184,683	180.915	21.400	12,53	-1,89
2009	229,181	186.354	19.900	11,40	-1,13

2010	257,608	192.152	20.300	10,56	-0,84
2011	275,528	198.298	19.570	9,87	-0,69
2012	292,195	202.601	18.180	8,97	-0,9
2013	309,661	210.689	16.420	7,79	-1,18

Sumber: BPS Kabupaten Dharmasraya, 2014

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif, dapat menggunakan dua ukuran untuk merefleksikan ketimpangan pendapatan yaitu Koefisien Gini (Gini Ratio) dan Ukuran Bank Dunia. Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Untuk membentuk koefisien Gini, grafik persentase kumulatif penduduk (dari termiskin hingga terkaya), koefisien Gini akan bernilai 1 yang berarti ketimpangan sempurna dan 0 yang berarti merata sempurna.

Pada tabel dibawah dijelaskan besaran koefisien Gini untuk semua daerah Kabupaten yang ada di Sumatera Barat, dimana pada tahun 2011 secara rata-rata semua daerah kabupaten di Sumatera Barat mempunyai distribusi pendapatan relatif merata karena memiliki angka Koefisien Gini 0.329. Beberapa daerah memiliki Gini rasio dibawah rata-rata Sumatera Barat salah satunya adalah daerah Kabupaten 50 Kota dengan Gini rasio sebesar 0.255 yang berarti pendapatan masyarakat di kabupaten ini relatif merata.

Kabupaten Dharmasraya sendiri memiliki Gini rasio kedua terbesar di Sumatera Barat setelah Kota Padang Panjang dan tertinggi diantara kabupaten yaitu 0.369. Artinya pendapatan masyarakat Kabupaten Dharmasraya relatif timpang dibandingkan masyarakat Sumatera Barat pada umumnya.

Tabel 2.15: Gini Rasio Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2013

No	Kabupaten/ Kota	Gini Rasio
1	Kep. Mentawai	0,326
2	Pesisir Selatan	0,264
3	Solok	0,285
4	Sijunjung	0,299
5	Tanah Datar	0,345
6	Padang Pariaman	0,314
7	Agam	0,277
8	Lima Puluh Kota	0,255
9	Pasaman	0,291
10	Solok Selatan	0,292

No	Kabupaten/ Kota	Gini Rasio
11	Dharmasraya	0,369
12	Pasaman Barat	0,269
13	Padang	0,304
14	Payakumbuh	0,320
15	Bukittinggi	0,329
16	Sawahlunto	0,336
17	Solok	0,345
18	Pariaman	0,349
19	Padang Panjang	0,399
	Rata-rata	0,329

Sumber: Gini Rasio Kabupaten Dharmasraya 2012

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Kondisi kesejahteraan sosial berkaitan dengan kualitas kehidupan manusia yang terlihat dari berbagai indikator kualitas hidup manusia dan pemenuhan kebutuhan hidup yang mendasar untuk mendukung kehidupan yang berkualitas terutama dalam aspek pendidikan dan kesehatan.

a. Kondisi Kualitas Pembangunan Manusia (Indeks Pembangunan Manusia)

Kondisi kualitas pembangunan manusia dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nilai IPM Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2013 sebesar 70,52 berada pada peringkat ke 17 di Provinsi Sumatera Barat diatas Solok Selatan dan Mentawai. Pencapaian per indikator yaitu: rata-rata lama sekolah 7,77 tahun (rata-rata Sumbar 8,48 tahun); pengeluaran perkapita Rp. 608.890 terendah setelah Mentawai (rata-rata Sumbar Rp. 635,29); angka melek huruf 96,38% urutan ke 7 dari 12 kabupaten(rata-rata Sumbar 97,09%); dan angka harapan hidup rata-rata 66 tahun terendah di Sumbar (rata-rata Sumbar 69,50 tahun).

Tabel 2.16 : Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008-2013

Indikator/ indeks	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Angka Harapan Hidup	65,5	65,75	66	66,25	66,5	66,55
Angka Melek Huruf	95,54	96,16	96,38	97,27	97,29	97,33
Rata-rata lama sekolah	7,37	7,54	7,77	8,24	8,24	8,26
pengeluaran perkapita	604,04	604,49	608,89	610,66	612,72	615,5
IPM Dharmasraya	67,99	68,43	69,13	69,89	70,25	70,52

Sumber: BPS Kab. Dharmasraya, 2014. Data diolah

Pencapaian pada tahun 2013 tersebut merupakan peningkatan karena sampai tahun 2008 peringkat IPM Kabupaten Dharmasraya terendah di Provinsi Sumbar. Dilihat dalam peringkat propinsi antar Kabupaten/Kota dalam rentang tahun 2008 -2013 terdapat kenaikan yaitu dari urutan 19 menjadi 17.

**Tabel 2.17 : Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2008-2013**

No	KABUPATEN/ KOTA	Angka Harapan Hidup (Tahun)						Angka Melek huruf (Persen)						Rata-rata lama Sekolah (Tahun)						Pengeluaran riil per kapita yg d disesuaikan (Rp. 000)						IPM					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Bukittinggi	71,22	71,37	71,53	71,69	71,85	71,89	99,49	99,55	99,92	99,93	99,93	99,94	10,43	10,47	10,5	10,58	10,59	10,59	646,58	648,49	651,09	655,31	658,39	660,99	77,59	77,86	78,26	78,73	79,07	79,29
2	Padang	70,39	70,64	70,89	71,14	71,39	71,44	99,48	99,49	99,49	99,5	99,51	99,52	10,8	10,85	10,91	10,92	10,94	10,94	643,92	644,31	647,24	649,62	652,88	656,01	77,19	77,4	77,81	78,15	78,55	78,82
3	Pdg Panjang	70,6	70,95	71,3	71,66	72,01	72,08	99,28	99,29	99,3	99,31	99,32	99,35	10,2	10,21	10,23	10,73	10,74	10,76	645,38	645,6	646,57	647,98	650,36	653,52	76,93	77,16	77,44	78,12	78,51	78,81
4	Payakumbuh	70,31	70,46	70,62	70,78	70,94	70,96	99,16	99,17	99,18	99,19	99,2	99,36	9,07	9,27	9,66	9,72	9,91	9,91	633,02	633,52	636,22	640,51	643,67	646,09	74,96	75,23	75,82	76,29	76,76	76,99
5	Kota Soiook	69,34	69,51	69,69	69,86	70,03	70,05	98,5	98,51	98,51	98,52	99,21	99,32	9,8	9,86	10,43	10,48	10,49	10,51	631,39	632,5	635,24	638,63	641,79	645,09	74,69	74,91	75,65	76,04	76,54	76,85
6	Sawahlunto	71,22	71,44	71,65	71,86	72,08	72,11	98,43	98,5	98,55	98,62	98,63	98,64	8,77	8,95	9,14	9,23	9,42	9,42	622,71	623,01	624,52	627,79	630,20	633,06	74,28	74,58	74,96	75,41	75,87	76,11
7	Pariaman	68,56	68,79	69,02	69,25	69,48	69,54	98,24	98,68	98,92	98,93	98,94	99,05	9,33	9,49	9,9	9,92	9,93	10,04	625,98	627,23	628,66	632,35	634,90	636,08	73,43	73,87	74,47	74,89	75,23	75,46
8	Tanah Datar	70,22	70,58	70,94	71,3	71,67	71,75	96,63	96,64	97,1	97,25	97,27	97,41	7,8	7,88	8,35	8,4	8,41	8,43	627,58	628,05	628,88	632,89	635,60	638,22	72,98	73,54	74	74,58	75	75,29
9	Agam	68,67	68,85	69,04	69,23	69,43	69,43	97,82	97,84	97,85	97,86	97,87	98,36	8,2	8,28	8,5	8,59	8,61	8,63	625,22	628,31	629,65	633,28	636,57	640,06	72,5	72,9	73,28	73,74	74,11	74,5
10	Pasaman	66,76	67,1	67,44	67,77	68,11	68,17	98,36	98,4	98,73	98,82	98,84	98,93	7,57	7,6	7,61	7,66	7,87	7,87	633,12	638,48	639,84	642,90	646,09	649,47	71,71	72,32	72,71	73,19	73,78	74,1
11	Pdg Pariaman	67,92	68,28	68,65	69,01	69,38	69,44	94,45	94,46	94,49	94,51	94,53	94,86	7,13	7,25	7,26	7,31	7,46	7,47	626,29	629,31	630,4	634,09	637,05	640,82	70,63	71,15	71,45	71,98	72,53	72,93
12	Lima Puluh kota	67,72	68,08	68,45	68,81	69,18	69,2	98,7	98,71	98,85	98,99	99,01	99,08	7,7	7,82	7,94	8	8,01	8,02	607,97	608,7	608,7	613,39	616,54	620	70,47	70,8	71,22	71,78	72,24	72,54
13	Pesisir Selatan	66,75	67,03	67,31	67,59	67,88	67,92	92,83	92,84	94,92	95,01	96	96,56	7,53	7,62	7,84	8,12	8,23	8,43	628,4	628,93	629,3	632,30	634,99	638,2	70,07	70,61	71,15	71,77	72,43	72,98
14	Kab.Solok	65,9	66,25	66,6	66,95	67,3	67,33	97,1	97,13	97,19	97,21	97,24	97,3	7,3	7,33	7,6	8,03	8,04	8,06	621,05	623,78	627,25	631,02	633,78	637,14	69,81	70,41	70,93	71,73	72,15	72,46
15	Sijunjung.	66,25	66,58	66,92	67,25	67,58	67,63	93,07	93,08	94,78	94,79	94,8	94,83	7,2	7,3	7,43	7,5	7,51	7,59	630,49	634,3	633,55	636,58	639,31	642,7	69,77	70,37	70,92	71,4	71,8	72,15
16	Pasaman Barat	64,62	64,88	65,15	65,41	65,68	65,77	97,83	98,18	98,2	98,29	98,32	98,37	7,9	7,91	8	8,03	8,06	8,06	616,14	619,52	621,31	624,64	628,04	631,43	69,33	69,82	70,18	70,62	71,07	71,39
17	Dharmasraya	65,5	65,75	66	66,25	66,5	66,55	95,54	96,16	96,38	97,27	97,29	97,33	7,37	7,54	7,77	8,24	8,24	8,26	604,04	604,49	608,89	610,06	612,72	615,5	67,99	68,6	69,13	69,89	70,25	70,52
18	Solok Selatan	64,35	64,48	64,61	64,74	64,88	64,94	97,24	97,74	97,53	97,6	97,63	97,72	7,57	7,76	7,82	7,84	7,86	8,17	606,3	610,08	613,28	616,62	619,84	623,15	68,06	68,67	68,98	69,34	69,69	70,23
19	Kep. Mentawai	68,28	68,36	68,45	68,54	68,63	68,72	92,37	92,38	93,58	93,67	93,69	93,88	6,5	6,51	6,51	6,52	6,52	6,76	601,23	606,4	606,53	609,56	611,43	613,89	67,97	68,42	68,75	69,06	69,26	69,72
	SUMATERABARAT	69	69,26	69,5	69,76	70,02	70,09	96,6	96,81	97,09	97,16	97,23	97,38	8,26	8,45	8,48	8,57	8,6	8,63	631,52	633,72	635,29	638,73	641,85	644,59	72,95	73,45	73,79	74,28	74,7	75,01

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2014

b. Kondisi Pendidikan



Pendidikan merupakan salah satu bidang strategis yang perlu mendapat perhatian serius dalam pemenuhannya. Mengingat pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Untuk itu, perencanaan yang cepat dan terarah dalam pembangunan

pendidikan mutlak diperlukan.

Berdasarkan data tahun 2013 jumlah SD/MI adalah 145 unit, SMP/MTS adalah 47 unit dan SMU/MA sebanyak 31 Unit. Kecamatan-kecamatan yang belum mendapatkan pelayanan pendidikan SMA/MA adalah Asam Jujuhan, Koto Salak, Tiumang, Padang Laweh, dan IX Koto. Kecamatan-kecamatan ini perlu mendapatkan prioritas pelayanan. Sarana pendidikan dasar (SD) sampai sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) perlu direncanakan untuk dapat menjangkau seluruh penduduk Kabupaten Dharmasraya. Kendala yang dihadapi adalah tersebarnya penduduk pada area yang luas sehingga jarak menjadi kendala utama pelayanan. Untuk itu minimal pada setiap kota kecamatan telah tersedia sarana pendidikan dari SD sampai SLTA. Akses dari kawasan permukiman menuju pusat pelayanan kecamatan tersebut perlu untuk ditingkatkan.

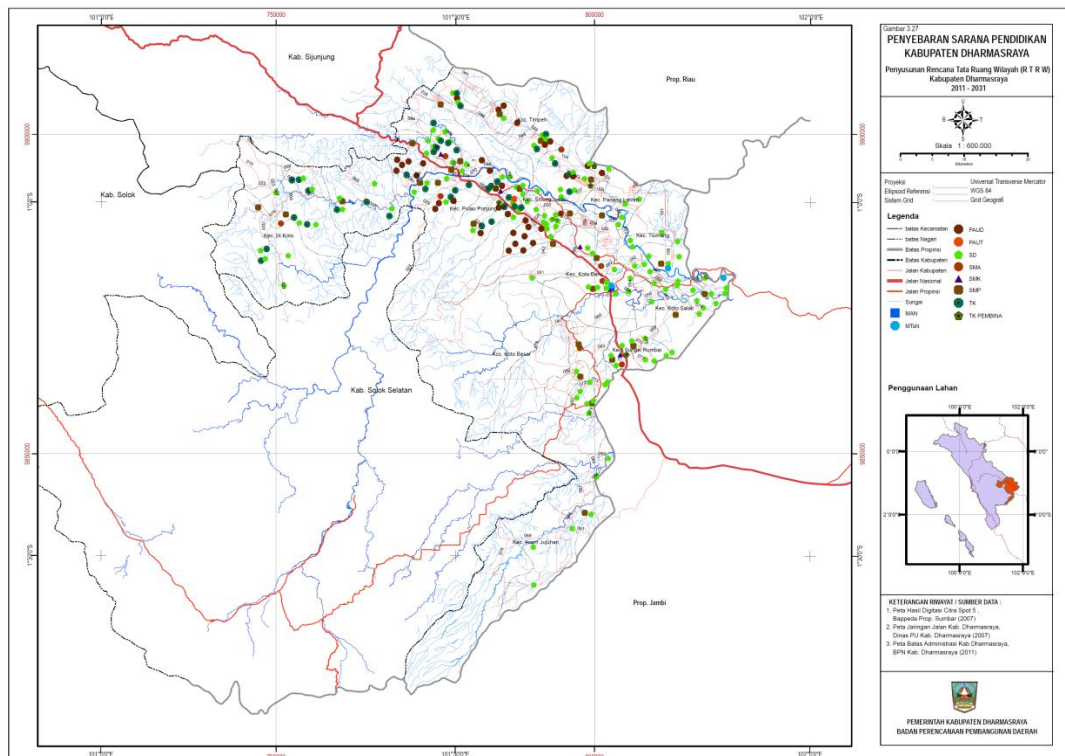
Tabel 2.18: Jumlah Sarana Pendidikan Pelayanan Skala Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013

No	Kecamatan	SD/MI			SLTP			SLTA			
		SD	MI	Jmlh	SMP	MTs	Jmlh	SMA	SMK	MA	Jmlh
1	Sungai Rumbai	9	-	9	2	1	3	2	1		2
2	Koto Besar	13	2	17	3	1	4	1	-	-	1
3	Asam Jujuhan	5	-	8	1	-	1	-	-	-	-
4	Koto Baru	16	-	17	4	5	8	3	1	5	6
5	Koto Salak	12	1	13	2	-	2	1	-	-	-
6	Tiumang	12	1	13	1	1	2	-	-	-	-
7	Padang Laweh	4	-	4	1	-	1	-	-	-	-
8	Sitiung	20	-	20	3	4	7	1	-	4	5
9	Timpeh	11	1	12	4	1	5	1		1	2

10	Pulau Punjung	24	-	24	7	3	10	4	2	3	6
11	IX Koto	14	-	13	3	-	3	1	-	-	-
Jumlah		140	5	145	31	16	47	14	4	13	31

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya 2014

Gambar 2.9 : Sebaran Sarana Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya



1) Angka Melek Huruf

Indikator lain terkait dengan pendidikan penduduk dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat adalah angka melek huruf penduduk usia 15-44. Kelompok penduduk usia ini merupakan penduduk usia produktif, sebagai sumber daya pembangunan yang seharusnya memiliki pendidikan yang memadai dan keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, dianggap penting untuk melihat perkembangan kemajuan indikator ini.

Tabel 2.19: Penduduk Usia 15-44 Tahun yang Melek Huruf Tahun 2013

No.	Kecamatan	Penduduk 15-44 tahun			Penduduk Buta Huruf 15-44 Th			Penduduk Bisa Baca 15-44 Th			Angka Melek Huruf
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	Sungai Rumbai	2.360	4.538	6.898	180	87	267	2.180	4.451	6.631	95,23
2	Koto Baru	6.586	5.320	11.906	167	143	310	6.419	5.177	11.596	97,39
3	Sitiung	4.534	5.813	10.347	109	8	117	4.425	5.805	10.230	98,73
4	Pulau Punjung	7.785	7.386	15.171	367	110	477	7.418	7.276	14.694	96,9
5	IX Koto	1.202	1.566	2.768	0	0	0	1.202	1.566	2.768	100
6	Timpeh	2.151	3.025	5.176	0	0	0	2.151	3.025	5.176	100
7	Koto Salak	3.228	4.151	7.379	0	0	0	3.228	4.151	7.379	100
8	Tiumang	2.192	2.868	5.060	0	0	0	2.192	2.868	5.060	100
9	Padang Laweh	1.418	1.344	2.762	0	0	0	1.418	1.344	2.762	100
10	Asam Jujuhan	2.909	3.293	6.202	0	0	0	2.909	3.293	6.202	100
11	Koto Besar	5.811	5.565	11.376	0	0	0	5.811	5.565	11.376	100
Dharmasraya		40.176	44.869	85.045	823	348	1.171	39.353	44.521	83.874	97,95

Sumber : Profil Pendidikan Kabupaten Dharmasraya 2014

Berdasarkan data Tabel 19 dapat dilihat bahwa hampir semua penduduk usia 15-44 tahun di daerah Dharmasraya sudah melek huruf, kecuali di empat kecamatan yaitu Sungai Rumbai, Koto Baru, Pulau Punjung dan Sitiung masih ditemukan penduduk yang buta huruf meskipun dalam jumlah yang relatif sedikit (kurang dari lima persen).

Tabel 2.20: Angka Buta Huruf Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013

Kota/Kabupaten	Laki-Laki					Perempuan					Jumlah				
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
1 Padang	0,25	0,47	0,81	0,25	0,5	1,1	0,72	1,41	0,73	0,72	0,68	0,6	1,11	0,49	0,61
2 Solok	0,87	1,34	1,22	0,38	0	1,26	0,61	1,58	0,51	1,16	1,07	0,96	1,4	0,45	0,58
3 Sawahlunto	0,91	1,61	2,4	1,45	0,2	1,01	0,79	1,85	1,38	0,16	0,96	1,19	2,13	1,42	0,18
4 Padang Panjang	0,56	0,6	1,6	0,62	1,11	1,37	0,23	2,08	0,88	0,23	0,96	0,42	1,84	0,75	0,67
5 Bukittinggi	0,17	0,18	0,15	0,59	0,56	0,15	-	0,83	0,91	0,19	0,16	0,08	0,49	0,75	0,38
6 Payakumbuh	1,27	0,55	1,36	0,73	0,56	1,66	1,45	1,51	0,46	0,48	1,48	0,99	1,44	0,59	0,52
7 Pariaman	0,69	0,53	1,33	1,24	0,08	0,72	0,53	1,63	0,59	0,68	0,7	0,53	1,48	0,91	0,38
Kabupaten															
1 Kep.Mentawai	4,01	3,05	6,12	7,03	2,54	6,38	6,23	10,6	10,7	8,66	5,15	4,56	8,36	8,86	5,6
2 Pesisir Selatan	1,04	2,24	2,34	1,34	1,24	2,94	2,42	3,72	4,09	1,56	2,04	2,33	3,03	2,72	1,4
3 Solok	2,14	2,87	2,73	2,63	1,93	4,32	3,13	3,69	3,12	2,65	3,26	3,01	3,21	2,88	2,29
4 Sijunjung	2,16	2,39	4,58	3,18	2,9	4,96	4,75	7,11	6,7	6,82	3,61	3,61	5,85	4,94	4,86
5 Tanah Datar	1,73	1,73	1,25	2,35	1,38	2,17	1,72	3,15	3,29	2,12	1,96	1,72	2,2	2,82	1,75
6 Padang Pariaman	2,94	2,04	2,92	2,43	1,52	5,45	6,31	4,96	5,05	3,66	4,31	4,22	3,94	3,74	2,59
7 Agam	1,92	1,34	0,93	1,54	0,5	2,76	2,57	3,17	2,38	1,27	2,35	1,97	2,05	1,96	0,88
8 50 Kota	1,42	1,69	1,55	1,48	0,28	3,5	2,64	2,8	1,41	0,71	2,51	2,18	2,18	1,45	0,49
9 Pasaman	1,1	0,64	1,28	1,27	0,77	1,59	1,27	2,3	2,82	1,1	1,35	0,96	1,79	2,04	0,93
10 Solok Selatan	1,93	1,7	2,14	2,35	1,24	2,68	2,49	4,73	3	2,41	2,31	2,09	3,44	2,68	1,83
11 Dharmasraya	1,11	0,98	1,09	2,03	2,2	3,16	3,3	2,99	4,52	3,55	2,1	2,12	2,04	3,28	2,88
12 Pasaman Barat	0,6	1,12	3,35	1,53	1,89	2,7	1,27	6,88	3,49	3	1,66	1,2	5,11	2,51	2,45

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, angka buta huruf kabupaten Dharmasraya berada pada peringkat ketujuh. Begitu juga dengan perbandingan antar kabupaten di Sumatera Barat Kabupaten Dharmasraya berada pada peringkat ketujuh.

2). Angka Partisipasi Kasar(APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan sebagainya) dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentupadawilayah tertentu.Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Nilai APK bisa lebih besar dari 100% karena terdapat murid yang berusia di luar usia resmi sekolah, terletak di daerah kota, atau terletak pada daerah perbatasan.

Tabel 2.21: Indikator Angka Partisipasi Kasar Tahun 2005-2013

No.	Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK)	Tahun								
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	APK SD	105,84	105,06	123,26	121,93	100,52	101,02	114,21	110,3	113,75
2	APK SMP	69,69	70,34	72,47	75,8	69,58	69,66	86,72	73,92	92,31
3	APK SMA	35,04	38,77	87,49	73,91	85,85	88,72	71,43	51,42	79,6

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya 2014

Dari indikator APK Kabupaten Dharmasraya tahun 2005 sampai dengan 2013 terlihat bahwa APK SD di Kabupaten Dharmasraya lebih dari 100% yang berarti terdapat kemungkinan adanya pelajar dari daerah lain atau murid yang berusia diluar usia resmi SD. APK SMP dalam rentang tahun 2005-2013 meningkat dari 69,69% menjadi 92,31% dan APK SMA meningkat dari 35,04% menjadi 79,6%.

3). Angka pendidikan yang ditamatkan (APT)

Pendidikan bukan sekadar upaya atau sarana orang mencari pekerjaan, melainkan sebuah proses pendewasaan diri untuk bisa hidup bermartabat. Karena merupakan proses pendewasaan diri, maka pendidikan tidak akan pernah berakhir, sekalipun yang bersangkutan telah mapan secara material dalam hidupnya (*education is long life*). Dengan demikian, pendidikan bukan alat (*means*) melainkan tujuan (*ends*). Tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan semakin baik kualitas SDM di wilayah tersebut. Tamat sekolah didefinisikan sebagai jenjang pendidikan yang telah berhasil diselesaikan oleh seseorang dengan dibuktikan adanya ijazah atau surat tanda tamat belajar.

Tabel 2.22: Distribusi Jumlah dan Proporsi Penduduk Dharmasraya Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2013

No	Tingkat Pendidikan Penduduk	Penduduk	
		Jumlah	%
1	Tidak/belum pernah sekolah	38.325	18,92%
2	Tidak/belum tamat SD	27.236	13,44%
3	Tamat SD	54.224	26,76%
4	Tamat SMP	36.036	17,79%
5	Tamat SMA	34.009	16,79%
6	Tamat SMK	786	0,39%
7	Tamat Perguruan Tinggi	8.673	4,28%
	- Tamat Diploma I/II	1.704	0,84%
	- Tamat Diploma III/Sarjana muda	2.069	1,02%
	- Tamat Sarjana	4.900	2,42%
8	Tak Terjawab	3.312	1,63%
Jumlah		202.601	100%

Sumber : Profil Pendidikan Kabupaten Dharmasraya 2013

Data tabel diatas memperlihatkan bahwa 59,12% penduduk Kabupaten Dharmasraya tidak pernah sekolah, tidak tamat SD sampai hanya tamat SD. proporsi terbesar penduduk Dharmasraya tahun 2013 adalah tamat SD (26,76%), kemudian tidak/belum tamat SD (13,44%), tamat SMP (17,79%), tidak/belum pernah sekolah (18,92%). Berdasarkan sebaran data terdapat kecendungan bahwa makin tinggi jenjang pendidikan makin sedikit penduduk yang berpartisipasi di dalamnya.

4). Angka Partisipasi Murni (APM)

Pendidikan merupakan kunci strategi dalam mempersiapkan terwujudnya anak bangsa yang demokratis, berketrampilan, cerdas, kreatif, memperteguh akhlak serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam rangka menghadapi persaingan global yang tanpa batas. Selain tingkat pendidikan, keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan juga dapat dilihat dari perkembangan indikator Angka Partisipasi Murni (APM). APM mencerminkan perbandingan jumlah siswa yang bersekolah di jenjang tertentu dengan usia tertentu dibanding dengan jumlah penduduk usia sekolah (usia tertentu untuk jenjang tertentu).

Tabel 2.23: Perkembangan APM Tahun 2007-2013

Usia	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
7 - 12	98,76	99,12	97,32	97,77	99,3	98,74	98,68
13 - 15	85,85	85,85	88,19	80,3	84,68	86,69	86,4
16 - 18	60,85	60,13	55,51	56,41	54,69	52,86	59,91

Perkembangan Angka Partisipasi Murni, untuk semua kelompok usia sekolah baik SD/MI, SMP/MTs, maupun SMA/MA/SMK periode 2007-2013 setiap tahun mengalami fluktuatif. Akan tetapi pola APM dari ketiga kelompok usia sekolah tersebut menunjukkan kecenderungan bahwa, makin tinggi jenjang pendidikan makin rendah tingkat partisipasi penduduk di dalamnya. Dengan kata lain, tingkat partisipasi murni pada jenjang pendidikan SD lebih tinggi dibanding jenjang pendidikan di atasnya, SMP dan SMA. Hal ini bisa jadi disebabkan masih banyaknya lulusan SD dan SMP melanjutkan pendidikan keluar kabupaten Dharmasraya yang tidak terdata. Atau bisa jadi sebaliknya masih banyaknya penduduk tamat SMP/MTs yang tidak melanjutkan sekolah tetapi kurang terdata dengan baik.

Jika dibandingkan dengan 12 kota/kabupaten yang ada di provinsi Sumatera Barat, untuk angka partisipasi sekolah kabupaten Dharmasraya berada pada peringkat ke 3 untuk tingkat SD, peringkat 17 untuk tingkat SLTP, dan peringkat 16 untuk tingkat SLTA. Sedangkan untuk perbandingan APM antar kabupaten, kabupaten Dharmasraya untuk tingkat SD berada pada peringkat ke Enam Belas, peringkat ke Enam Belas untuk tingkat SMP dan peringkat ke dua belas untuk tingkat SMA.

5). Angka Partisipasi Murni perkecamatan

Bila dilihat APM di masing-masing kecamatan, untuk kelompok umur 7-12 hampir disemua daerah kecamatan sudah termasuk baik, dengan angka partisipasi lebih dari 100 persen. Berbeda halnya untuk kelompok umur 13-15, APM di masing-masing kecamatan cukup variatif. Masih terdapat daerah-daerah dengan APM rendah mencapai angka dibawah 50 persen. Daerah dengan partisipasi yang rendah adalah Asam Jujuhan yaitu 21,11 persen, Tiumang 28,22, dan Padang Laweh dengan tingkat partisipasi 30,66 persen. Sementara APM pada kelompok usia 16-18 memperlihatkan pola yang sangat berbeda, APM Tiumang, Padang Laweh dan Asam Jujuhan adalah nol persen. Hal ini terkait distribusi sekolah SMA/MA/SMK, untuk ketiga daerah ini belum lagi terdapat sekolah SMA dan sejenisnya. Kecamatan Tiumang dan Padang Laweh dengan kepadatan penduduknya di atas 80/100 m² barangkali perlu dipertimbangkan untuk pembangunan sekolah baru untuk level SMA.

Tabel 2.24. Perbandingan APM antar kecamatan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013

No	Kecamatan	Angka Partisipasi Murni		
		SD	SLTP	SLTA
1	Sungai Rumbai	125,35	66,24	80,56
2	Koto Baru	110,14	100,74	96,69
3	Sitiung	121,47	87,98	76,3
4	Pulau Punjung	118,05	85,64	67,92
5	IX Koto	144,52	53,48	31,41
6	Timpeh	125,46	71,57	34,46
7	Koto Salak	121,86	71,35	17,09
8	Tiumang	135,18	28,22	0
9	Padang Laweh	148,73	30,66	0
10	Asam Jujuhan	164,27	21,11	0
11	Koto Besar	117,16	66,05	11,1
Dharmasraya		123,2	73,74	52,66

Sumber : Profil Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014

b. Kesehatan

Harapan bangsa yaitu dapat mewujudkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang sehat jasmani dan rohani. Upaya peningkatan derajat kesehatan penduduk sangat penting dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan, agar seluruh penduduk dapat menikmati hidup sehat. Peningkatan derajat kesehatan harus didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai sehingga dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Derajat kesehatan yang lebih baik merupakan investasi modal manusia dalam meningkatkan produktivitas.

Selain itu, pembangunan di bidang kesehatan juga menekankan pentingnya peningkatan perilaku hidup sehat dan peran aktif masyarakat dalam memelihara dan melindungi kesehatan diri dan lingkungannya. Upaya kesehatan sedapat mungkin dilakukan sejak dini bahkan sejak masih dalam kandungan, karena masalah kesehatan dapat berpengaruh terhadap keturunan berikutnya. Berikut ini dipaparkan tentang berbagai indikator kesehatan yang terdapat di kabupaten Dharmasraya, baik terkait dengan sarana prasarana, maupun kualitas kesehatan masyarakat.

a) **Angka Kematian Bayi**

Angka kematian bayi di Indonesia menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dari 68 pada tahun 1991 menjadi 34 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2007, sehingga target sebesar 23 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun

2015 diperkirakan dapat tercapai. Demikian pula dengan target kematian anak diperkirakan akan dapat tercapai. Namun demikian, masih terjadi disparitas regional pencapaian target, yang mencerminkan adanya perbedaan akses atas pelayanan kesehatan, terutama di daerah-daerah miskin dan terpencil. Prioritas kedepan adalah memperkuat system kesehatan dan meningkatkan akses pada pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin dan daerah terpencil sebesar 23 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2015.

Tabel 2.25: Angka Kematian Bayi Kabupaten Dharmasraya Per 1000 KH

Tahun	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Target MDGs 2015
AKB	19	25	25	23	16	17	22	4	8	23 per 1000 Kelahiran hidup

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Prop. Sumbar 2013

Angka kematian bayi (AKB) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan derajat kesehatan suatu masyarakat, disamping AKI dan angka harapan hidup. Berdasarkan data AKB tahun 2005 sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat bahwa jumlah kematian bayi di daerah Dharmasraya mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2006 dan 2007 berada diatas angka target MDGs. Namun untuk tahun 2008 AKB Dharmasraya persis sama dengan target MDGs. Sedangkan pada tahun 2005, 2009, 2010 dan 2011 menunjukkan angka yang lebih rendah. Memasuki tahun 2012 AKB turun menjadi 4 per seribu kelahiran hidup dan tahun 2013 naik lagi menjadi 8 per seribu kelahiran hidup tetapi masih dibawah target MDGs.

Tabel 2.26: Angka Kematian Bayi Provinsi Sumatera Barat.

Kota		Lahir Hidup	AKB	Peringkat Kab & Kota	Peringkat Kabupaten
Kota					
1	Padang	15.444	4,21	6	
2	Solok	659	12,14	17	
3	Sawahlunto	1.073	11,18	16	
4	Padang Panjang	3.634	4,68	8	
5	Bukittinggi	1.973	0,00	1	
6	Payakumbuh	1.985	0,00	1	

Kota		Lahir Hidup	AKB	Peringkat Kab & Kota	Peringkat Kabupaten
7	Pariaman	1.122	5,35	11	
Kabupaten					
1	Kep.Mentawai	2.127	1,41	4	2
2	Pesisir Selatan	666	121,62	19	12
3	Solok	2.284	10,95	15	10
4	Sijunjung	3.539	9,61	14	9
5	Tanah Datar	5.290	4,73	9	5
6	Padang Pariaman	6.746	0,44	3	1
7	Agam	7.662	2,87	5	3
8	50 Kota	4.193	4,53	7	4
9	Pasaman	4.899	5,31	10	6
10	Solok Selatan	1.445	7,61	12	7
11	Dharmasraya	1.173	9,38	13	8
12	Pasaman Barat	3.693	12,73	18	11

b) Angka Kematian Ibu

Dari semua target MDGs, kinerja penurunan angka kematian ibu secara global masih rendah. Di Indonesia, angka kematian ibu melahirkan (MMR/Maternal Mortality Rate) menurun dari 390 pada tahun 1991 menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007. Target pencapaian MDG pada tahun 2015 adalah sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup, sehingga diperlukan kerja keras untuk mencapai target tersebut. Walaupun pelayanan antenatal dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan telah cukup tinggi, beberapa faktor seperti risiko tinggi pada saat kehamilan dan aborsi perlu mendapat perhatian.

Tabel 2.27: Angka Kematian Ibu Kabupaten Dharmasraya Per 100.000 KH

Tahun	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Target MDGs 2015
AKI	292	257	249	174	111	108	103	102 per 1000 LH

Angka kematian ibu (AKI) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan derajat kesehatan suatu masyarakat, disamping AKB dan

angka harapan hidup. Berdasarkan data AKI tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat bahwa jumlah kematian ibu di daerah Dharmasraya terus menunjukkan penurunan yang cukup signifikan pada setiap tahun, namun angka terakhir (2011) masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka target MDGs 2015.

Angka kematian ibu tahun 2007 hingga 2013 masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan target MDGs 2015 yaitu pada level 102 per 100.000 kelahiran hidup. Masih tingginya angka kematian bayi bisa terjadi karena jumlah anak yang besar, jarak kelahiran yang pendek maupun terkait dengan kurangnya pemahaman dan pengetahuan ibu tentang peningkatan gizi keluarga. Atau bisa terkait dengan masih rendahnya pendapatan masyarakat yang dapat mendukung upaya peningkatan gizi keluarga, terutama gizi ibu hamil.

Dengan demikian, sebagaimana disebutkan di atas program kebijakan penduduk perlu bertumpu pada upaya menurunkan angka fertilitas. Upaya menurunkan angka kematian ibu perlu didukung dengan meningkatkan angka pemakaian kontrasepsi dan menurunkan *unmet need* yang dilakukan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Ke depan, upaya peningkatan kesehatan ibu diprioritaskan pada perluasan pelayanan kesehatan berkualitas, pelayanan obstetrik yang komprehensif, peningkatan pelayanan keluarga berencana dan penyebaran komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat.

c) Angka Kematian Bayi dan Balita serta Gizi Buruk per Puskesmas

Angka kematian balita pada tahun 2013 per puskesmas tercatat 40 dari 3.761 kelahiran, untuk lebih jelasnya Angka Kelahiran Kabupaten Dharmasraya per Kecamatan dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2.28: Angka Kelahiran Kabupaten Dharmasraya per Puskesmas Tahun 2013

NO	KECAMATAN	NAMA PUSKESMAS	JUMLAH KELAHIRAN								
			LAKI-LAKI			PEREMPUAN			LAKI-LAKI + PEREMPUAN		
			HIDUP	MATI	HIDUP + MATI	HIDUP	MATI	HIDUP + MATI	HIDUP	MATI	HIDUP + MATI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	IX Koto	Puskesmas Silago	67	1	68	60	2	62	127	3	130
2	Pulau Punjung	Puskesmas Sialang	125	1	126	113	0	113	238	1	239
		Puskesmas Sungai Dareh	259	3	262	211	2	213	470	5	475
3	Sitiung	Puskesmas Gunung Medan	124	1	125	106	2	108	230	3	233
		Puskesmas Sitiung I	127	1	128	119	0	119	246	1	247
4	Timpeh	Puskesmas Timpeh	137	2	139	120	2	122	257	4	261
5	Koto Baru	Puskesmas Koto Baru	293	2	295	312	2	314	605	4	609
6	Koto Salak	Puskesmas Sitiung II	142	3	145	124	3	127	266	6	272
7	Koto Besar	Puskesmas Koto Besar	261	2	263	222	2	224	483	4	487
8	Sungai Rumbai	Puskesmas Sungai Rumbai	190	2	192	202	1	203	392	3	395
9	Padang Laweh	Puskesmas Padang Laweh	44	1	45	64	0	64	108	1	109
10	Asam Jujuhan	Puskesmas Sungai Limau	104	0	104	72	0	72	176	0	176
11	Tiumang	Puskesmas Tiumang	100	3	103	63	2	65	163	5	168
JUMLAH (KAB/KOTA)			1973	22	1995	1788	18	1806	3761	40	3801
ANGKA LAHIR MATI PER 1.000 KELAHIRAN				11,02757			9,96678			10,5235	

Sumber: Dinas Kesehatan 2014

Tabel 2.29 : Angka Kematian di Kabupaten Dharmasraya per Puskesmas Tahun 2013

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH LAHIR HIDUP	JUMLAH KEMATIAN IBU			
				< 20 Thn	20-34 Thn	≥35 Thn	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	IX Koto	Silago	88	0	0	0	0
2	Pulau Punjung	Sialang	182	0	0	0	0
		Sungai Dareh	405	0	1	2	3
3	Sitiung	Gunung Medan	178	0	0	0	0
		Sitiung I	216	0	0	0	0
4	Timpeh	Timpeh	204	0	0	1	1
5	Padang Laweh	Padang Laweh	79	0	0	0	0
6	Koto Baru	Koto Baru	582	0	0	1	1
7	Koto Salak	Sitiung II	241	0	0	0	0
8	Koto Besar	Koto Besar	412	0	1	0	1
9	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	298	0	0	0	0
10	Asam Jujuhan	Sungai Limau	142	0	0	1	1
11	Tiumang	-	0	0	0	0	0
JUMLAH (KAB/KOTA)			3027	0	2	5	7
ANGKA KEMATIAN IBU (DILAPORKAN)							231,25206

Sumber: Dinas Kesehatan 2014

Tabel 2.30: Jumlah Penderita Gizi Buruk per Puskesmas Tahun 2013

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	KASUS BALITA GIZI BURUK								
			JUMLAH DITEMUKAN			MENDAPAT PERAWATAN					
						L		P		L + P	
			L	P	L+P	S	%	S	%	S	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	IX Koto	Puskesmas Silago	1	2	3	1	100,0	2	100,0	3	100,0
2	Pulau Punjung	Puskesmas Sialang	3	1	4	3	100,0	1	100,0	4	100,0
3	Sitiung	Puskesmas Sungai Dareh	1	2	3	1	100,0	2	100,0	3	100,0
		Puskesmas Gunung Medan	2	-	2	2	100,0	-	0,0	2	100,0
4	Timpeh	Puskesmas Sitiung I	2	1	3	2	100,0	1	100,0	3	100,0
		Puskesmas Timpeh	2	3	5	2	100,0	3	100,0	5	100,0
5	Koto Baru	Puskesmas Koto Baru	2	5	7	2	100,0	5	100,0	7	100,0
6	Koto Salak	Puskesmas Sitiung II	5	5	10	5	100,0	5	100,0	10	100,0
7	Koto Besar	Puskesmas Koto Besar	4	3	7	4	100,0	3	100,0	7	100,0
8	Sungai Rumbai	Puskesmas Sungai Rumbai	3	2	5	3	100,0	2	100,0	5	100,0
9	Padang Laweh	Puskesmas Padang Laweh	-	-	-	-	0,0	-	0,0	-	0,0
10	Asam Jujuhan	Puskesmas Sungai Limau	2	2	4	2	100,0	2	100,0	4	100,0
11	Tiumang	Puskesmas Tiumang	-	-	-	-	0,0	-	0,0	-	0,0
JUMLAH (KAB/KOTA)			27	26	53	27	100,0	26	100,0	53	100,0

Sumber: Dinas Kesehatan 2014

Tabel 2.31 : Status Gizi Balita Menurut Jenis kelamin, Kecamatan, dan Puskesmas Kabupaten/Kota Dharmasraya Tahun 2013

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	BALITA																										
			BALITA DITIMBANG			GIZI LEBIH						GIZI BAIK						GIZI KURANG						GIZI BURUK					
						L		P		L+P		L		P		L+P		L		P		L+P		L		P		L+P	
			L	P	L+P	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Pulau Punjung	Dinas Kesehatan	1.500	1.431	2.981	42	2,71	39	2,73	81	2,72	1.280	82,58	1.182	82,60	2.462	82,59	177	11,42	163	11,39	340	11,41	51	3,29	47	3,28	98	3,29
JUMLAH (KAB/KOTA)			1.500	1.431	2.981	42	2,71	39	2,73	81	2,72	1.280	82,58	1.182	82,60	2.462	82,59	177	11,42	163	11,39	340	11,41	51	3,29	47	3,28	98	3,29

Sumber: Dinas Kesehatan 2014

Dari tabel diatas dapat dilihat Jumlah penderita gizi buruk tercatat perpuskesmas sebanyak 717 orang dan gizi kurang sebanyak 1.877 orang dari 15.469 yang ditimbang dan status gizi balita.

Tabel 2.32: Jumlah Peserta KB Baru dan KB Aktif Menurut Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten/Kota Dharmasraya Tahun 2013

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Pus*	Peserta KB Baru		Peserta KB Aktif	
				Jumlah	%	Jumlah	%
1	Pulau Punjung	Sungai Dareh	3.951	263	6,7	676	17,1

		Sialang	1.807	389	21,5	389	21,5
2	IX Koto	Silago	1.180	676	57,3	263	22,3
3	Timpeh	Timpeh	2.166	364	16,8	498	23,0
4	Sitiung	Sitiung I	2.060	48	2,3	48	2,3
		Gunung Medan	1.657	498	30,1	364	22,0
5	koto baru	Koto Baru	6.404	292	4,6	928	14,5
6	Padang laweh	Padang Laweh	864	928	107,4	292	33,8
7	Koto Salak	Sitiung II	2.423	46	1,9	46	1,9
8	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	2.903	126	4,3	749	25,8
9	Asam jujuhan	Sungai Limau	1.697	749	44,1	101	6,0
10	Koto besar	Koto Besar	3.679	101	2,7	126	3,4
Jumlah			30.791	4.480	14,5	4.480	14,5

Catatan: * PUS (Pasangan Usia Subur)

Adapun Peserta KB aktif di Kabupaten Dharmasraya tahun 2013 sebanyak 4.480 orang dari 15.469 orang pasangan usia subur (14,5%).

d) Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) yang menunjukkan usia rata-rata harapan hidup di Kabupaten Dharmasraya antara tahun 2007 - 2013 meningkat dari 65,3 tahun menjadi 66,0 tahun. Meskipun terdapat sedikit kenaikan tetapi masih dibawah AHH Sumbar pada tahun 2007 - 2013 yaitu tercatat 68,81 tahun dan 69,5 tahun

2.2.3. Fokus Seni Budaya

Kabupaten Dharmasraya memiliki jejak kekayaan budaya sejak abad ke 14. Dalam masa sekarang berkembang keragaman budaya terutama Minangkabau dan Jawa. Peninggalan budaya berupa bangunan seperti beberapa candi pada situs kawasan perkembangan kerajaan Dharmasraya dan empat rumah gadang kerajaan. Seni budaya yang menonjol yang telah berkembang seperti batik tanah liat. Selain itu masih hidup berbagai kesenian tradisional yang masih dipentaskan pada hari perayaan tertentu.

2.2.4. Fokus Kepemudaan dan Olahraga

Kepemudaan berkaitan dengan berbagai kegiatan yang bisa memenuhi kebutuhan pemuda seperti kegiatan organisasi kepemudaan dalam hal kepemimpinan,

kewirausahaan, dan ketrampilan. Selain itu terkait juga dengan berbagai upaya untuk mengatasi dampak negatif dari perilaku. Berbagai hal telah dilakukan untuk pengembangan kegiatan kepemudaan. Tetapi masih dibutuhkan berbagai kegiatan yang mendorong kemandirian dan ketrampilan usaha bagi pemuda.

Belum terdapat sarana olah raga tingkat kabupaten yang minimal memenuhi standar untuk melangsungkan kegiatan olahraga yang populer seperti sepak bola, basket atau voli sehingga bisa menampung event kejuaraan di Kabupaten Dharmasraya. Perkembangan prestasi olahraga anak-anak, remaja dan pemuda Dharmasraya terkendala dengan kurangnya sarana ini.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

a. Pendidikan

1. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) digunakan untuk mengukur jumlah siswa berdasarkan tingkatan usia yang masih bersekolah, capaian APS 7-12 tahun pada tahun 2011 menunjukkan angka melebihi 100. Ini menunjukkan bahwa jumlah siswa usia 7-12 tahun yang bersekolah di Dharmasraya melebihi jumlah penduduk usia 7-12 tahun, artinya terdapat siswa berusia 7-12 tahun yang bersekolah di Kabupaten Dharmasraya berasal dari luar daerah Kabupaten Dharmasraya

Tabel 2.33: Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013

NO.	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
1	APS 7-12 Tahun	98,68
	Jumlah siswa usia 7-12 Tahun	23.305
	Jumlah penduduk usia 7-12 Tahun	23.617
2	APS 13-15 Tahun	86,4
	Jumlah siswa usia 13-15 Tahun	8.904
	Jumlah penduduk usia 13-15 Tahun	10.306
3	APS 16-18 Tahun	59,91
	Jumlah siswa usia 16-18 Tahun	5.796
	Jumlah penduduk usia 16-18 Tahun	9.674

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya (SUSENAS) Tahun 2013

2. Rasio Murid Per Guru

Rasio murid per guru didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid dengan jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu. Rasio murid per guru dapat digunakan untuk mengetahui rata-rata jumlah guru yang dapat melayani murid di suatu sekolah atau daerah tertentu. Jika rasio tinggi, berarti satu orang tenaga pengajar harus melayani banyak murid. Banyaknya murid yang diajarkan akan mengurangi daya tangkap murid pada pelajaran yang diberikan atau mengurangi efektivitas pengajaran. Sebagaimana dinyatakan dalam indikator rasio murid per guru dapat ditunjukkan keefektifan seorang guru dibanding dengan jumlah siswa yang dilayani.

Sesuai dengan angka pada tabel 21 ditunjukkan berbagai indikasi pada setiap kecamatan sebagai berikut: (a) untuk tingkat SD dua rasio tertinggi adalah di Sungai Rumbai (18) dan Koto Besar (17). Sementara rasio terendah berada IX Koto (9), (b) untuk tingkat SMP rasio guru tertinggi berada di Sungai Rumbai (14) dan terendah di Tiumang (5), dan (c) untuk tingkat SMA/MA rasio guru tertinggi juga terdapat di Sungai Rumbai (10), dan untuk SMA terdapat kecamatan dengan rasio guru nol. Artinya pada daerah tersebut belum tersedia sekolah SMA dan sejenisnya.

Tabel 2.34: Rasio Murid Per Guru di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013

No	Kecamatan	Siswa Per Guru		
		SD+MI	SMP+MTs	SMA+SMK+MA
1	Sungai Rumbai	20	17	11
2	Koto Besar	20	11	5
3	Asam Jujuhan	16	12	-
4	Koto Baru	16	12	6
5	Koto Salak	17	11	-
6	Tiumang	9	8	-
7	Padang Laweh	16	10	-
8	Sitiung	16	11	8
9	Timpeh	11	7	7
10	Pulau Punjung	15	11	6
11	IX Koto	11	7	-
Dharmasraya		15	11	4

Sumber : BPS Kab. Dharmasraya (Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2014)

Dari penjelasan rasio guru per kecamatan di atas terlihat bahwa kecukupan guru untuk pendidikan dasar dan menengah secara relatif sudah memadai, walau ada indikasi bahwa di wilayah tertentu seorang guru hanya melayani sedikit siswa atau rata-rata kurang dari 10 orang. Angka ini menggambarkan kurang efisiennya praktek pembelajaran, karena guru “lebih banyak” dibanding dengan siswa yang harus dilayani. Sementara itu, ada beberapa daerah kecamatan di Dharmasraya belum tersedia sekolah untuk jenjang SMA/MA yaitu: IX Koto, Koto Salak, Tiumang, Padang Laweh dan Asam Jujuhan.

3. Rasio Kelas Per-Guru

Rasio Kelas per Guru didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah kelas dengan jumlah guru pada suatu jenjang pendidikan tertentu. Kegunaannya adalah untuk mengetahui kekurangan/kelebihan guru yang mengajar di kelas pada suatu daerah tertentu. Makin tinggi nilai rasio, berarti makin banyak pula jumlah kelas yang harus diisi pelajaran oleh guru dan ini berarti juga konsentrasi mengajar guru makin terpecah.

Tabel 2.35. Rasio Kelas Per Guru di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013

No.	Kecamatan	Rasio Kelas Per Guru		
		SD	SLTP	SLTA
1	Sungai Rumbai	0,65	0,52	0,35
2	Koto Besar	0,61	0,50	0,30
3	Asam Jujuhan	0,80	0,55	
4	Koto Baru	0,59	0,44	0,32
5	Koto Salak	0,57	0,37	0,33
6	Tiumang	0,56	0,57	
7	Padang Laweh	0,68	0,50	
8	Sitiung	0,68	0,31	0,47
9	Timpeh	0,65	0,30	0,16
10	Pulau Punjung	0,54	0,44	0,33
11	IX Koto	0,71	0,48	0,33
Dharmasraya		0,62	0,42	0,33

Sumber : BPS Kab. Dharmasraya (Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2014)

4. Rasio Guru per Sekolah

Rasio Tenaga pengajar per Sekolah didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah tenaga pengajar dibandingkan dengan jumlah sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu untuk mengetahui kekurangan/kelebihan tenaga pengajar yang mengajar di sekolah pada suatu daerah tertentu. Makin rendah nilai rasio, berarti makin terbatas juga jumlah tenaga pengajar yang mengajar di suatu sekolah tertentu.

Tabel 2.36. Rasio Guru Per Sekolah di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013

No.	Kecamatan	Rasio Guru Per Sekolah		
		SD	SLTP	SLTA
1	Sungai Rumbai	16,67	21,33	39,50
2	Koto Besar	12,76	17,75	22,00
3	Asam Jujuhan	12,25	10,00	-
4	Koto Baru	14,65	26,88	37,00
5	Koto Salak	12,38	24,50	-
6	Tiumang	11,31	17,50	-
7	Padang Laweh	13,75	13,00	-
8	Sitiung	11,80	21,29	25,00
9	Timpeh	12,17	17,20	20,50
10	Pulau Punjung	15,54	19,90	33,00
11	IX Koto	10,54	11,00	-
Dharmasraya		13,13	20,09	31,23

Sumber : BPS Kab. Dharmasraya (Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2014)

Di kabupaten Dharmasraya untuk tingkat SD, rata-rata rasio guru per sekolah adalah 13,13 dengan rasio terendah ada di Kecamatan IX Koto. Rata-rata dalam satu sekolah hanya terdapat 13 orang guru. Sedangkan rasio tertinggi terdapat pada Kecamatan Sungai Rumbai, dimana dalam satu sekolah rata-rata terdapat hampir 17 orang guru. Namun keadaan di atas berbeda dengan keadaan di SMP dimana rata-rata dalam satu sekolah terdapat 20 orang guru. Berbeda dengan keadaan di SMA, rata-rata dalam satu dekolah di kabupaten Dharmasraya terdapat 31 orang guru.

Berdasarkan sebaran data di atas dapat disimpulkan bahwa, pencapaian indikator sosial terkait dengan potensi pendidikan secara umum sudah termasuk tinggi, dan potensi tersebut perlu dipertahankan dengan selalu meningkat pembangunan dalam bidang pendidikan seperti memperhatikan pemerataan jumlah guru berdasarkan bidang studi yang ada, memberikan bantuan beasiswa bagi pelajar/mahasiswa pada kelas ekonomi rendah, beasiswa pengembangan bakat minat. Prioritas pembangunan pendidikan juga perlu diprioritas pada daerah-daerah dengan capaian potensi pendidikan agak teringgal dibanding daerah kecamatan lainnya di Dharmasraya, yaitu kecamatan IX Koto, Koto Salak, Tiumang, Padang Laweh dan Asam Jujuhan. Selain itu, agar orientasi pembangunan berjalan dengan baik perlu dilakukan pendataan indikator pendidikan termasuk enrollment ratio secara lebih baik dan terpercaya.

b. Kesehatan

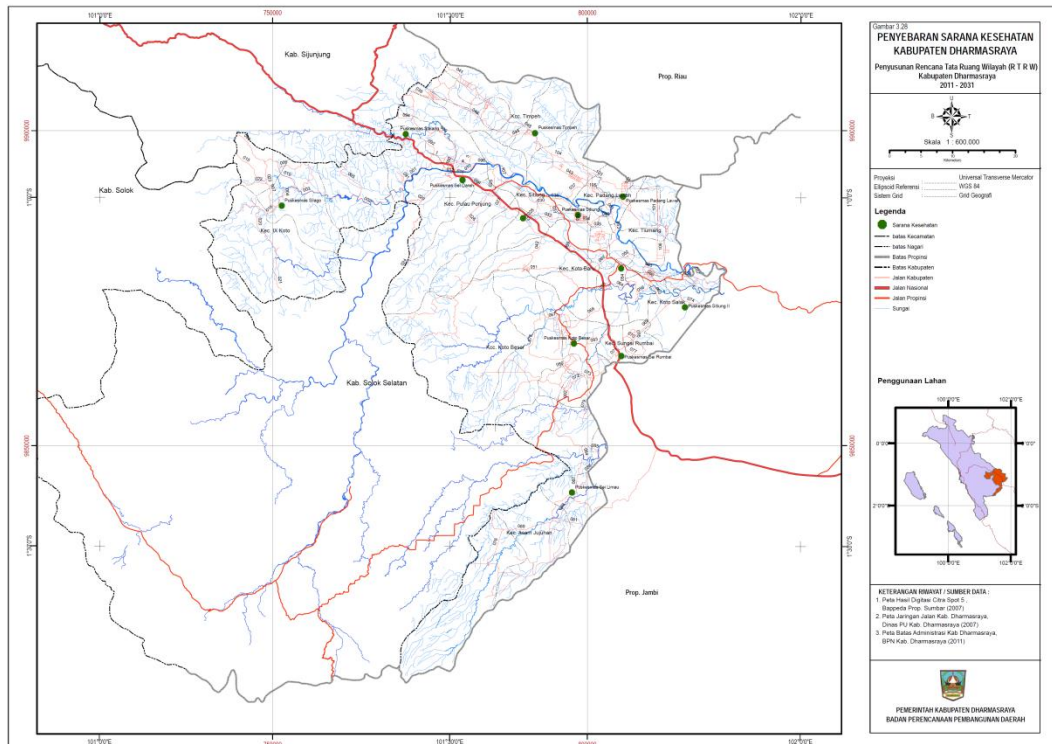
Sarana kesehatan yang ada meliputi RSUD, Puskesmas, Puskesmas Keliling, dan Puskesmas Pembantu. Saat ini terdapat 2 unit rumah sakit yaitu RSUD Sungai Dareh dan Rumah Sakit Rujukan yang saat ini masih dalam tahap pembangunan. Jumlah puskesmas yang tersedia adalah sebanyak 12 unit, setiap kecamatan rata-rata memiliki 1 puskesmas kecuali untuk kecamatan Pulau Punjung dan Sitiung masing-masing terdapat dua puskesmas. Sementara di kecamatan Tiumang tidak terdapat puskesmas yang dapat melayani penduduk.

Tabel2.37: Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013

No	Kecamatan	Sarana Kesehatan (unit)					
		RSU	Puskes-	Puskesmas	Puskesmas	Balai	Rumah
				Keliling	Pembantu	Pengobatan	Bersalin
1	Sungai Rumbai	-	1	2	4	1	1
2	Koto Besar	-	1	1	3		
3	Asam Jujuhan	-	1	1	2		
4	Koto Baru	-	1	1	11	1	1
5	Koto Salak	-	1	1	3		
6	Tiumang	-	-	-	-		
7	Padang Laweh	-	1	1	2		
8	Sitiung	-	2	2	4	1	
9	Timpeh	-	1	1	6	1	
10	Pulau Punjung	2	2	2	5	3	1
11	IX Koto	-	1	1	3		
Jumlah		2	12	14	44	7	4

Sumber : BPS Kab. Dharmasraya (Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2014)

Gambar 2.10 : Sebaran Sarana Kesehatan di Kabupaten Dharmasraya



Jumlah dokter spesialis di kabupaten Dharmasraya sebanyak 6 orang sudah secara standar minimal mencukupi jika dibandingkan dengan standar rasio dokter spesialis per penduduk berdasarkan peraturan menteri kesehatan 2010 yaitu 3 dokter per 100.000 penduduk. Selain itu jumlah dokter umum sebanyak 64 orang dengan rasio 31,9 dokter per 100.000 Untuk itu, dengan jumlah penduduk Dharmasraya 191.000 jiwa, masih perlu ditambahkan jumlah dokter umum agar kebutuhan dokter dapat tercukupi sesuai standar yang ditetapkan pemerintah yaitu 40 dokter per 100.000. Selanjutnya jumlah dokter gigi di Dharmasraya 21 orang dengan rasio sebesar 10,1 per 100.000 penduduk. Angka ini tidak jauh berbeda dengan angka standar yang ditetapkan pemerintah yaitu 11 orang per 100.000.

Tabel 2.38: Distribusi Tenaga Medis, Keperawatan dan Bidan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013.

No	Wilayah	Unit Kerja	Dokter			Perawat	Bidan
			Spesialis	Umum	Gigi		
1	Kab.Dharmasraya	Rumah Sakit	6	11	2	70	21
2	Kab.Dharmasraya	Dinas Kesehatan	0	1	1	14	5
3	Kec.IX Koto	Puskesmas Silago	0	5	1	14	26
4	Kec.Pulau Punjung	Puskesmas Sialang	0	2	1	12	21

No	Wilayah	Unit Kerja	Dokter			Pera wat	Bidan
			Spesialis	Umum	Gigi		
		Puskesmas S. Dareh	0	3	2	9	12
5	Kec.Sitiung	Puskesmas Gunung Medan	0	5	2	12	27
		Puskesmas Sitiung I	0	6	1	22	23
6	Kec.Timpeh	Puskesmas Timpeh	0	4	1	13	18
7	Kec.Padang Laweh	Puskesmas Padang Laweh	0	9	3	41	42
8	Kec.Koto Baru	Puskesmas Koto Baru	0	2	1	5	19
9	Kec.Koto Salak	Puskesmas Koto Salak	0	3	1	12	21
10	Kec.Koto Besar	Puskesmas Koto Besar	0	8	2	22	23
11	Kec.Sungai Rumbai	Puskesmas S.Rumbai	0	2	2	7	9
12	Kec.Asam Jujuhan	Puskesmas S. Limau	0	3	1	8	18
Total			6	64	21	300	278

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2013

Selanjutnya untuk tenaga keperawatan, rasio tenaga perawat yang tersedia sebanyak 131 per 100.000 penduduk, dimana standar kecukupan yang harus dicapai hanya 117,5 orang per 100.000. Dengan demikian, tidak perlu ada penambahan jumlah perawat. Demikian juga tenaga bidan, di Dharmasraya terdapat 142 bidan per 100.000 penduduk. Angka ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan angka kebutuhan bidan, yaitu 100 orang per 100.000 penduduk. Artinya jumlah bidan di Dharmasraya sudah lebih banyak dibanding dengan kebutuhan yang ada.

c. Pekerjaan Umum

1) Prasarana Air Minum

Proporsi pelayanan air minum BPAM Kabupaten Dharmasraya hanya 0,67% paling sedikit di Sumbar jauh dibawah rata-rata pelayanan 15,95%. Sementara sumber air minum kemasan isi ulang dilevel kabupaten tertinggi bersama Sijunjung dan Pasaman Barat. Terlihat bahwa pada sentra perkebunan kebutuhan air minum menjadi masalah daerah. Dari indikator lain, sumber air minum dengan pompa menjadi tertinggi di Sumbar (18,96%) sementara Sijunjung (1,78%) dan Pasaman

Barat (1,83%). Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan air minum di Kabupaten Dharmasraya masih jauh dibawah pelayanan penyediaan.

Berdasarkan data 2010, 53,52% RT telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, perkotaan dan perdesaan : 49,18% RT memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak perkotaan dan 55,75% RT memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak perdesaan.

BPAM (Badan Pengelolaan Air Minum) baru mampu melayani sebagian kecil masyarakat di Kabupaten Dharmasraya yaitu sebanyak 132 pelanggan. Saat ini Kabupaten Dharmasraya memiliki instalasi pengolahan air (WTP) sebanyak 5 Unit. Beberapa sumber air baku yang berpotensi untuk dikembangkan yaitu: Sungai Batang Siat; Sungai Batang Momong; Sungai Batang Pauh; Sungai Batang Siraho; Sungai Betung; dan Sungai Batang Timpeh.

2) Sanitasi Lingkungan

Berdasarkan Sensus Penduduk 2010 mayoritas rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya menggunakan WC sendiri sebagai fasilitas buang air besar/kecil yaitu sebesar 68%, sedangkan 10% RT memakai jamban bersama dan 2% RT yang menggunakan jamban umum, sementara 20% sisanya masih belum memiliki jamban sendiri. bahwa hanya 57,42% rumah tangga yang memiliki septic tank (SPAL), sedangkan sisanya memanfaatkan sungai ataupun tempat lain sebagai saluran akhir pembuangan air limbahnya. 42,58% rumah tangga (19.769 Rumah Tangga) belum memiliki sistem pembuangan air limbah yang layak.

Status capaian kinerja pelayanan air minum dan sanitasi Kabupaten Dharmasraya dengan menggunakan indikator target 7C pada tahun 2010 berdasarkan jumlah Rumah Tangga (RT) adalah sebagai berikut:

1. 53,52% RT telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, perkotaan dan perdesaan :
 - a. 49,18% RT memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak perkotaan;
 - b. 55,75% RT memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak perdesaan.
2. 44,21% RT memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan:
 - a. 21,76% RT memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak perkotaan;
 - b. 57,31% RT memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak perdesaan.

Meskipun SPAL tinja mencapai 57,42% (tertinggi kedua di kabupaten setelah Agam) tetapi proporsi pembuangan lubang tanah 20,27% tertinggi di Sumbar (Susenas, 2010). Sementara Sarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) belum tersedia.

Meskipun Kabupaten Dharmasraya sudah memiliki TPA, tetapi dalam belum bisa dioperasikan secara maksimal, karena keterbatasan dan masih kurangnya sarana dan prasarana pengolahan sampah di TPA seperti : Belum memadainya jumlah tempat pembuangan sementara (TPS) kontainer, gerobak, kendaraan pengangkut sampah, dump truck dan Belum tersedianya alat-alat berat yang dibutuhkan (seperti Buldozer, loader), dan jembatan timbang

3) Prasarana Transportasi

Sejak pemekaran tahun 2004 sampai tahun 2011 telah terjadi pembangunan akses yang cukup berarti. Panjang jalan aspal kabupaten tahun 2011 yaitu 432,75 km atau telah bertambah 133,70 km (43,26%) sejak tahun 2004. Akan tetapi masih perlu dilakukan terus pembangunan dan peningkatan jaringan jalan.

Untuk mengantisipasi perkembangan wilayah dimasa depan beberapa akses utama yang telah direncanakan dikembangkan yaitu (RTRW Kabupaten Dharmasraya 2011-2031):

- Pengembangan ruas jalan lingkaran utara dengan tiga titik keluar menuju kawasan timur Pulau Sumatera. Ruas jalan yang dikembangkan sebagai akses regional menuju koridor timur Pulau Sumatera tersebut yaitu ruas jalan yang menghubungkan Sungai Rumbai – Ampalu – Sungai Langkok - Padang Laweh – Timpeh - Kamang Baru.
- Pengembangan ruas jalan lingkaran selatan dengan fungsi lokal primer yang menghubungkan: Sungai Rumbai – Koto Besar - Bukit Gadiang – Aur Jaya - Bukit Mindawa) – Sungai Dareh.
- Pengembangan ruas jalan lingkaran Sungai Batanghari dengan membangun jalan sisi Sungai Batanghari sebagai akses menuju rencana kawasan strategis kawasan agroindustri terpadu dan kawasan bersejarah Siguntur sekaligus meningkatkan akses menuju kawasan perkotaan Pulau Punjung menghubungkan: Kampung Surau – Lubuk Bulang - Siluluak- Sungai Langsek – Pulau Tengah Sitiung - Pulau- Bukit Tujuh.
- Pengembangan ruas jalan dengan kabupaten berbatasan yang menghubungkan Kabupaten Dharmasraya dengan kabupaten berbatasan diarah barat yaitu dengan Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Kerinci serta pengembangan akses diarah utara dengan Kabupaten Sijunjung.
- Pengembangan ruas jalan menuju pusat-pusat kegiatan kabupaten untuk memudahkan akses menuju pusat kegiatan pelayanan kabupaten, pusat pelayanan kawasan dan pusat pelayanan lingkungan.

Sementara sarana terminal yang dibangun sesuai standar fisik fungsi terminal belum tersedia di Kabupaten Dharmasraya.

4) Prasarana Sumberdaya Air

Sumberdaya air untuk keperluan pengairan lahan sawah di Kabupaten Dharmasraya cukup besar. Kapasitas irigasi Batanghari mencapai luas pengairan 18.936 Ha dengan debit 25 m³/dt dan termanfaatkan lebih kurang 11 m³.



Selain itu terdapat DI yang dikelola kabupaten pada lahan lebih kurang 3.500 Ha yang memerlukan peningkatan pengairan. Irigasi teknis di Kabupaten Dharmasraya seluas 8.077 Ha (90,11%), sementara irigasi sederhana hanya 8,84% dan tandah hujan seluas 1,05%.

Luas sawah berdasarkan tipe pengairan seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.39: Tipe Pengairan di Kabupaten Dharmasraya

No	Tipe Pengairan	Total Luas	
		Ha	%
1	Teknis	8077	90,11%
2	Sederhana	94	1,05%
3	Tadah hujan	792	8,84%
	Luas Total	8.963	100,00%

Sumber: Kabupaten dalam Angka Tahun 2014

Pengembangan sawah irigasi dalam D.I. Batanghari telah direncanakan dalam jangka menengah seluas 1.715 Ha dan masih terdapat potensi ekstensifikasi lahan selanjutnya dalam jangka panjang seluas 3.276 Ha.

5) Prasarana Kawasan Permukiman dan Perumahan

Kantong-kantong kawasan kumuh atau tidak layak huni yaitu kawasan permukiman dan perumahan yang tidak dilengkapi dengan infrastruktur lingkungan memadai terdapat pada kawasan permukiman padat yang dihuni penduduk berpenghasilan rendah terutama di Sungai Rumbai, Koto Baru dan Pulau Punjung.

d. Penataan Ruang

Penataan ruang merupakan upaya merencanakan, memanfaatkan dan pengendalian tata ruang. Aspek pengendalian tata ruang yang terdiri atas perijinan, pengawasan dan sanksi merupakan aspek penting dalam kegiatan pembangunan di Kabupaten Dharmasraya. Kecenderungan alih fungsi lahan sawah dan kawasan hutan serta pengendalian kegiatan pertambangan liar terjadi di Kabupaten Dharmasraya.

e. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan dilakukan bertahap mulai dari Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten, penyusunan RKPD dan terakhir berupa penganggaran kegiatan dalam APBD. Perencanaan pembangunan seringkali memiliki kendala dalam menyaring dan menentukan prioritas kegiatan pembangunan sesuai dana yang tersedia sehingga transparansi kegiatan yang dianggarkan dari semua usulan sulit dilakukan. Kendala penentuan prioritas

kegiatan juga disebabkan format usulan kurang menggambarkan urgensi dan dampak dari usulan kegiatan. Hal ini disebabkan kurang tersedianya data dan informasi yang terstruktur, lengkap dan akurat ditingkat nagari sebagai dasar perencanaan.

f. Lingkungan Hidup

Perkembangan kegiatan pertambangan menjadi penyebab utama pencemaran air sungai. Baku mutu air raksa terdeteksi telah dilewati terutama oleh sungai Muaro Pangian dan Sungai Batanghari bagian hulu, dan pada jumlah yang tidak terlalu signifikan pada sungai Batang Abai Siat, Batang Betung, Batang Siat Hilir, Batang Timpeh, dan Muaro Batang Momongan.

g. Pertanian

Berdasarkan status lahan, kepemilikan atau penguasaan lahan di Kabupaten Dharmasraya beragam dan menyangkut area yang luas. Di Kabupaten Dharmasraya terdapat kawasan pertambangan, kawasan perkebunan besar, kawasan hutan, kawasan transmigrasi, dan lahan yang dimiliki pemerintah untuk pengembangan fasilitas. Aspek pertanian dalam pengertian luas terkait dengan informasi status lahan oleh berbagai instansi yang berwenang mengeluarkan perijinan. Untuk itu dibutuhkan administrasi pertanian yang andal dengan sistem informasi pertanian yang mampu mengkoordinasikan data pertanian lintas instansi yang mengurus aspek status lahan. Dengan sistem informasi yang baik dapat dicegah tumpang tindih status lahan dan konflik pertanian dapat diidentifikasi dari awal. Sertifikasi lahan sebagai program nasional yang menjamin kepastian terhadap lahan masih perlu ditingkatkan pencapaiannya.

h. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera, Sosial

Angka fertilitas perempuan usia subur di Kabupaten Dharmasraya tinggi. Sementara ketimpangan gender terlihat dari indikator berikut:

- Angka partisipasi sekolah penduduk laki-laki lebih besar dibanding penduduk perempuan.
- sementara angka mengulang dan angka putus sekolah tingkat SD dan SMP anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan. Untuk tingkat SMA angka tersebut relatif sama.

i. Ketenagakerjaan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang paling menentukan dalam proses pembangunan di suatu wilayah. Semakin besar jumlah tenaga kerja, lebih-lebih apabila disertai dengan keahlian yang cukup memadai, akan semakin pesat pula perkembangan pembangunan di wilayah tersebut.

Perekonomian di Kabupaten Dharmasraya masih didominasi oleh sektor pertanian, maka penyerapan tenaga kerja terbesar juga berada di sektor ini. Tabel dibawah ini

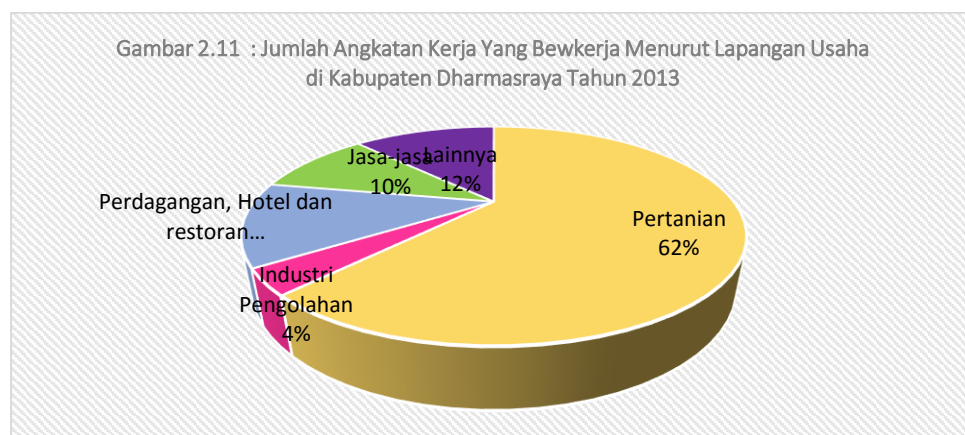
menjelaskan perkembangan penyerapan tenaga kerja menurut lapangan usaha di Kabupaten Dharmasraya. Dari Tahun 2011 sampai tahun 2013, angka daya serap tenaga kerja di Kabupaten Dharmasraya menunjukkan angka yang sangat bagus artinya tingkat pengangguran di Kabupaten Dharmasraya sangat rendah. Pada tahun 2013 rasio penyerapan angkatan kerja sebesar 94,86% artinya hanya 5,14% angkatan kerja di Kabupaten Dharmasraya yang menganggur, lebih tinggi dibandingkan dengan rasio penyerapan tenaga kerja Sumatera Barat yang hanya 92,98%.

Tabel 2.40: Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Dharmasraya

Lapangan Usaha	Jumlah Angkatan Kerja Yang Bekerja		
	2011	2012	2013
Pertanian	50,015	57.491	57.105
Industri Pengolahan	3,105	2.151	3.365
Perdagangan, Hotel dan restoran	12,822	11.224	11.418
Jasa-jasa	10,239	11.009	9.098
Lainnya	5,447	8.495	11.258
Total	84,777	90.370	92.244
Jumlah Angkatan Kerja	90,816	96.355	97.243
Daya Serap Tenaga Kerja (%)	93.35	93,79	94,86
Daya Serap Tenaga Kerja Sumatera Barat (%)	93,55	93,30	92,98

Sumber: Sumbang Dalam Angka dan DDA berbagai tahun edisi

Apabila diperhatikan gambar dibawah ini, maka pada tahun 2013 sebagian besar tenaga kerja yang ada di Kabupaten Dharmasraya masih bekerja di lapangan usaha pertanian yaitu sebanyak 62%. Hal ini terkait dengan realita yang ada di Kabupaten Dharmasraya bahwa memang sektor pertanian khususnya tanaman perkebunan mendominasi perekonomian.



i. Penanaman Modal

Investasi (pembentukan modal tetap bruto) Kabupaten Dharmasraya dalam kurun waktu setelah pemekaran wilayah yaitu tahun 2004 sampai 2013 meningkat dari 193,20 Milyar menjadi 1.053,59 Milyar atau meningkat 445%. Rata-rata laju pertumbuhan investasi yaitu 49,48%/tahun. Jumlah investasi ini yang ditanamkan ini cukup tinggi.

Kecenderungan investasi yang terjadi dilakukan oleh institusi rumah tangga dan BUMD/N Swasta dengan proporsi yang berimbang 45,38% dan 42,22%. Sementara investasi dilakukan oleh pemerintah hanya 12,40%. Hal ini memperlihatkan bahwa peran masyarakat dan swasta sangat besar.

Koefisien ICOR yang tinggi, nilai tambah dari investasi yang masih rendah dan sinergi antara perusahaan besar dengan pemerintah daerah menjadi hal yang perlu menjadi perhatian dalam penanaman modal. Pengembangan investasi perlu difokuskan pada investasi yang memberikan nilai tambah besar dengan nilai koefisien ICOR terkecil seperti pertambangan, pertanian dan jasa, Pembuatan pabrik pengolahan yang dikelola oleh pemerintah atau kemitraan masyarakat, pemerintah dan swasta perlu dilakukan. Penguasaan yang besar terhadap sektor hilir (pabrik pengolahan) berpotensi menimbulkan konflik harga dan pemasaran dan pada akhirnya nilai tambah dari investasi yang ditanamkan tidak dinikmati masyarakat secara penuh. Selain itu perlu merangsang tumbuh kembangnya usaha ekonomi rakyat berskala kecil terkait dengan meningkatkan nilai tambah hasil produksi pertanian.

j. Kebudayaan

Upaya dibidang kebudayaan terkait dengan pelestarian dan pengembangan kawasan cagar budayapada situs bekas kerajaan Dharmasraya dan site empat bangunan rumah gadang kerajaan yang tersebar di Kabupaten Dharmasraya. Selain itu upaya pengembangan atraksi seni budaya yang menonjol dan pengembangan produk unggulan seperti batik tanah liat yang menjadi ciri khas daerah yang selama ini telah dilakukan menjadi fokus pengembangan dimasa depan.

k. Kepemudaan Dan Olah Raga

Berbagai kegiatan yang mendorong kemandirian pemuda perlu terus ditingkatkan berupa kegiatan kewirausahaan dan ketrampilan. Meskipun tingkat pengangguran di Kabupaten Dharmasraya rendah tetapi upaya pengembangan berbagai usaha ekonomi selain disektor perkebunan bagi mengembangkan berbagai lapangan kerja bagi pemuda diluar sektor perkebunan perlu terus ditingkatkan. Demikian juga kegiatan pengembangan organisasi kepemudaan sebagai wadah pengembangan

kreatifitas pemuda akan berdampak untuk menumbuhkan sikap dan perilaku positif bagi pemuda.

Sarana olah raga dan rekreasi adalah sarana pelayanan masyarakat yang penting untuk disediakan. Saat ini di Kabupaten Dharmasraya sedang dibangun stadion olah raga (sport center) berskala Kabupaten yang berfungsi untuk menampung kegiatan olah raga maupun kegiatan publik lainnya. Dalam pengembangan keolahragaan selain sarana juga dibutuhkan pengembangan berbagai kegiatan dan pembinaan olahraga berprestasi untuk pelajar, remaja, dan pemuda.

l. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Nagari sebagai unit terendah dalam pengelolaan pembangunan telah memiliki kelengkapan organisasi sebagai unit pengelolaan masyarakat. Selain walinagari terdapat LPM, BAMUS, PAN, dan KAN. Nagari sebagai unit pemerintahan dan sosial ekonomi terendah dalam tahun belakangan ini telah mendapatkan berbagai bantuan program seperti PNPM, kredit mikro nagari, kredit usaha agro pertanian, kredit usaha ekonomi, unit simpan pinjam dan lainnya. Pada tahun belakangan ini terdapat kecenderungan peningkatan peran nagari dari unit administratif menjadi unit sosial ekonomi untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

a. Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Luas lahan sawah eksisting di Kabupaten Dharmasraya yaitu 9.278 Ha yang terdapat di D.I. Batanghari seluas 5.782 Ha dan D.I. yang dikelola kabupaten seluas 3.496 Ha. Kapasitas irigasi Batanghari mencapai luas pengairan 18.936 Ha dengan debit 25 m³/dt. Pengembangan sawah irigasi dalam D.I. Batanghari telah direncanakan dalam jangka menengah seluas 1.715 Ha dan masih terdapat potensi ekstensifikasi lahan selanjutnya dalam jangka panjang seluas 3.276 Ha. Dimasa depan masih dimungkinkan ekstensifikasi lahan pertanian tanaman pangan lahan basah di Kabupaten Dharmasraya seluas 4.991 Ha.

Tanaman pangan lain seperti jagung, ubi kayu, kacang-kacangan. Budidaya pertanian tanaman pangan lahan kering berkembang di Kec. IX Koto, Kec. Pulau Punjung, Kec. Koto Besar, Kec. Sitiung, Koto Baru, dan Koto Salak.

Pertanian hortikultura (buah-buahan, sayur-sayuran) di Kabupaten Dharmasraya merupakan kegiatan yang belum memiliki peran besar dalam pertanian seperti perkebunan. Tetapi terdapat komoditi lokal seperti manggis, duku atau durian, yang berpeluang untuk dikembangkan.

b. Perkebunan



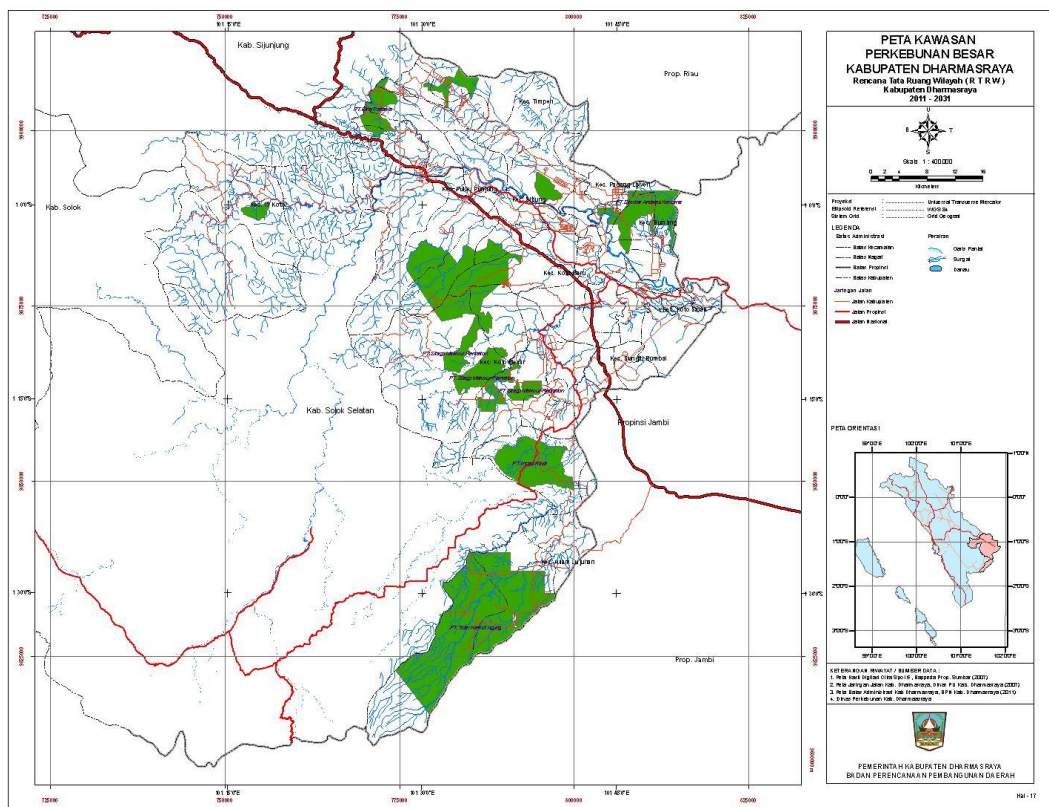
Kabupaten Dharmasraya tercatat sebagai daerah potensi terbesar di Sumbar untuk tanaman sawit yaitu 60,36% dari luas lahan sawit di Sumbar dan karet urutan kedua terbesar yaitu 16,02% dari luas

lahan karet di Sumbar (Sumber: Sumbar Dalam Angka Tahun 2014).

Luas lahan kelapa sawit perkebunan besar 60.374 Ha. Luas kebun kelapa sawit rakyat 29.708 Ha yang terdiri dari kebun produktif 26.381 Ha dan belum produktif 3.327 Ha.

Di Kabupaten Dharmasraya terdapat enam industri CPO yang menampung TBS inti dan plasma serta swakarya, yakni PT. Tidar Kerinci Agung (TKA), PT. Sumber Andalas Kencana (SAK), PT. Incasi Raya, PT. Bina Pratama dan PT Silago Makmur Platation, PT. Dharmasraya Lestarindo dengan total kapasitas produksi 290 ton TBS/jam. Luas lahan karet perkebunan rakyat 38.359 Ha yang terdiri dari kebun produktif 29.501 Ha; belum produktif 6.871 Ha; dan tidak produktif 2.180 Ha. Produksi utama perkebunan lainnya di Kabupaten Dharmasraya yaitu kopi dengan luas lahan 461 Ha dan kakao seluas 1.395 Ha.

Gambar 2.12 : Kawasan Perkebunan Besar di Kabupaten Dharmasraya



c. Perikanan



Perkembangan sektor perikanan sampai saat ini cukup besar dalam segi produksi maupun penyerapan tenaga kerja. Produksi perikanan budidaya tercatat 11.350,95 ton pada lahan

budidaya seluas 138,27 Ha yang terdiri atas kolam air tenang dan deras 137,70 Ha dan jaring apung 0,57 Ha. Sementara produksi ikan perairan umum yaitu seluas 158 ha 559,20 ton yang berada di sungai. Tenaga kerja yang terlibat: jumlah petani perikanan sebanyak 801 orang yang terdiri dari petani penuh 146 orang; petanisambilan utama 183 orang dan petani sambilan tambahan sebanyak 150 orang.

Perkembangan sektor perikanan di Kabupaten Dharmasraya didukung oleh infrastruktur: 2 unit Balai Benih Ikan (BBI) yang terdapat di Pulau Punjung dan Koto Baru; 11 unit pembenihan rakyat; 5 unit depo; dan 10 unit kolam percontohan. Produksi BBI Kabupaten Dharmasraya kelima terbesar di Sumbar setelah Agam, Pasaman Barat, Tanah Datar dan Kabupaten Pasaman yaitu 4,82%.

Kontribusi perikanan darat budidaya Kabupaten Dharmasraya di Sumbar hanya 5,37%. Besar produksi perikanan urutan delapan dari kabupaten di Sumbar diatas Kabupaten Solok Selatan, dan Pasaman barat. Produksi terbesar di Sumbar yaitu Kabupaten Pasaman sebesar 3.978 ton (Sumbar Dalam Angka 2014).

d. Peternakan



Populasi hewan ternak di Kabupaten Dharmasraya tercatat pada tahun 2013 yaitu: sapi 26.759 ekor; kambing 15.620 ekor; kerbau 3.476 ekor; ayam ras 588.633 ekor; dan itik 17.875 ekor. Populasi hewan ternak selama 10 tahun terakhir tidak mengalami perubahan signifikan. Khusus sapi potong, jumlah sapi di Kabupaten Dharmasraya 7,88% dari populasi

Sumbar. Dengan rumah tangga pemelihara sapi 7.969 maka rata-rata kepemilikan sapi adalah 3,2 ekor per rumah tangga. Penjualan sapi potong hampir seluruhnya didalam kabupaten sendiri (sumber: PSPK Tahun 2013).

e. Kehutanan

Kawasan hutan di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan SK MenHut 304 Tahun 2011 seluas 87.174 Ha (28,91% dari luas kabupaten). Dari seluruh kawasan hutan tersebut, kawasan hutan berfungsi lindung yaitu hutan lindung dan hutan suaka alam/pelestarian alam seluas 17.368 Ha (5,74% dari luas kabupaten).

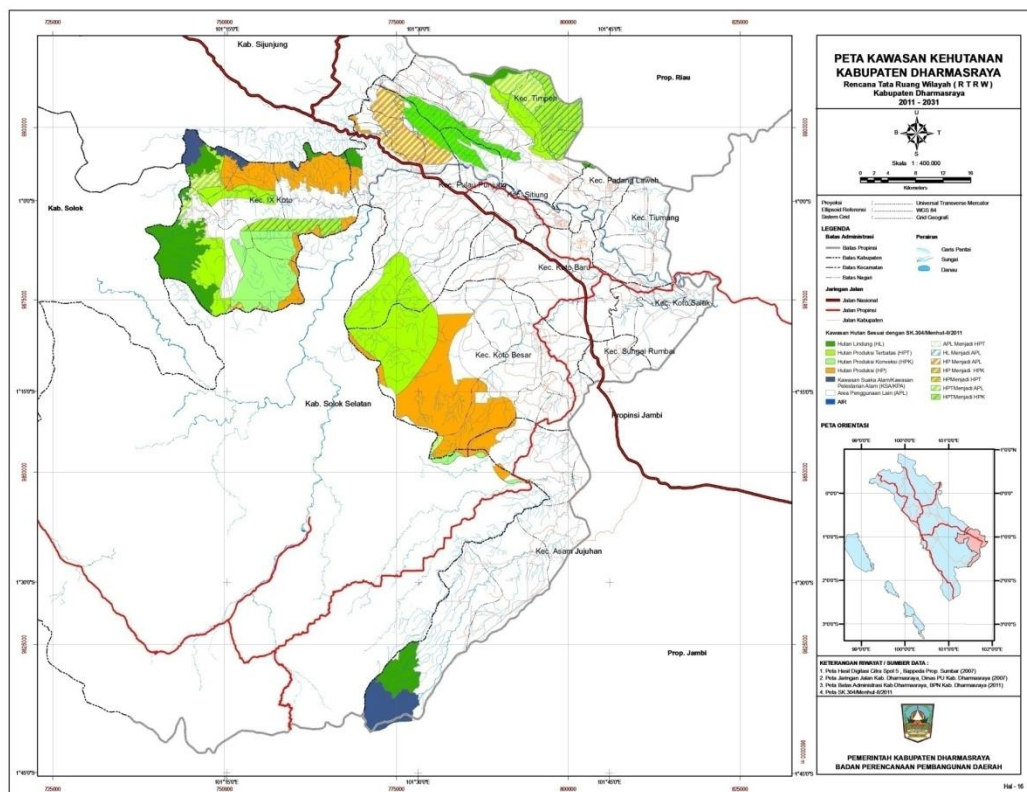
Sementara itu dilihat dari tutupan vegetasi, luas tutupan hutan dengan vegetasi primer di Kabupaten Dharmasraya tercatat tinggal seluas 7.290 Ha. Tetapi dari data ekritisasi lahan di Kabupaten Dharmasraya tidak terlalu besar. Lahan dengan kondisi kritis dan sangat kritis di Kabupaten Dharmasraya seluas 5.961 Ha (atau 1,98% dari luas wilayah). Lokasi lahan kritis pada kawasan perbukitan terdapat di Kecamatan Pulau Punjung, Silago, dan Koto Besar.

Tabel 2.41: Luas Lahan Kritis di Kabupaten Dharmasraya

No	Lahan Kritis	Luas	
		(Ha)	(%)
1	Tidak Kritis	22.6401	74,82
2	Potensial Kritis	51.129	16,90
3	Agak Kritis	17.301	5,72
4	Kritis	4.062	1,34
5	Sangat Kritis	1.897	0,63
6	Tubuh Air	1.809	0,60
Luas Total		302.599	100,00

Sumber : Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTK-RHL) SWP DAS Batanghari (BPDAS Batanghari Jambi)

Gambar 2.13 : Peta Kawasan Hutan di Kabupaten Dharmasraya



f. Energi Dan Sumberdaya Mineral

Bahan galian yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya terdiri dari batu bara, bitumen padat, emas sekunder, bijih besi, perak, batu gamping, pasir kuarsa, batu gunung, tanah urug, tanah liat, sirtukul, mangan, dan suseki. Sumberdaya tambang yang akan atau sudah mulai dieksploitasi dalam jumlah besar adalah:

- Batu Bara yang sudah dieksploitasi di Kecamatan Asam Jujuhan (PT. TBN, PT. SLN, KUD Sinamar Sakato dan PT CBI) dengan produksi pertahun lebih kurang sebesar 449.780,25 MT.
- Batu Bara yang sudah dieksploitasi di Kecamatan Padang Laweh oleh PT PBA.
- Batu Bara dalam tahap eksplorasi yaitu di Kecamatan Asam Jujuhan oleh CV. X Dareh, PT BSA dan PT IMR, di Kecamatan Padang Laweh yaitu PT PBM dan PT IMR, dan di Kecamatan Timpeh oleh PT DAA.
- Bijih Besi yang sudah dieksploitasi di Kecamatan Asam Jujuhan oleh PT TSS.
- Mangan, masih dalam Proses Perijinan (Kec. Timpeh)
- Bitumen padat, masih dalam Proses Perijinan (Kec. Padang Laweh)

Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah dikeluarkan di Kabupaten Dharmasraya seluas 19.975 Ha yang terdiri atas IUP operasi produksi seluas 2.388 Ha dan IUP eksplorasi seluas 17.587 Ha. Selain itu masih terdapat potensi lahan tambang terukur lainnya diluar WIUP yang telah dikeluarkan seluas 3.330 Ha. Total kawasan sumber daya pertambangan yang teridentifikasi di Kabupaten Dharmasraya yaitu 23.305 Ha.

Luas peruntukan pertambangan dalam pola ruang Kabupaten Dharmasraya selain yang telah definitif seluas 2.388 Ha masih bisa bertambah didalam kawasan IUP eksplorasi dan lahan potensi pertambangan lainnya diluar WIUP dalam kawasan seluas 20.917 Ha.

Saat ini terdapat sebanyak 12 perusahaan yang memiliki izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara Dan Mineral Logam, 10 perusahaan tambang yang aktif dan 2 perusahaan yang tidak aktif (PT. TBN Muaro dan PT. Centra Bara Indonesia). Selain perusahaan tambang batu bara juga terdapat IUP batuan sebanyak 9 perusahaan.

Kawasan IUP terdapat di Kec. Asam Jujuhan, Padang Laweh, Kec. Koto Besar, Kec. Tiumang, Kec. Timpeh, IX Koto, Kec. Pulau Punjung, Kec. Sitiung, dan Kec. Koto Salak dengan potensi tambang dominan yaitu batu bara dan biji besi. Kawasan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Dharmasraya seperti terlihat dalam tabel.

Tabel 2.42: Kawasan Alokasi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan Sumberdaya Pertambangan Lainnya diluar Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) di Kabupaten Dharmasraya Per Kecamatan

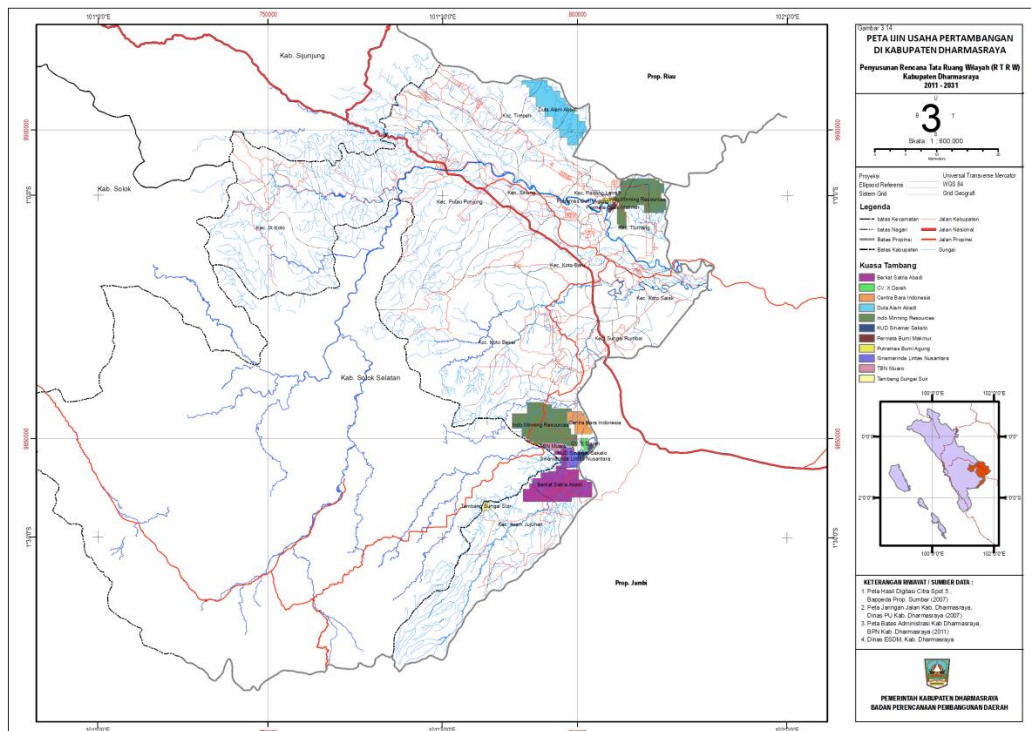
No	Kecamatan	Luas (Ha)
	IUP Batubara dan mineral logam	
1	Asam Jujuhan	11.990
2	Padang Laweh	499

No	Kecamatan	Luas (Ha)
3	Tiumang	3.176
4	Timpeh	4.290
	Luas Total	19.955
IUP Batuan		
1	IX Koto	2
2	Pulau Punjung	3,96
3	Sitiung	10,41
4	Koto Salak	4,53
	Luas Total	20,90
Sumberdaya Pertambangan Terukur Lainnya diluar WIUP		
1	Asam Jujuhan	500
2	Padang Laweh	450
3	Timpeh	500
4	IX Koto	125
5	Koto Besar	200
6	Sitiung	310
7	Pulau Punjung	495
8	Koto Baru	250
9	Tiumang	500
	Luas Total	3.330

Sumber : Dinas Energi, Sumberdaya Mineral Kab. Dharmasraya Tahun 2013

Selain itu terdapat potensi pertambangan rakyat untuk bahan tambang seperti mangan, lempung, batu gamping. Eksploitasi pertambangan rakyat harus terkendali dalam kawasan yang ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Gambar 2.14 : Peta Area Ijin Usaha Pertambangan di Kabupaten Dharmasraya



g. Pariwisata,



Objek wisata alam di Kabupaten Dharmasraya yang berpotensi untuk dikembangkan yaitu: Bendungan Batang Siat di Kec. Koto Besar; Air Terjun Sungai Suyiu di Kec. Asam Jujuhan; Telaga Baranang Siang Tarantang, Pulau Cinta Pulau Mainan Danau Cinta di Kec. Koto Baru;

Pantai Guli-gulu Koto Baringin di Kec. Tiumang; Bumi Perkemahan Siguntur, Puncak Gunung Medan di Kec. Sitiung; Gua Gadang Bunga Tika Timpeh, Air Terjun Tujuh Tingkat Tabek, Puncak Timpeh, Air Terjun Sei Pinang, di Kec. Timpeh; Air Terjun Timbulun Indah, Bendungan Btg. Mimpi Sei Dareh, Bendungan Batu Bakawik, Air Panas Sungai Belit, Gua Cigak Kampung Surau di Kec. Pulau Punjung; Air Terjun Koto Silago di Kec. IX Koto; dan Selaju Sampan Pulai di Kec. Sitiung.

Objek situs cagar budaya Kerajaan Lama Dharmasraya yaitu:

- a). Kawasan Siguntur di Kec. Sitiung dengan objek situs: Candi Padang Roco, Situs Candi Pulau Sawah dan Situs Candi Bukik Awang Maombiak, Mesjid Tua Siguntur, Rumah Gadang Kerajaan Siguntur, Makam Raja Siguntur, Situs Candi Rambahan, dan Pasengrahan. Untuk mendukung pengembangan kawasan, dibutuhkan pengembangan akses menuju kawasan dari arah barat kawasan perkotaan Pulau Punjung dan dari arah timur Sitiung dengan mengembangkan jalan dari Pulau Punjung menghubungkan sepanjang sisi Sungai Batanghari menuju kawasan cagar budaya terhubung dengan jalan lingkaran utara serta pembukaan akses jembatan wisata yang menghubungkan Sikabau dengan kawasan cagar budaya.
- b). Kawasan Koto Besar di Kec. Koto Besar dengan objek situs: Rumah Kerajaan Koto Besar, Makam Raja Koto Besar, Makam Syech Abdul Rahman Alif Ba, Makam Rajo Kuek Kuaso
- c). Kawasan Padang Laweh di Kec. Padang Laweh dengan objek situs: Rumah Kerajaan Padang Laweh, Rumah Kerajaan Tiang Panjang, dan Rumah Gadang Puti Bulian
- d). Situs budaya di Kec. Pulau Punjung: Rumah Gadang Rajo Pulau Punjung dan Makam Datuak Gadang Sikabau

h. Perdagangan

Sarana perdagangan pasar di Kabupaten Dharmasraya sebanyak 4 unit merupakan pasar kelas I yaitu Pasar Pulau Punjung, Pasar Sikabau, pasar Koto Baru dan Pasar Sungai Rumbai. Sarana komersial berupa pasar dan pertokoan mempunyai kecenderungan untuk berkembang di Kabupaten Dharmasraya (Pasar Sungai Rumbai, Pasar Pulau Punjung, Pasar Koto Baru, Pasar Blok B Sitiung). Sarana seperti perbelanjaan modern, perbankan, perbengkelan dan onderdil membutuhkan lahan untuk pengembangan karena permintaan yang semakin tinggi akibat peningkatan pendapatan masyarakat.

Sementara itu untuk menunjang kegiatan pasar diperlukan terminal. Sarana terminal pada Kabupaten Dharmasraya saat ini masih kurang. Dengan

meningkatnya aktivitas pelayanan armada yang ada di Kabupaten Dharmasraya terutama pada kota-kota yang berada di sepanjang Jalan Lintas Sumatera, dimana kegiatan pelayanan sudah relatif lebih intensif dan padat, sehingga keberadaan terminal di Kabupaten Dharmasraya yang representatif sangat dibutuhkan.

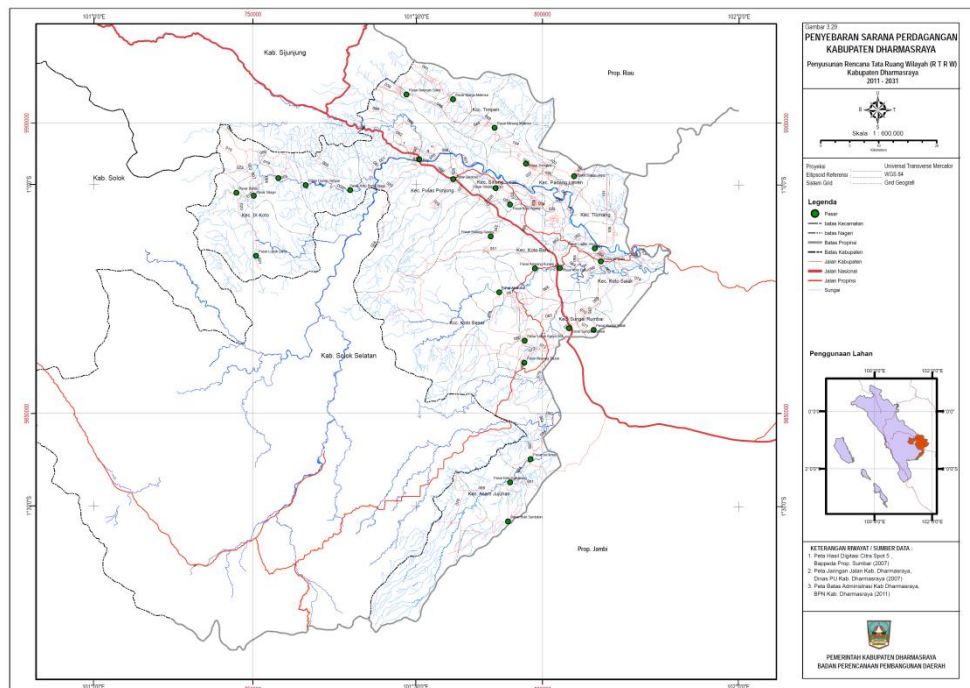
Tabel2.43 : Pasar Menurut Lokasi dan Jumlah di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013

No	Kecamatan	Jumlah	Nama Pasar	Kelas	Nagari	Status
1	Sungai Rumbai	2	Pasar Sungai Rumbai	I	Sungai Rumbai	Nagari
			Pasar Kurnia Koto Salak	II	Kurnia Solok	Nagari
2	Koto Besar	3	Pasar Abai Siat	III	Abai Siat	Nagari
			Pasar Mayang Taurai	III	Koto Gadang	Nagari
			Pasar Lubuk Karya Sit . 4	III	Koto Tinggi	Nagari
3	Asam Juruhan	3	Pasar Sei Limau	III	Sungai Limau	Nagari
			Pasar Batu Kangkung	III		Nagari
			Pasar Bulit Sembilan	III	Alahan Nan tigo	Nagari
4	Koto Baru	3	Pasar Koto Baru	I	Koto Baru	Nagari
			Pasar Sialang Gaung	II	Sialang Gaung	Nagari
			Pasar Ampang Kuranji	III	Ampang Kuranji	Nagari
5	Koto Salak	1	Pasar Ampalu	III	Ampalu	Nagari
6	Tiumang	1	Pasar Lagan Jaya	III	Sungai Langkok	Nagari
7	Padang Laweh	1	Pasar Sopan Jaya	III	Sopan Jaya	Nagari
8	Sitiung	2	Pasar Sitiung	II	Sitiung	Nagari
			Pasar Koto Agung	II	Sitiung	Nagari
9	Timpeh	4	Pasar Minang Makmur	III	Tabek	Nagari
			Pasar Marga Makmur	III	Taratak Tinggi	Nagari
			Pasar Trimulya	III	Penyeberangan	Nagari

No	Kecamatan	Jumlah	Nama Pasar	Kelas	Nagari	Status
			Pasar Beringin Sakti	III	Taratak Tinggi	Nagari
10	Pulau Punjung	2	Pasar Pulau Punjung	I	Pulau Punjung	Nagari
			Pasar Sikabau	I	Sikabau	Serikat
11	IX Koto	6	Pasar Silago	III	Silago	Nagari
			Pasar Lubuk Labu	III		Nagari
			Pasar Banai	III	Banai	Nagari
			Pasar Ampang Kuranji	III	Silago	Nagari
			Pasar Durian Simpai	III	Koto IV di Bauo (bawah)	Nagari
			Pasar Koto Baru Silago	III	Koto IV Bauo	Nagari

Sumber : Dinas Koperindag Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013

Gambar 2.15 : Sebaran Pasar di Kabupaten Dharmasraya



i. Industri

Dari data PDRB 2009-2013, kontribusi sektor industri mengalami penurunan dari 6,65% menjadi 6,37% dalam PDRB Kabupaten Dharmasraya. Pada tahun 2013, jumlah unit usaha mikro 2.066 unit dengan menyerap tenaga kerja 3.646 orang, unit

usaha kecil 351 unit menyerap tenaga kerja 1.181 orang dan usaha menengah 3 unit dengan menyerap tenaga kerja 24 orang.

j. Ketrasmigrasian

Program transmigrasi di Kabupaten Dharmasraya telah dimulai sejak tahun 1965 dan telah dimukimkan sebanyak 12.779 Kepala Keluarga atau 56.079 jiwa. Dalam masa yang panjang tersebut telah terjalin integrasi sosial antara pendatang dan penduduk asli dalam kesatuan daerah Dharmasraya. Lahan yang masih dicadangkan untuk kawasan transmigrasi terdapat di Kecamatan IX Koto.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

1) Kemandirian Fiskal Daerah

Salah satu indikator kemandirian ekonomi suatu daerah dapat diperlihatkan dengan menghitung seberapa besar kemampuan keuangan daerah membiayai pengeluarannya. Semakin besar kemampuan keuangan daerah membiayai pengeluarannya maka semakin mandiri daerah tersebut. Istilah yang biasa dipakai untuk menjelaskan kemandirian keuangan daerah adalah Derajat Otonomi Fiskal daerah (DOFD). Tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat yang lebih dikenal dengan derajat otonomi fiskal daerah, menjelaskan mengenai kemampuan suatu daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintah dan pembangunan berdasarkan Pendapatan Asli Daerah. Adapun tolak ukur untuk mengetahui DOFD adalah: 0% - 10% dinilai sangat kurang; 10% - 20% dinilai kurang; 20% - 30% dinilai sedang; 30% - 40% dinilai cukup; 40% - 50% dinilai baik; 50% keatas dinilai sangat baik.

Tabel 2.44: Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Dharmasraya

Tahun	PAD	Pengeluaran	DOFD
2009	25,120,058,434	441,100,108,648	5,69
2010	25,541,706,459	453,188,540,605	5,64
2011	34,423,462,235	478,220,636,368	7,20
2012	32.902.332.259	401.465.522.438	8,20
2013	41.103.986.748	425.599.433.890	9,66
Rata-rata			7,28

Sumber : LKPD Kabupaten Dharmasraya

Tabel diatas memperlihatkan bahwa kemandirian fiskal Kabupaten Dharmasraya relatif sangat kurang. Dimana secara rata-rata dari tahun 2009-2013 hanya 7,24% artinya pendapatan asli daerah hanya bisa membiayai 7,24% total pengeluaran yang dilakukan. Tetapi kecenderungan pertumbuhannya menunjukkan kecenderungan yang positif yaitu sebesar 6,05% per tahun.

Bila dibandingkan dengan daerah lain diantara kabupaten di Sumatera Barat, maka kemandirian fiskal Kabupaten Dharmasraya diatas rata-rata yaitu dibawah Kabupaten Tanah Datar dan Kepulauan Mentawai yang sudah menunjukkan angka antara 10% dan 20 % atau masuk dalam kategori kurang seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel2.45:Derajat Otonomi Fiskal Daerah Di Sumatera Barat Tahun 2013

Kab/Kota	DOFD	Kategori
Kab. Agam	5.15	Sangat kurang
Kab. Kepulauan Mentawai	13.61	Kurang
Kab. Padang Pariaman	3.91	Sangat kurang
Kab. Pasaman	5.78	Sangat kurang
Kab. Pesisir Selatan	4.24	Sangat kurang
Kab. Sijunjung	7.18	Sangat kurang
Kab. Solok	5.34	Sangat kurang
Kab. Tanah Datar	10.42	Kurang
Kab. Pasaman Barat	6.32	Sangat kurang
Kab. Dharmasraya	7.28	Sangat kurang
Kota Bukit Tinggi	12.57	Kurang
Kota Padang	13.91	Kurang
Kota Sawahlunto	10.58	Kurang
Kota Solok	9.34	Sangat kurang
Kota Pariaman		Sangat kurang

Sumber: Realisasi APBD, Departemen Keuangan 2013

2) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran guna menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat perekonomian penduduk. Menurut Ernest Engel bila persentase makanan terhadap total pengeluaran lebih dari 80 persen maka tingkat kesejahteraan sangat rendah. Secara umum baik tahun 2009 maupun tahun 2013 tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Dharmasraya relatif lebih baik, dimana persentase makanan terhadap total pengeluaran tahun 2009 sebesar 53,11 persen dan tahun 2013 sebesar 51,88 persen.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), pengeluaran total rata-rata per kapita di Kabupaten Dharmasraya tahun 2009 sebesar 553.677 rupiah dan tahun 2013 sebesar 703.146 rupiah. Pengeluaran untuk bahan-bahan makanan rata-rata menurun kecuali untuk padi-padian, namun untuk pengeluaran tembakau/sirih/rokok meningkat. Biaya pendidikan dan biaya kesehatan juga mengalami peningkatan dari tahun 2009 ke 2013.

Tabel 2.46: Pengeluaran Rata-rata pekapita Perbulan Menurut Kelompok Barang

Tahun	Makanan		Non Makanan		Total
	Jumlah	%	Jumlah	%	
2009	319.361	57.68	234.316	42.32	519,552
2013	336.737	47.89	366.409	52.11	838,559

Sumber: BPS, 2014

3. Infrastruktur

Peran infrastruktur jalan dan irigasi sangat penting untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan dan peningkatan jalan mengalami penambahan yang cukup berarti selama tahun 2009-2013 tetapi meskipun demikian dimasa depan masih dibutuhkan pengembangan akses untuk menghubungkan Kabupaten Dharmasraya dengan wilayah sekitar dan secara internal menghubungkan kawasan produksi pertanian dengan tempat pemasaran atau pengolahan serta menghubungkan kawasan permukiman dengan pusat pelayanan. Sementara sarana pengairan irigasi kabupaten masih perlu dibangun untuk mendukung produktifitas padi sawah.

Infrastruktur air bersih dan sanitasi lingkungan di Kabupaten Dharmasraya masih sangat terbatas. Diperlukan upaya yang cukup besar untuk mengejar ketertinggalan dalam penyediaannya.

4. Iklim Berinvestasi

Iklim investasi yang baik akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, yakni melalui investasi yang didukung oleh produktivitas yang tinggi. Investasi akan memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan mendatangkan lebih banyak input ke dalam proses produksi. Oleh karenanya, memperbaiki iklim investasi merupakan suatu tugas yang penting bagi setiap pemerintah, Tetapi keterbatasan pemda dalam melakukan pembiayaan pembangunan perekonomian daerah, sering dijadikan alasan mengeluarkan kebijakan yang justru kontraproduktif terhadap penciptaan iklim investasi yang kondusif dalam menciptakan daya saing investasi daerah.

Iklim investasi biasanya sangat dipengaruhi beberapa faktor yaitu faktor kelembagaan, faktor keamanan, politik dan sosial budaya, faktor ekonomi daerah, faktor tenaga kerja dan faktor infrastruktur fisik.

Faktor kelembagaan terkait dengan kepastian hukum, aparatur dan pelayanan, kebijakan daerah dan kepemimpinan adat. Terkait dengan hal tersebut maka sangatlah penting bagi daerah untuk menciptakan iklim investasi yang sehat yang terkait dengan faktor kelembagaan, diantaranya dalam bentuk pemberlakuan peraturan-peraturan daerah yang berpihak kepada dunia usaha.

Kabupaten Dharmasraya sendiri sejak tahun 2009 sudah mempunyai aturan yang baku terkait dengan perizinan khususnya yang menyangkut standar pelayanan minimum dalam pengurusan berbagai perizinan dengan dibukanya Kantor Pelayanan Satu Pintu yang melayani pengurusan berbagai jenis perijinan dengan standar tarif dan jangka waktu pengurusan tertentu sesuai dengan Perda yang dibuat untuk itu.

Faktor keamanan, politik dan sosial budaya, yang kondusif akan menimbulkan perasaan aman bagi investor dalam berinvestasi. Dengan menggunakan proksi banyaknya peristiwa Kamtibmas dan Pelanggaran seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini, maka dapat disimpulkan bahwa situasi keamanan di Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2009 ke tahun 2013 secara keseluruhan menunjukkan trend yang negatif atau semakin sedikitnya terjadi peristiwa yang terkait dengan Kamtibmas dan pelanggaran.

Tabel 2.47: Banyaknya Peristiwa Kamtibmas dan Pelanggaran

Tahun	Jumlah	Perubahan
2009	151	
2010	127	-15,89
2011	167	-15,89
2012	237	31,50
2013	292	41,92
Rata-rata perubahan		24,15

Sumber: DDA, 2014

Faktor selanjutnya adalah faktor yang terkait dengan potensi-potensi ekonomi yang merupakan keunggulan daya saing investasi daerah dan menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan investasinya. Seperti kita ketahui, Kabupaten Dharmasraya adalah kabupaten yang unggul di produk-produk perkebunan, Kabupaten Dharmasraya berkembang sebagai salah satu penghasil kelapa sawit atau buah pasir menurut istilah setempat. Disamping itu, kabupaten ini juga merupakan produsen berbagai jenis tanaman keras lainnya, seperti kulit manis, karet, kelapa, gambir, kopi, coklat, cengkeh dan pinang. Lahan perkebunan di sana lebih didominasi karet dan sawit. Penghasil kelapa sawit paling banyak di kabupaten ini adalah Kecamatan Sungai Rumbai.

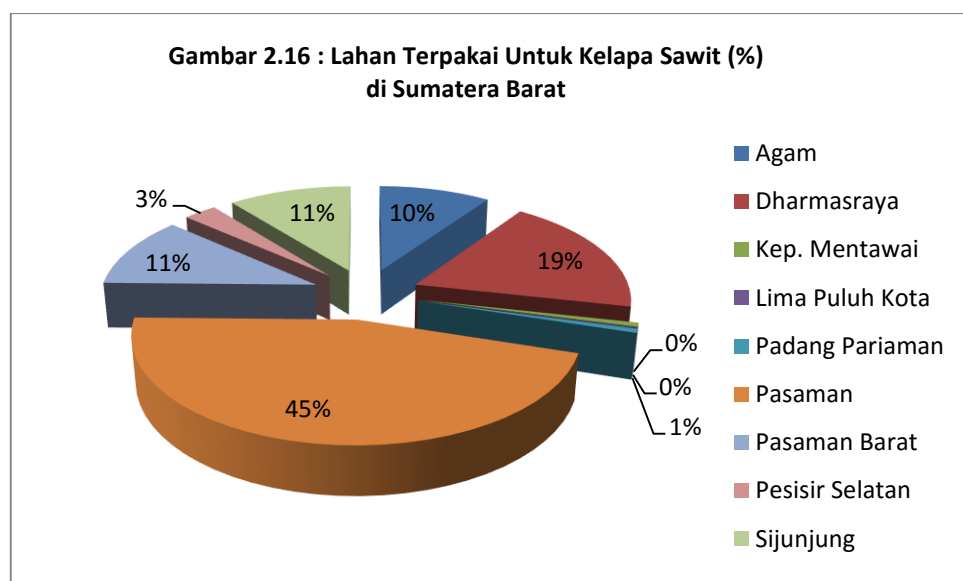
Apabila dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Sumatera Barat, maka dapat dilihat bahwa Kabupaten Dharmasraya merupakan Kabupaten yang memiliki lahan kelapa sawit kedua terbesar diantara semua kabupaten di Sumatera Barat setelah Pasaman Barat. Bahkan untuk tanaman Karet, Kabupaten Dharmasraya merupakan

kabupaten yang mempunyai jumlah lahan terbesar diantara kabupaten-kabupaten yang ada di Sumatera Barat yaitu 31,23% dari total lahan karet yang ada seperti yang ditunjukkan tabel di bawah ini. Disamping itu terkait dengan Masterplan Percepatan dan perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) koridor Sumatera, dimana arah kegiatan ekonomi utama pengembangan koridor yaitu kelapa sawit, karet, batu bara dan besi baja.

Tabel 2.48 : Wilayah Potensi Pengembangan Komoditi Kelapa Sawit dan Karet Di Sumatera Barat Tahun 2013

Kabupaten	Lahan Terpakai (Ha)			
	Kelapa Sawit	%	Karet	%
Agam	31,571	9.64	719	0.58
Dharmasraya	61,690	18.83	38,824	31.23
Kep. Mentawai	2,010	0.61	32	0.03
Lima Puluh Kota	373	0.11	9,221	7.42
Padang Pariaman	2,075	0.63	2,767	2.23
Pasaman	148,972	45.47	19,046	15.32
Pasaman Barat	36,541	11.15	5,446	4.38
Pesisir Selatan	9,403	2.87	6,602	5.31
Sijunjung	34,972	10.67	27,252	21.92
Solok	-	-	1,646	1.32
Solok Selatan	-	-	9,452	7.60
Tanah Datar	-	-	3,295	2.65
TOTAL	327,607	100.00	124,302	100.00

Sumber: Sumatera barat Dalam Angka Tahun 2014



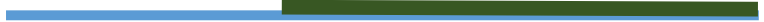
5. Sumberdaya Manusia

Pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Dharmasraya dilihat berdasarkan indikator tingkat pendidikan, usia harapan hidup, dan pengeluaran perkapita masih perlu mendapatkan perhatian untuk ditingkatkan. Perhatian perlu diberikan pada tingkat partisipasi sekolah terutama untuk pendidikan Sekolah Menengah Atas yang terkait dengan aspek fisik akses sarana sekolah. Usia harapan hidup dan pengeluaran perkapita terkait dengan pengembangan aspek ekonomi masyarakat.

Kesehatan Masyarakat sebagai dasar terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas juga masih perlu ditingkatkan terutama terkait dengan angka kematian ibu (AKI) yang masih diatas target MDGs 2015. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka kematian Neonatal (AKN) meskipun sedikit dibawah target MDGs tetapi masih perlu ditingkatkan. Demikian juga balita dengan gizi kurang dan buruk yang masih ditemukan 0,25% dari 20.874 balita yang ditimbang pada tahun 2013 perlu menjadi perhatian untuk peningkatan sumberdaya manusia kedepan karena target standar MDGs prevalensi balita kekurangan gizi MDGs kurang dari 15,5%.

RPJPD KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2005-2025

BAB III
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS



BAB III

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas pemerintahan daerah dan masyarakat dimasa datang. Suatu isu strategis apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan organisasi/institusi dimasa yang akan datang.

Langkah dalam analisis isu-isu strategis adalah: pertama merumuskan kerangka pembangunan dalam jangka panjang sehingga tergambar aspek-aspek penting dalam merumuskan perencanaan dalam jangka panjang, kedua, mengidentifikasi permasalahan, potensi, kebutuhan, dan peluang pembangunan yang diamati dari kondisi daerah dan selanjutnya ketiga, mengidentifikasi kesesuaiannya dengan isu-isu strategis dalam wilayah yang lebih luas (regional, nasional, dan internasional).



Daerah yang memiliki berbagai potensi kekayaan sumberdaya alam tetapi dalam beberapa aspek pembangunan masih perlu mengejar ketertinggalan dari daerah lain serta membangun kemandirian membutuhkan upaya percepatan pembangunan. Berbagai sumberdaya daerah (alam, lingkungan, manusia, sosial, budaya, prasarana, tata kelola pembangunan) yang dibutuhkan dalam pembangunan perlu dikerahkan agar dapat secara sinergis memacu pertumbuhan ekonomi, membangun kesejahteraan masyarakat, pemerataan pertumbuhan antar kawasan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan.

3.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

3.1.1 Perumusan Permasalahan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Untuk mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan daerah dan bagaimana visi/misi daerah dibuat dengan sebaik-baiknya, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan sehubungan dengan peluang dan tantangan yang dihadapi.

Permasalahan pembangunan dapat dilihat sebagai: (1) kesenjangan antara kondisi perkembangan yang telah terjadi selama ini dengan kondisi seharusnya, dan (2) kesenjangan antara kondisi yang terjadi selama ini dengan gambaran kondisi dimasa depan. Permasalahan pembangunan bersifat retrospektif dan prospektif. Dalam dimensi retrospektif, masalah pembangunan adalah masalah masa sekarang yang perlu diatasi. Dalam dimensi prospektif masalah pembangunan muncul dari penerawangan (*conjecture*) terhadap berbagai peluang atau kemungkinan kejadian di masa depan yang bisa diraih dan perlu diantisipasi.

Dengan demikian permasalahan pembangunan dapat dilihat sebagai permasalahan yang dihadapi dimasa sekarang serta potensi, kebutuhan, dan peluang pembangunan dimasa depan.

Permasalahan masa sekarang adalah berbagai kekurangan yang perlu diatasi. Potensi adalah berbagai sumberdaya yang bisa didayagunakan dengan optimal. Kebutuhan adalah berbagai hal yang perlu dipenuhi sebagai konsekuensi mengatasi masalah atau mengembangkan potensi. Peluang adalah situasi eksternal yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi atau mengatasi masalah.

Kabupaten Dharmasraya sebagai kabupaten yang belum lama berkembang sebagai hasil pemekaran wilayah memiliki potensi sumber daya alam yang besar dengan latar belakang identitas sejarah dan budaya beragam. Tetapi dalam pembangunan kedepan masih perlu didukung oleh pengembangan sumberdaya alam bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan, sumberdaya manusia yang berkualitas, sumber daya infrastruktur fisik yang memadai, dan penyelenggaraan pemerintahan dengan dukungan perangkat manajemen dan teknologi informasi yang andal.

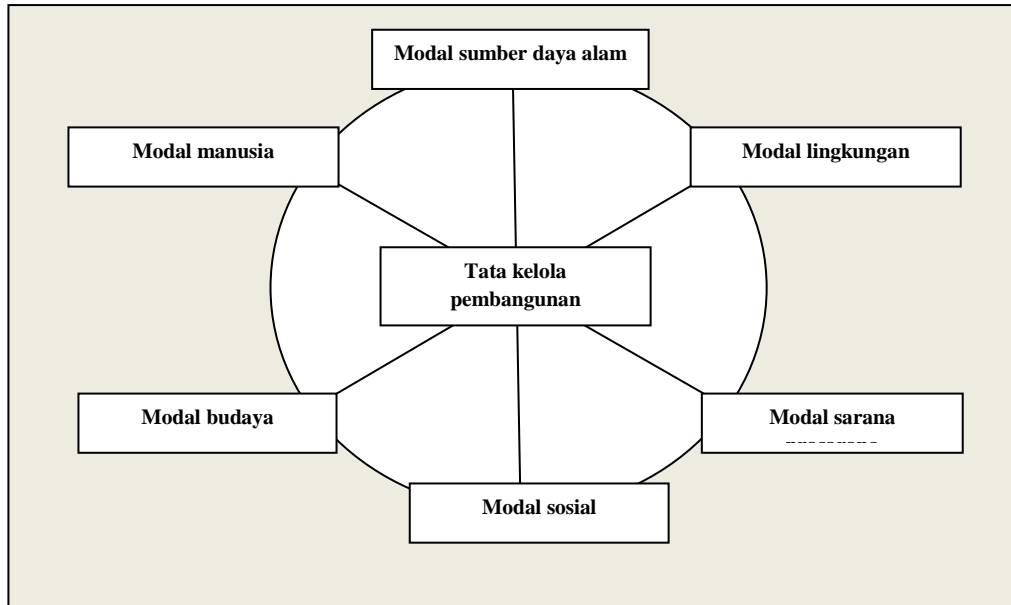
Untuk itu pembangunan dapat dilihat dalam kerangka pengelolaan sumberdaya. Pembangunan dalam pendekatan ini merupakan upaya pemeliharaan, pemupukan dan pengembangan berbagai modal daerah melalui perantara berbagai institusi yang bisa mengambil peran dalam pembangunan (*assets-based development*). Berbagai modal daerah tersebut yaitu modal manusia, modal sosial, modal budaya, modal sumber daya alam, modal lingkungan, dan modal sarana prasarana wilayah yang didukung oleh tata kelola pembangunan.

- a. **Modal manusia** dalam pembangunan yaitu kemampuan penduduk dan kualitas kehidupannya. Untuk mengembangkan modal manusia dibutuhkan pemenuhan kebutuhan dasarpendidikan, kesehatan dan permukiman yang layak. Tersedianya lapangan kerja yang layak dapat dilihat sebagai dasar pembentukan dan pengembangan modal manusia.

- b. **Modal alam** berupa kekayaan sumberdaya alam (*resource endowment*) berupa mineral, sumber energi terbarukan, keragaman hayati, tanah yang subur dan luas, dan ketersediaan sumber daya air yang dapat dimanfaatkan sebagai modal pembangunan daerah. Modal alam untuk dapat menjamin keberlangsungan pembangunan dalam jangka panjang harus dimanfaatkan atau dieksploitasi secara berkelanjutan, berkeadilan dan memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya sehingga memberi manfaat yang besar bagi penduduk dan daerah. Keunggulan Lokasional termasuk juga sebagai modal alam yang bisa dimanfaatkan. Posisi dalam konstelasi regional tertentu dapat menjadi peluang untuk mengembangkan kegiatan ekonomi yang mengambil manfaat dari nilai lokasi.
- c. **Modal sosial** terdiri atas berbagai organisasi yang berkembang di masyarakat berupa: organisasi budaya (kelembagaan adat dan keagamaan); organisasi yang bersifat ekonomi (seperti kelompok tani dan koperasi); dan organisasi sosial (seperti karang taruna, perkumpulan olahraga, kelompok pengajian dan lain-lainnya). Berbagai organisasi ini merupakan aset untuk menjalankan berbagai kegiatan yang bersifat sosial budaya dan kegiatan ekonomi berbasis sosial.
- d. **Modal budaya** terdiri atas nilai budaya dan agama yang bersifat intangible sebagai norma kehidupan bersamadan peninggalan sejarah fisik dan tradisi seni budaya sebagai modal identitas budaya yang bersifat tangible. Keberlanjutan nilai budaya dan adaptasinya sesuai perkembangan zaman, menegakkan semangat dan nilai agama serta pelestarian situs budaya beserta seni budaya menjadi dasar nilai dan identitas untuk membangun daerah.
- e. **Modal lingkungan** yaitu berkaitan dengan kualitas lingkungan untuk mendukung kehidupan. Terjaganya kualitas air sungai, kelestarian hutan, dan kualitas kesuburan lahan dan ancaman lahan dari longsor/erosi akan menjamin keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang.
- f. **Modal sarana prasarana wilayah** yaitu berkaitan dengan ketersediaan prasarana dan sarana fisik pendukung kegiatan produksi seperti irigasi, pasar, jalan; prasarana permukiman seperti ketersediaan utilitas seperti air bersih, pembuangan limbah, sampah; sarana pelayanan sosial seperti sarana pendidikan, kesehatan, dan sarana interaksi sosial. Sarana prasarana ini menjadi dasar untuk mendorong pengembangan kegiatan ekonomi dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dalam jangka panjang.

Untuk memelihara, memupuk dan mengembangkan berbagai modal daerah tersebut dibutuhkan **tata kelola pembangunan** yang andal. Peraturan, prosedur, alokasi anggaran, dan tata kelembagaan pembangunan yang tepat merupakan modal pemerintahan dalam mengatur dan membangun daerah. Berbagai aspek yang menjadi syarat terbangunnya tata kelola pembangunan yang baik seperti: kelengkapan sediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan yang didukung sistem informasi; keandalan proses dan prosedur perencanaan; koordinasi pembangunan antar instansi yang baik; dukungan peraturan yang lengkap yang didukung lembaga pelaksana yang efektif; serta kelembagaan pembangunan sosial dan ekonomi yang melibatkan peran berbagai lembaga di daerah sehingga dapat mendorong kemandirian pembangunan daerah.

Gambar 3.1: Kerangka Pembangunan Daerah Berdasarkan Pendekatan Pemeliharaan, Pemupukan, dan Pengembangan Modal Daerah (*Assets-Based Development*)



Untuk mendukung pengembangan berbagai modal daerah tersebut dibutuhkan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang didukung oleh sistem informasi pengelolaan pembangunan sebagai upaya dalam peningkatan tata kelola pembangunan yang andal.

Adapun **tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah** adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

3.1.1.1 Identifikasi Permasalahan Daerah Terkait Urusan Wajib

Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tidak semua permasalahan tiap urusan dijadikan sasaran pokok selama 20 (dua puluh) tahun ke depan, mengingat keterbatasan pendanaan, isu strategis yang muncul, fokus kepada agenda paling strategis, dan hubungannya dengan agenda-agenda pembangunan yang telah berhasil dicapai di periode sebelumnya.

Dengan pendekatan manajemen strategis, permasalahan pada urusan atau gabungan urusan yang akan dijadikan sebagai dasar penentuan sasaran pokok adalah permasalahan-permasalahan yang memiliki dampak paling tinggi terhadap

pembangunan dan kriteria-kriteria lain yang sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan daerah dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Perumusan permasalahan pembangunan pada tiap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan tiap penyelenggaraan urusan pemerintah guna mendapatkan rumusan permasalahan pada masing-masing urusan tersebut, sebagaimana Tabel berikut ini:

Tabel3.1: Permasalahan Daerah berdasarkan Urusan Kewenangan Wajib

PERMASALAHAN/ KENDALA
Urusan Kewenangan Wajib
1. Pendidikan
a) Masih rendahnya angka rata-rata lama bersekolah (8,24 tahun - 2012)
b) Secara kuantitas ketersediaan PAUD di Kabupaten Dharmasraya sudah mencukupi namun secara kualitas masih rendah
c) Keterjangkauan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) masih rendah, dilihat dari APK dan APM lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional, dan Angka Putus sekolah untuk jenjang pendidikan dasar relatif tinggi, dan Angka Melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi relatif rendah, baik melanjutkan ke jenjang SMP maupun ke jenjang SMA.
d) Pengawas sekolah belum maksimal melaksanakan fungsinya
e) Masih kurangnya mutu pendidikan di setiap jenjang pendidikan
2. Kesehatan
a) Masih tingginya Angka Kematian Ibu Melahirkan
b) Masih tingginya angka kematian bayi dan Balita
c) Masih tingginya jumlah penyakit menular (HIV/AIDs, TB, DBD/cikungunya, Diare, dan Penyakit PD3I-Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi).
d) Belum adanya regulasi tentang pelayanan kesehatan dalam rangka untuk penurunan AKI, AKB, pemberantasan penyakit menular seperti HIV/AIDs, TB, DBD, Diare serta penyakit PD3I.
e) Masih terdapatnya kasus gizi buruk
f) Rendahnya partisipasi masyarakat di bidang kesehatan
g) Masih belum optimalnya pengawasan kualitas air isi ulang
3. Pekerjaan Umum
a) Belum optimalnya akses infrastruktur jalan ke nagari
b) Berkurangnya jalan dalam kondisi baik
c) Masih terdapatnya jembatan dengan kondisi rusak dan masih adanya jembatan konstruksi kayu
d) Masih terdapatnya daerah rawan banjir

PERMASALAHAN/ KENDALA
e) Masih rendahnya pengelolaan sampah
f) masih kurangnya infrastruktur serta penataan gedung pemerintah
g) Masih terdapatnya saluran irigasi yang mengalami kerusakan
4. Penataan Ruang
a) Kurangnya pemahaman stakeholders terhadap penataan ruang
5. Perumahan Rakyat
a) Masih rendahnya penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sehat perumahan.
b) Masih terdapat rumah tidak layak huni.
c) Masih terdapatnya lingkungan permukiman kumuh.
d) Masih rendahnya cakupan layanan air bersih
6. Perencanaan Pembangunan
a) Belum optimalnya penyediaan data pendukung perencanaan pembangunan daerah
b) Masih terbatasnya kemampuan dan kapasitas para perencana di masing-masing SKPD dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
c) Belum lengkapnya instrumen perencanaan dan kurangnya konsistensi alur perencanaan sampai ke tingkat SKPD
d) Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
e) Kurangnya koordinasi lintas bidang dan lintas wilayah
7. Perhubungan
a) Kurangnya ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan
b) Kurangnya layanan angkutan umum
c) Masih rendahnya tingkat keamanan, keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas, diikuti rendahnya kesadaran lalu lintas pengguna jalan.
8. Lingkungan Hidup
a) Masih terdapatnya pencemaran air sungai dan pencemaran lingkungan
b) Rendahnya ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat.
c) Kurangnya pemantauan rutin kualitas air sungai
d) Belum maksimalnya pengelolaan persampahan
9. Pertanahan
a) Masih terdapatnya konflik pertanahan
b) Belum optimalnya pendataan dan penataan aset tanah milik pemerintah daerah
c) Masih belum jelasnya bata batas wilayah, kecamatan dan nagari
10. Kependudukan dan Catatan Sipil
a) Masih adanya masyarakat yang belum memiliki dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil
b) Masih rendahnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil, disebabkan keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM
11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PERMASALAHAN/ KENDALA
a) Masih terdapatnya perilaku kekerasan dalam rumah tangga
b) Masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan
12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
a) Terjadinya penyimpangan perilaku seks usia remaja
b) Masih tingginya PUS dibawah usia 20 tahun
13. Sosial
a) Belum optimalnya penanganan masalah sosial di masyarakat seperti : fakir miskin, anak terlantar, penyandang cacat, dan penyandang penyakit sosial
b) Kurangnya pengetahuan petugas pendamping PMKS dalam pendataan masalah sosial
14. Ketenagakerjaan
a) Masih banyaknya jumlah pengangguran
b) Masih rendahnya kualitas tenaga kerja disebabkan tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja yang rendah,
c) Masih rendahnya kesempatan kerja.
d) Belum optimalnya fungsi BLK
15. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
a) Belum kondusifnya iklim usaha yang mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
b) Masih lemahnya tata kelola kelembagaan koperasi
16. Penanaman Modal
a) Belum optimalnya promosi terhadap potensi dan peluang investasi daerah
b) Terbatasnya sarana dan prasarana daerah penunjang investasi daerah untuk menarik minat investor menanamkan modalnya di Kabupaten Dharmasraya.
17. Kebudayaan
Belum optimalnya pemeliharaan, pengelolaan dan perlindungan kekayaan budaya serta pelestarian keragaman budaya daerah
18. Pemuda dan Olah Raga
a) Masih rendahnya peran organisasi olahraga dalam pembibitan dan pembinaan atlet muda berpotensi
b) Kurang aktifnya peran pemuda di dalam masyarakat
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
a) Belum optimalnya pendidikan politik kepada masyarakat
b) Belum optimalnya pengembangan wawasan kebangsaan di kelompok masyarakat
c) Masih tingginya kejadian gangguan-gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat
d) Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam peningkatan keamanan, kenyamanan dan ketertiban lingkungan.

PERMASALAHAN/ KENDALA
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
a) Belum optimalnya koordinasi antar stakeholder dalam pemerintahan
b) Belum optimalnya penggalan sumber-sumber pendapatan daerah
c) Belum optimalnya pengawasan internal untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan masih kurangnya kapasitas tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan.
d) Terbatasnya sarana prasarana teknologi informasi di SKPD dan pemerintah nagari/kelurahan untuk menunjang kinerja pemerintah daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
e) Belum tersusunnya beberapa regulasi daerah yang menjadi kebutuhan daerah dalam merespon perkembangan peraturan perundang-undangan yang baru, dan masih ditemuinya beberapa peraturan yang belum sinergis.
f) Masih rendahnya kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel
g) kurangnya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)
21. Ketahanan Pangan
a) Rendahnya ketersediaan bahan pangan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat,
b) Masih kurangnya keragaman pangan
c) Masih lemahnya koordinasi SKPD lingkup ketahanan pangan
d) Kurangnya peran penyuluh pertanian dalam pembinaan kelompok tani
22. Pemberdayaan masyarakat
Belum optimalnya fungsi lembaga-lembaga nagari dan organisasi kemasyarakatan
23. Statistik
a) Terbatasnya ketersediaan data statistik daerah
b) Belum optimalnya koordinasi antar SKPD dalam pengelolaan data statistik untuk mendukung perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah.
24. Kearsipan
Belum optimalnya pengelolaan arsip
25. Komunikasi dan Informasi
a) Belum optimalnya pemanfaatan website pemerintah daerah
b) Kurangnya ketersediaan SDM dalam bidang teknologi informasi
26. Perpustakaan
a) Masih rendahnya minat baca masyarakat
b) Masih rendahnya koleksi buku baru di perpustakaan.
c) Belum adanya teknologi informasi dalam pelayanan perpustakaan

3.1.1.1 Identifikasi Permasalahan Daerah Terkait Urusan Pilihan

Urusan pilihan, menurut Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Terdapat 8 bidang/sector yang menjadi urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Perumusan permasalahan pembangunan pada tiap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan tiap penyelenggaraan urusan pemerintah guna mendapatkan rumusan permasalahan pada masing-masing urusan tersebut, sebagaimana Tabel berikut ini:

Tabel3.2: Permasalahan Daerah Berdasarkan Urusan Kewenangan Pilihan

PERMASALAHAN/ KENDALA
Urusan Kewenangan Pilihan
1. Pertanian
a. Terdapatnya alih fungsi lahan pertanian (lahan basah)
b. Masih rendahnya tingkat pendapatan petani (NTP<100).
c. Rendahnya harga komoditi pertanian di tingkat petani khususnya komoditi perkebunan
d. Kurangnya pemahaman petani dalam penerapan teknologi pertanian
2. Kehutanan
a. Masih terdapatnya lahan kritis.
b. Masih adanya kasus illegal logging
c. Belum optimalnya operasional UPTD KPHP
d. Alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan
3. Energi dan Sumberdaya Mineral
a. Masih terdapat pengelola usaha pertambangan dan penggalian bahan tambang yang kurang menyadari pentingnya upaya pelestarian lingkungan.
b. Masih adanya usaha pertambangan tidak memiliki ijin usaha
c. Masih adanya rumah tangga yang belum dapat mengakses listrik
d. Kurangnya kesadaran masyarakat akan hemat energi
4. Pariwisata
a. Belum adanya dokumen perencanaan pengembangan pariwisata
b. Belum terdatanya jumlah kunjungan wisata
c. Kurangnya promosi dan penyebarluasan informasi pariwisata
d. Terbatasnya sarana prasarana di obyek wisata unggulan daerah, masih kalah dibandingkan obyek wisata di kabupaten/kota lain
e. Rendahnya keterlibatan masyarakat dan rendahnya kemitraan pemerintah daerah dengan dunia usaha dalam pengembangan pariwisata
5. Kelautan dan Perikanan
a. Kurang optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana perikanan
b. Rendahnya daya saing produk perikanan
c. Belum optimalnya pengembangan kawasan perikanan menjadi sentra-sentra produksi budidaya

PERMASALAHAN/ KENDALA
d. Masih kurangnya konsumsi ikan perkapita
6. Perdagangan
a. Masih adanya pasar yang ada belum representatif
b. Masih terdapatnya produk kadaluarsa yang beredar
c. Belum terdatanya jumlah pedagang kaki lima.
d. Terbatasnya sarana dan prasarana pasar tradisional
e. Belum optimalnya pengelolaan pasar lelang karet dan pasar agropolitan yang ada
7. Industri
a. Masih banyaknya industri kecil dan menengah belum memiliki legalitas usaha
b. Daya saing produk industri kecil dan menengah masih rendah dibandingkan produk sejenis dari luar daerah yang disebabkan penggunaan teknologi industri dan standarisasi mutu.
8. Ketransmigrasian
(tidak ada kawasan binaan transmigrasi)

Dari keseluruhan permasalahan yang berhasil diidentifikasi baik permasalahan urusan wajib maupun daerah, dapat dipersempit lagi menjadi permasalahan/kendala daerah serta strategi yang akan diterapkan untuk pemecahan masalah tersebut sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel3.3: Permasalahan Daerah dan Strategi/Faktor Penentu Keberhasilan Urusan Kewenangan Pilihan

PERMASALAHAN/KENDALA DAERAH	STRATEGI/ FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
1. Tingginya laju pertumbuhan penduduk.	(1) Menggalakkan program Keluarga Berencana.
2. Rendahnya IPM dibanding rata-rata provinsi Sumatera Barat.	(1) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara promotif dan preventif. (2) Meningkatkan partisipasi pendidikan pada tingkat SD, SMP, dan SMA. (3) Memeratakan akses sarana sekolah pada setiap kecamatan. (4) Meningkatkan kualitas sekolah (dengan mengembangkan berbagai bentuk program seperti mengadakan sekolah berstandar nasional pada jenjang SD, SMP dan SMA atau program "full day school") (5) Membebaskan kabupaten dari buta huruf. (6) Peningkatan kualitas keluarga.
3. Masih rendahnya pelayanan pendidikan dan kesehatan di nagari tertinggal.	(7) Menyediakan pelayanan pendidikan dan kesehatan di nagari tertinggal.

PERMASALAHAN/KENDALA DAERAH	STRATEGI/ FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
4. Menuju Kabupaten Dharmasraya sebagai pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan di wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat.	(8) Mengembangkan pelayanan kesehatan dan pendidikan skala regional dengan: - Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas dan rumah sakit untuk pelayanan wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat dan sekitarnya dengan meningkatkan sumberdaya kesehatan dan sarana prasarana kesehatan. - Mengembangkan lembaga pendidikan tinggi dan kejuruan khususnya bidang pertanian dan kesehatan.
Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 5. belum optimalnya produksi dan produktifitas padi sawah untuk memantapkan peran Kabupaten Dharmasraya dalam mendukung ketahanan pangan.	(9) Mengendalikan alih fungsi lahan sawah yang ada dengan regulasi dan memberikan insentif produksi bagi petani. Kebijakan didukung dengan penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada area beririgasi teknis. (10) Menambah luas lahan sawah D.I. Batanghari seluas 1.715 Ha dalam jangka menengah dan mencapai 5.000 Ha dalam jangka panjang. (11) Meningkatkan pengairan D.I. kabupaten yang tersebar pada kecamatan di Kabupaten Dharmasraya dan revitalisasi sawah pada lahan lebih kurang 3.500 Ha.
6. Belum berkembangnya klaster agribisnis hortikultura berdaya saing tinggi.	(12) Mengembangkan agribisnis hortikultura buah-buahan khas daerah seperti: manggis, duku, durian dan salak dengan pola klaster.
Bidang Perikanan 7. Belum berkembangnya kawasan minapolitan Kabupaten Dharmasraya sebagai salah satu sentra perikanan darat pada wilayah Sumatera Barat bagian tenggara.	(13) Meningkatkan produksi perikanan sehingga memiliki kontribusi besar pada produksi wilayah Sumatera Barat bagian tenggara (yang meliputi Kabupaten Solok, Solok Selatan, Sijunjung dan Dharmasraya) mencapai lebih 300%. (14) Mengembangkan dan membangun prasarana sarana pendukung kawasan minapolitan (balai benih, balai penelitian, pasar minapolitan).
Bidang Perkebunan 8. Belum berkembangnya usaha perkebunan rakyat yang maju dan mandiri.	(15) Meningkatkan produksi dan produktifitas produk unggulan karet, kelapa sawit dan komoditi lainnya seperti kopi dan kakao. (16) Peremajaan tanaman perkebunan sawit dan karet. (17) Membangun pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dengan kapasitas PKS 150 ton/jam. (18) Membangun pabrik pengolahan industri hilir makanan (minyak goreng) untuk pasar Sumatera Barat dan wilayah sekitar. (19) Mengembangkan pengolahan karet dalam bentuk slab dan sheet ditingkat petani dan pengolahan lebih lanjut produk karet. (20) Mengembangkan komoditi potensial perkebunan lainnya seperti kakao dan kopi untuk mendukung ketahanan

PERMASALAHAN/KENDALA DAERAH	STRATEGI/ FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
	<p>ekonomi wilayah.</p> <p>(21) Mengembangkan industri rakyat skala mikro dan kecil berbasis pengolahan sumber daya pertanian (sawit, karet, kopi dan kakao).</p> <p>(22) Mengembangkan pasar lelang agro hasil perkebunan.</p> <p>(23) Membangun pola investasi usaha budidaya perkebunan dan industri yang mendorong kemandirian petani dengan melibatkan potensi pengelolaan dan pembiayaan yang ada di daerah (seperti lembaga perbankan, kelompok tani, koperasi, nagari, pemerintah).</p> <p>(24) Meningkatkan akses menghubungkan kawasan budidaya perkebunan dengan jalur transportasi regional.</p>
<p>Bidang Peternakan</p> <p>9. Belum berkembangnya budidaya sapi potong dengan strategi utama pengembangan integrasi kelapa sawit - sapi potong.</p>	<p>(25) Memberdayakan petani peternak dalam budidaya sapi potong mencapai minimal 2 kali lipat dari jumlah sapi sekarang (mencapai minimal 50.000 ekor).</p> <p>(26) Mengembangkan dan melengkapi sarana pendukung sentra peternakan (pasar ternak, rumah potong hewan, puskesmas dan sarana lainnya).</p>
<p>Bidang Pertambangan</p> <p>10. Belum berkembangnya kegiatan pertambangan dan pengolahan hasil tambang yang berkelanjutan dan memberi manfaat yang besar untuk kesejahteraan masyarakat.</p>	<p>(27) Mengorientasikan kegiatan pertambangan yang memberi dampak besar kepada kesejahteraan masyarakat</p> <p>(28) Mengembangkan eksploitasi pertambangan yang ramah lingkungan.</p> <p>(29) Mengembangkan industri pengolahan hasil tambang.</p> <p>(30) Melakukan reklamasi lahan yang bermanfaat bagi masyarakat.</p>
<p>11. Belum berkembangnya usaha skala mikro kecil dan menengah (UMKM) prospektif</p>	<p>(31) Percepatan peningkatan produksi dan pasar industri dan usaha skala mikro, kecil dan menengah prospektif.</p>
<p>12. Masih rawannya kelestarian kawasan hutan berfungsi lindung di Kabupaten Dharmasraya.</p>	<p>(32) Mengembangkan kegiatan usaha pemanfaatan nilai ekonomi hutan kayu dan non kayu secara lestari bagi penduduk sekitar.</p> <p>(33) Pengembangan industri hasil hutan.</p>
<p>13. pemanfaatan lahan budidaya sesuai aturan tata ruang masih belum optimal</p>	<p>(34) Menjaga kualitas dan debit air sungai Batanghari</p> <p>(35) Minimalnya kerawanan bencana longsor dan erosi lahan.</p> <p>(36) Mengarahkan kegiatan budidaya pertanian dan eksploitasi pertambangan sesuai dengan rencana zonasi/tata ruang.</p>
<p>14. Belum berkembangnya fungsi sosial-budaya dan sosial-ekonomi nagari.</p>	<p>(37) Memperkuat fungsi nagari sebagai pelaku kegiatan sosial-budaya.</p>
<p>15. Belum meningkatnya kemandirian ekonomi terkait pengelolaan usaha, distribusi barang, pengolahan hasil, dan pemasaran.</p>	<p>(38) Mengembangkan fungsi nagari sebagai pelaku sosial-ekonomi.</p> <p>(39) Memberdayakan berbagai lembaga pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat.</p>
<p>16. Belum tersedianya pusat perdagangan dan jasa untuk pelayanan internal daerah serta menjadikan Kabupaten Dharmasraya sebagai</p>	<p>(40) Revitalisasi pasar-pasar nagari sebagai tempat pemenuhan kebutuhan harian penduduk yang nyaman.</p>

PERMASALAHAN/KENDALA DAERAH	STRATEGI/ FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
orientasi perdagangan dan jasa di wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat dan sekitarnya.	<p>(41) Pengembangan pasar tematik (berupa pasar lelang agro hasil perkebunan, pasar agropolitan ternak, dan pasar minapolitan) untuk mendukung fungsi Kabupaten Dharmasraya sebagai sentra produksi perkebunan, peternakan, dan perikanan.</p> <p>(42) Mengembangkan pusat perdagangan dan jasa di kawasan Sungai Rumbai, Koto Baru, Pulau Punjung, kawasan perkotaan yang berprospek berkembang dimasa depan seperti Padang Laweh serta rest area pada koridor Jalan Lintas Sumatera.</p>
17. Belum terpenuhinya sarana prasarana untuk mementaskan kawasan tertinggal.	(43) Menyediakan sarana prasarana nagari tertinggal
18. Belum berkembangnya kawasan dan objek wisata dan rekreasi dan tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) serba guna.	<p>(44) Membangun:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kawasan terpadu wisata alam-budaya serta - Taman rekreasi bertema (<i>theme park</i>). <p>(45) Mengembangkan objek wisata dan rekreasi prioritas kawasan.</p> <p>(46) Membangun RTH serbaguna pada tingkatan kabupaten, kecamatan dan nagari (untuk kegiatan olahraga dan kegiatan sosial).</p>
19. Belum terpenuhinya kebutuhan prasarana energi, telekomunikasi, air bersih dan sanitasi lingkungan permukiman minimal mencapai standar pelayanan minimal.	<p>(47) Meningkatkan akses pelayanan listrik di seluruh kabupaten dengan alternatif peluang memanfaatkan energi baru dan terbarukan (seperti mikrohidro dan tenaga surya).</p> <p>(48) Meningkatkan akses terhadap sumber air minum di perkotaan dan perdesaan minimal mencapai standar MDGs.</p> <p>(49) Terlayannya air bersih perpipaan pada kawasan cepat tumbuh (Pulau Punjung – Sitiung – Kotobaru dan Sungai Rumbai).</p> <p>(50) Menuju Kabupaten Dharmasraya sehat lingkungan dengan meningkatkan pelayanan sanitasi dan penyehatan lingkungan permukiman.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan jumlah rumah tangga perkotaan dan perdesaan dengan akses sanitasi layak minimal mencapai standar MDGs. - Melengkapi kebutuhan prasarana sanitasi dengan membangun sarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). - Meningkatkan pelayanan persampahan pada pusat-pusat kegiatan perdagangan dan pemerintahan dengan dukungan sarana pelayanan persampahan yang memadai yang mampu melayani wilayah bagian utara dan selatan kabupaten. <p>(51) Mengurangi keberadaan lingkungan</p>

PERMASALAHAN/KENDALA DAERAH	STRATEGI/ FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
	permukiman dan perumahan kumuh dan tidak layak huni.
20. Belum tersedianya dukungan prasarana sumber daya air pendukung kegiatan produktif.	(52) Membangun Prasarana Pengairan <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan jaringan irigasi dalam D.I. Batanghari dan D.I. Kabupaten. - Mengembangkan manajemen air irigasi yang handal.
21. Masih rendahnya tingkat keterjangkauan (aksesibilitas) antar kawasan di daerah.	(53) Membangun jaringan transportasi antar kawasan. <ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan akses menuju pusat-pusat kegiatan pelayanan dan kawasan pertanian. - Membangun prasarana terminal pada pusat perdagangan. - Mengembangkan moda transportasi sungai Batanghari sebagai bagian atraksi wisata alam dan budaya.
22. Belum terjalannya konektivitas wilayah Kabupaten Dharmasraya dan kabupaten sekitarnya (Kabupaten Solok Selatan, Sijunjung, Kuantan Singingi, Bungo, dan Tebo) dengan pusat kegiatan ekonomi koridor Pulau Sumatera.	(54) Membangun jaringan transportasi antar wilayah untuk akses ekonomi menuju koridor timur Pulau Sumatera dan kabupaten berbatasan. <ul style="list-style-type: none"> - Membangun akses menghubungkan kabupaten Dharmasraya dengan kawasan pengembangan ekonomi koridor timur Pulau Sumatera sebagai sentra pengembangan perkebunan dan lumbung energi (batu bara). - Mengembangkan akses jalan lingkaran utara dan selatan Kabupaten Dharmasraya untuk menghubungkan pusat-pusat kegiatan wilayah dan mengurangi beban jalan Lintas Sumatera. - Mengembangkan akses menuju wilayah kabupaten yang berbatasan yaitu dengan Kabupaten Solok Selatan; Kabupaten Sijunjung; Kabupaten Tebo; Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Bungo; - mengkaji lebih lanjut peluang alternatif moda transportasi udara
23. belum berperannya adat dan tradisi serta lestariannya identitas daerah.	(55) Memperkuat peran adat dalam pengelolaan tanah ulayat dan peri kehidupan masyarakat. (56) Melestarikan situs budaya dan pemanfaatannya sebagai objek wisata.
24. Belum terwujudnya kehidupan yang religius.	(57) Mengembangkan kegiatan keagamaan di sekolah dan nagari.
25. Belum terbangunnya sistem perencanaan prioritas pembangunan daerah yang baku dan konsisten.	(58) Menyusun dan menyelenggarakan standar prosedur dan metoda baku sebagai pedoman penentuan prioritas pembangunan.
26. Belum tersedianya sistem informasi pengelolaan pembangunan daerah yang akurat untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.	(59) Membangun basis data dan informasi pembangunan nagari. (60) Membangun sistem informasi pembangunan kabupaten berbasis teknologi informasi.

PERMASALAHAN/KENDALA DAERAH	STRATEGI/ FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
27. Belum berkembangnya pola investasi pembangunan berbasis kemandirian daerah.	(61) Membangun pola investasi usaha yang melibatkan potensi pengelolaan dan pembiayaan yang ada di daerah (seperti lembaga perbankan, kelompok tani, koperasi, badan usaha pemerintah, nagari, dan CSR).
28. Belum terbangunnya mekanisme pengendalian tata ruang yang efektif.	(62) Mengefektifkan aspek perijinan, pengawasan dan sanksi dalam pengendalian tata ruang terkait dengan pembangunan perumahan dan permukiman, alih fungsi lahan sawah dan kawasan hutan, serta lokasi kegiatan pertambangan.

3.2. ISU-ISU STRATEGIS

Perumusan isu strategis pada bagian ini berdasarkan analisis lingkungan eksternal. Selain berdasarkan pengamatan lingkungan internal, Pemerintah Daerah perlu menyelaraskan isu-isu pembangunan daerah dengan isu eksternal dalam wilayah lebih luas. Rumusan isu strategis yang dihasilkan adalah keterpaduan/sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah dengan arah kebijakan pembangunan wilayah sekitar dan wilayah yang lebih luas (dengan arah kebijakan rencana jangka panjang nasional, kebijakan pembangunan jangka panjang provinsi, atau kecenderungan lain berskala nasional, global lainnya dimasa depan).

Isu-isu lingkungan eksternal jangka panjang yang selaras dengan isu pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya yaitu: rencana dan target MDGs, RPJPN, MP3EI, Rencana Strategis Sektor/Kementrian, dan RPJP Provinsi.

3.2.1 Penelaahan Isu – isu Strategis Nasional dan Provinsi Sumatera Barat

Penelaahan RPJPN Tahun 2005-2025

Visi pembangunan nasional tahun seperti tertera dalam RPJP Nasional 2005–2025 adalah: “Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil Dan Makmur”. Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing. Mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu

5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan adalah meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional

Penelaahan Isu Strategis Sektor/Kementrian

- a) Arah kebijakan pangan dalam RPJP Nasional yaitu menjaga ketahanan dan kemandirian pangan nasional. Salah satu program utama pemerintah yaitu mewujudkan swasembada beras. Sebagai pendukung telah ada Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 2009 Tentang Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan
- b) Program Swasembada Daging Sapi 2014 (PSDS-2014). Sumatera Barat ditetapkan sebagai salah satu dari 18 sentra sapi potong. Salah satu program yang prospektif yaitu sistem integrasi Tanaman -Ternak seperti integrasi kelapa sawit-sapi.
- c) Dalam Rencana Jangka Menengah Nasional, salah satu pendekatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah dengan konsep Minapolitan. Kabupaten Dharmasraya menjadi salahsatu daerah pengembangan minapolitan.
- d) Beberapa agenda penting dalam pembangunan sektor perkebunan bagi perbaikan rantai nilai kelapa sawit dan karet dalam MP3EI yang perlu dilihat sebagai acuan pembangunan komoditi yang sama di Kabupaten Dharmasraya yaitu:
 - Peningkatan produksi kelapa sawit akan lebih difokuskan kepada peningkatan produktifitas CPO per hektar, yang saat ini baru mencapai 3,8 Ton/Ha, mengejar ketertinggalan dari Malaysia yang telah mampu mencapai 4,6 Ton/Ha.
 - Perbaikan infrastruktur jalan (akses jalan) dari lahan ke PKS, dan penyediaan tangki timbun yang memadai. Hasil penggilingan secara terstruktur harus mampu ditingkatkan, yakni dari rata-rata produksi CPO sekitar 21% menjadi diantara 24 – 25%.
 - Hilirisasi produk kelapa sawit untuk memperkuat posisi strategis Indonesia.
 - Perbaikan mutu bibit karet (wajib bersertifikat), perbaikan teknik budi daya (jarak tanam) dan perawatan tanaman karet yang baik. Sebanyak mungkin dihimbau untuk menggunakan kultivar karet bibit unggul (siap panen umur 3,5 tahun);
 - Melakukan budidaya tumpang sari pada dua tahun pertama budidaya karet dengan tanaman pangan, seperti kacang tanah, jagung, ubi jalar dll,

sehingga menambah penghasilan petani karet, dan secara tidak langsung ikut membangun ketahanan pangan setempat;

- Mengeliminasi kecurangan pencampuran lateks dengan bahan-bahan pengotor karet oleh para petani karet, serta meminimalkan jumlah pedagang perantara karet, agar penghasilan yang diterima petani menjadi lebih besar;
 - Penataan kelembagaan dan eksistensi para pengolah karet rakyat yang tidak efisien, perbaikan teknik pengolahan karet rakyat (bokar) dan karet lembaran (sheet);
 - Menumbuhkembangkan industri produk hilir karet di dalam negeri, terutama untuk ban, sarung tangan, busa kasur dan bantal, kondom, sol sepatu, vulkanisir ban dan lain sebagainya.
- e) Program nasional Kementerian Perdagangan untuk merevitalisasi pasar tradisional di seluruh tanah air (yang berjumlah 12.000-13.000 unit pasar) untuk menjadi pasar rakyat yang handal dan berdaya saing.
- f) Undang-undang Nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, menyatakan bahwa informasi geospasial merupakan dasar perencanaan penataan ruang, penanggulangan bencana, pengelolaan sumber daya alam, dan lain sebagainya. Sistem informasi geospasial perlu dibuat terintegrasi secara nasional seperti disosialisasikan oleh Bakosurtanal.
- g) Kecenderungan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat yang aspiratif dan partisipatif seperti skema PNPM dan pembangunan infrastruktur pedesaan.
- h) Kecenderungan untuk terus melakukan pengelolaan data berbasis teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- i) Tata ruang sebagai aspek penting pemandu investasi dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Penelaahan MDGs Tahun 2015

Berbagai tujuan dan arget pencapaian MDGs yang relevan untuk rujukan perumusan isu strategis pembangunan di Kabupaten Dharmasraya yaitu:

1. menanggulangi kemiskinan dan kelaparan dengan target: menurunkan proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1,00 (ppp) per hari; dan menciptakan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda; dan menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan
2. mencapai pendidikan dasar untuk semua dengan target: menjamin semua anak laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar
3. mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan target: menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan
4. menurunkan angka kematian anak dengan target: menurunkan angka kematian balita, bayi, neonatal.
5. meningkatkan kesehatan ibu dengan target: menurunkan angka kematian ibu dan mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua

Memastikan kelestarian lingkungan hidup dengan target: memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang; mengurangi laju kehilangan keanekaragaman hayati, dan mencapai pengurangan laju kehilangan yang signifikan; menurunkan proporsi penduduk tanpa akses terhadap air minum yang aman dan berkelanjutan layak serta sanitasi dasar; dan mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020.

Penelaahan MP3EI

Meskipun tidak termasuk kedalam rencana MP3EI Koridor Sumatera tetapi dengan posisi geografis yang berdekatan dan komoditi unggulan daerah yang sama maka berbagai program pengembangannya perlu dilihat sebagai rujukan pembangunan daerah. Tema pembangunan MP3EI koridor Sumatera yaitu Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional dengan komoditi utama kelapa sawit, karet, batu bara, Perkapalan, Besi Baja, dan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Selat Sunda. Tiga komoditi utama pertama adalah menjadi komoditi utama Kabupaten Dharmasraya. Mengkaitkan peluang pembangunan Kabupaten Dharmasraya dengan adanya pengembangan MP3EI menjadi salah satu isu penting.

Penelaahan RPJPD Provinsi Sumatera Barat

Visi RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2005-2025 yaitu: Menjadi Provinsi Terkemuka Berbasis Sumberdaya Manusia Yang Agamais Pada Tahun 2025. Visi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 adalah: Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani yang Adil, Sejahtera dan Bermartabat. Salah satu agenda penting dalam rencana pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut yaitu memberdayakan nagari sebagai basis pembangunan. Sasaran pembangunannya yaitu pemantapan pemerintahan nagari, sistem pengelolaan keuangan nagari, peningkatan SDM penyelenggaraan pemerintahan nagari, dan partisipasi masyarakat (perantau dalam pembangunan nagari).

3.2.2 Penelaahaan RPJP Daerah Lain/Tetangga

Kebutuhan Keterpaduan rencana pembangunan Kabupaten Dharmasraya dengan daerah kabupaten tetangga yang perlu dibangun dalam jangka panjang yaitu dengan Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Tebo terkait dengan pengembangan kawasan perbatasan antar daerah.

Peluang pengembangan kerjasama antar daerah tersebut yaitu: (a) kerjasama peningkatan konektivitas di kawasan perbatasan antara Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Tebo, (b) Konektivitas tersebut berkaitan dengan kerjasama penyediaan kegiatan perdagangan serta pelayanan sosial pendidikan dan kesehatan di perbatasan, (c) kerjasama pengendalian kawasan hutan dan hulu sungai dalam DAS Batanghari dengan kabupaten Solok dan Solok Selatan, dan (d) kerjasama pemberian insentif dan disinsentif dalam pengembangan kawasan DAS Batanghari dengan kabupaten tetangga dan kabupaten/kota di hilir DAS Batanghari.

Simpul-simpul konektivitas di Kabupaten Dharmasraya dalam kerangka kerjasama pengembangan kawasan perbatasan yaitu: Silago di kawasan perbatasan

Dharmasraya – Solok; Padang Laweh di kawasan perbatasan Dharmasraya – Kuantan Singingi; Sungai Limau dan Sungai Rumbai di Kawasan Perbatasan Dharmasraya – Bungo; Pulau Punjung, Koto Baru, Sungai Rumbai di kawasan perbatasan Dharmasraya – Solok Selatan.

3.2.2 Isu – Isu Strategis Kabupaten Dharmasraya

Dengan mendasarkan pada permasalahan, potensi, kebutuhan, dan peluang pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya dalam kerangka isu pemeliharaan, pemupukan dan pengembangan modal daerah serta dengan memperhatikan kebijakan pembangunan di daerah sekitar Kabupaten Dharmasraya serta isu - isu strategis jangka panjang internasional (MDGs), nasional serta regional dan aspek lainnya maka isu strategis pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005 - 2025 adalah sebagai

- a. Peningkatan kesejahteraan penduduk dalam aspek pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, dan keluarga sejahtera sebagai usaha pemupukan dan pengembangan modal manusia.
- b. Pengembangan pertanian, pertambangan, peternakan dan perikanan dengan optimal serta bernilai tambah besar di Kabupaten Dharmasraya sebagai wujud pengembangan modal alam.
- c. Pemberdayaan nagari dan kelompok masyarakat sebagai usaha pemupukan dan pengembangan modal sosial dan modal ekonomi.
- d. Reorientasi peran adat dalam perkembangan sosial ekonomi, menggiatkan kehidupan beragama serta pelestarian peninggalan budaya bekas Kerajaan Dharmasraya merupakan isu dalam modal budaya.
- e. Terjaganya kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya sebagai bagian Sub DAS Batanghari hulu dan tengah dengan pengendalian kualitas air sungai, pelestarian hutan, atau pertanian yang berkelanjutan sesuai dengan karakteristik lahan sebagai wujud pemeliharaan modal lingkungan.
- f. Ketersediaan berbagai prasarana (sanitasi lingkungan, prasarana sumberdaya air, energi, telekomunikasi dan transportasi) serta sarana pelayanan (pendidikan, kesehatan, perdagangan, rekreasi dan olah raga) merupakan bentuk dari pengembangan modal sarana prasarana wilayah.

Tabel 3.3 Keterkaitan Isu Strategis Pembangunan Kabupaten dengan Isu Nasional dan Provinsi

No.	Isu Nasional	Isu Provinsi	Isu Kabupaten Dharmasraya
A	Demografi dan Kesejahteraan Penduduk (Modal Manusia)		
	Penurunan angka kelahiran secara nasional	Pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Penurunan laju pertumbuhan penduduk.
			Nilai IPM yang rendah.
			Menjadikan Kabupaten Dharmasraya sebagai pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan di wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat.
			Pemerataan akses sarana sekolah pada setiap kecamatan.
			Peremberantasan buta huruf
			Pengembangan usaha ekonomi bagi penduduk berpendapatan rendah.
			Pengembangan fungsi pelayanan kesehatan bagi daerah perbatasan tenggara Provinsi Sumatera Barat dan sekitarnya.
B	Pembangunan Ekonomi Berbasis Sumberdaya Alam yang Bernilai Tambah dan Mandiri (Modal Sumber Daya Alam)		
	Ketahanan pangan dan swasembada beras	Ketahanan pangan dan swasembada beras	Pengendalian alih fungsi lahan sawah yang ada
		Pembangunan perikanan berbasis wilayah (minapolitan)	Peningkatan luas lahan sawah D.I. Batanghari dan D.I. kabupaten
		Swasembada Daging Sapi Nasional, Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu sentra.	Pengembangan agribisnis hortikultura buah-buahan
	Pembangunan perikanan berbasis wilayah (minapolitan)	Pengembangan daya saing komoditas unggulan karet, kelapa sawit, kakao.	Pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Dharmasraya
	Pengolahan hasil tambang dan kebijakan pertambangan yang memberi manfaat bagi masyarakat	Pengolahan hasil tambang dan kebijakan pertambangan yang memberi manfaat bagi masyarakat	Pengembangan peternakan sapi potong dengan strategi utama integrasi kelapa sawit - sapi potong.

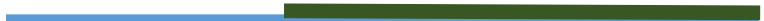
No.	Isu Nasional	Isu Provinsi	Isu Kabupaten Dharmasraya
	Peningkatan ketersediaan RTH	Peningkatan ketersediaan RTH	Meningkatnya produksi dan produktifitas produk unggulan karet, kelapa sawit, kako dan kopi Berkembangnya kemandirian daerah dalam kegiatan perkebunan melalui pembangunan pabrik pengolahan sawit dan karet, pengolahan karet rakyat, pengendalian fluktuasi harga, peningkatan akses jala. Pengembangan eksploitasi pertambangan yang memberi manfaat sosial yang besar dan ramah lingkungan. Pengembangan objek wisata dan rekreasi alam per klaster wisata dan rekreasi.
C	Pelestarian Lingkungan Hidup (Modal Lingkungan)		
	Misi nasional mewujudkan Indonesia asri dan lestari		Pelestarian kawasan hutan berfungsi lindung di Kabupaten Dharmasraya. Pemanfaatan hasil hutan secara lestari bagi penduduk sekitar. Pengendalian pencemaran sungai
D	Pemberdayaan Nagari dan Masyarakat dalam Aspek Sosial- Budaya dan Sosial Ekonomi (Modal Sosial dan Budaya)		
		Pemberdayaan nagari sebagai basis pembangunan daerah.	Pengembangan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat untuk mewujudkan kemandirian Pemberdayaan fungsi sosial-budaya dan sosial-ekonomi nagari. Pengembangan kegiatan keagamaan di sekolah dan nagari. Penguatan adat sebagai modal budaya pengaturan kehidupan keluarga dan bermasyarakat. Pemeliharaan situs budaya dan pemanfaatannya sebagai objek wisata.
E	Penguatan Dukungan Sarana Prasarana (Modal Sarana Prasarana)		
	Misi RPJPD mengurangi	Misi RPJPD mengurangi kesenjangan sosial secara	Penataan sarana pasar untuk orientasi belanja

No.	Isu Nasional	Isu Provinsi	Isu Kabupaten Dharmasraya
	kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat	menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat	kebutuhan sekunder penduduk di kawasan perdagangan kabupaten dan sekitarnya.
	Peningkatan ketersediaan RTH	Peningkatan ketersediaan RTH	Menyediakan sarana lapangan olah raga serbaguna untuk lingkup kabupaten, kecamatan dan nagari.
	Membangun infrastruktur yang maju	Membangun infrastruktur yang maju	Peningkatan akses transportasi jalan untuk produksi dan pelayanan masyarakat
		Sasaran MDGs menurunkan proporsi penduduk tanpa akses terhadap air minum yang aman dan berkelanjutan layak serta sanitasi dasar	Terlayannya persampahan pada pusat-pusat kegiatan perdagangan dan pemerintahan dengan dukungan sarana pelayanan persampahan yang memadai.
	Peningkatan rasio elektrifikasi nasional	Sasaran MDGs peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020.	Terwujudnya akses pelayanan listrik di seluruh kabupaten.
	Sasaran MDGs menurunkan proporsi penduduk tanpa akses terhadap air minum yang aman dan berkelanjutan layak serta sanitasi dasar		Meningkatnya rumah tangga dengan akses sanitasi layak sesuai standar MDGs
			Semakin baiknya sarana pembuangan limbah tinja RT dan terbangunnya IPLT dimasa depan.
			Meningkatnya akses terhadap sumber air minum di perkotaan dan perdesaan. Sesuai standar MDGs
			Terlayannya air bersih perpipaan PDAM terutama pada kawasan cepat tumbuh (Pulau Punjung - Sitiung - Kotobaru dan Sungai Rumbai)
	Sasaran MDGs peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020.	Semakin berkurangnya lingkungan permukiman dan perumahan kumuh dan tidak layak huni	
F	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan		
	Standarisasi prosedur Perencanaan Pembangunan nasional dan daerah	Tata ruang sebagai aspek penting pemandu investasi dan pengendalian pemanfaatan ruang	Terseleenggaranya Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang baku dan konsisten.
	Kecenderungan untuk		Tersedianya Sistem informasi Pengelolaan

No.	Isu Nasional	Isu Provinsi	Isu Kabupaten Dharmasraya
	melakukan pengelolaan data berbasis teknologi informasi	Pelayanan kesehatan dasar	Pembangunan Daerah
	Tata ruang sebagai aspek penting pemandu investasi dan pengendalian pemanfaatan ruang		Terkendalnya tata ruang terkait dengan alih fungsi lahan sawah, kawasan hutan dan pengembangan kegiatan pertambangan.

RPJPD KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2005-2025

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH



BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

Visi adalah gambaran perwujudan masa depan yang diinginkan

Misi adalah berbagai upaya untuk mencapai visi

4.1 Visi

Visi merupakan rumusan umum yang mengarahkan kondisi daerah yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang, yakni 20 tahun ke depan. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, namun suatu komitmen dan upaya merancang serta mengelola perubahan untuk mencapai tujuan pembangunan 20 tahun ke depan. Visi harus didasarkan pada realita dan harus dapat menunjukkan gambaran masa depan yang ideal bagi pembangunan daerah dan masyarakat.

Visi adalah gambaran perwujudan masa depan yang diinginkan. Visi jangka panjang Kabupaten Dharmasraya sampai pada tahun 2025 yaitu:

Kabupaten Dharmasraya Maju Berbudaya¹

¹Hasil Focus Group Discussion (FGD) perumusan visi RPJP Kabupaten Dharmasraya yang dilaksanakan atas Kerjasama Bappeda Kabupaten Dharmasraya dengan Perkumpulan Peduli Tahun 2011 merumuskan nilai-nilai yang harus diwujudkan sebagai visi yaitu: “Kabupaten Dharmasraya yang cerdas, sejahtera, mandiri, adil dan berbudaya berlandaskan iman dan taqwa”. Rumusan visi: “Kabupaten Dharmasraya maju dan berbudaya” adalah ringkasan yang mudah diingat dari nilai visi yang telah dirumuskan sebelumnya.

Pengertian dari visi:

- Maju : Masyarakat sejahtera dan mandiri serta Kabupaten Dharmasraya berperan sebagai pusat pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025.
- Berbudaya : Masyarakat cerdas, pembangunan berkeadilan, serta kehidupan berlandaskan adat, iman dan taqwa.

Penjelasan lebih lanjut dari pengertian visi yaitu:

- Kesejahteraan : Penduduk dengan taraf hidup tinggi, sehat, dengan terpenuhinya kebutuhan hidup secara fisik dan ekonomi.
- Kemandirian : Pengelolaan sumberdaya alam dan kegiatan ekonomi turunannya melibatkan peran kelompok masyarakat dan memberi manfaat yang besar untuk masyarakat dan daerah.
- Cerdas : Tingginya tingkat pendidikan formal dan keterampilan dalam mengolah sumberdaya yang dimiliki daerah dan menjalankan kegiatan sosial ekonomi.
- Berkeadilan : Pemerataan kualitas hidup dalam masyarakat dan Pemerataan pembangunan antar kawasan.
- Pusat pengembangan ekonomi : Kabupaten Dharmasraya menjadi lokasi utama produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil sumberdaya alam (pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan), kegiatan perdagangan dan jasa, serta kegiatan pariwisata alam dan budaya di Sumatera Barat Bagian Tenggara yang mencakup juga sebagian wilayah kabupaten di provinsi tetangga.
Kabupaten Dharmasraya berperan sebagai simpul kegiatan ekonomi wilayah Sumatera Barat Bagian Tenggara yang terkoneksi dengan pusat pemasaran regional di Pulau Sumatera.
- Pusat pelayanan sosial : Kabupaten Dharmasraya berperan menjadi lokasi utama orientasi pelayanan pendidikan dan kesehatan di Sumatera Barat Bagian Tenggara yang mencakup juga sebagian wilayah kabupaten di provinsi tetangga.
- Berlandaskan adat, iman dan taqwa : Kemajuan ekonomi dan kehidupan sehari-hari yang dibingkai oleh norma dan semangat adat dan nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

4.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum tentang upaya atau pilihan jalan (the chosen track) yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah, yaitu menyediakan layanan bagi masyarakat dan aktivitas pembangunan bagi seluruh stakeholder. Misi merupakan hal yang penting untuk dirumuskan untuk membantu menggambarkan visi secara lebih jelas yang ingin dicapai dan upaya yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Misi dalam RPJPD harus mampu menaungi berbagai tema pembangunan dalam 4 tahap selama 20 tahun ke depan.

Perumusan misi merupakan suatu upaya menyusun sistematika berupa pola perjalanan pemerintahan daerah dalam rangka mengembangkan program - program prioritas untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pelayanan masyarakat lebih efektif efisien dan terukur. Dalam menyusun misi pembangunan jangka panjang daerah, perlu disusun pendefinisian visin terlebih dahulu menjadi pokok - pokok visi. Pokok - pokok visi disusun dengan memperhatikan stakeholder yang menjadi pelaku dan atau terkena dampak pelaksanaan pembangunan.

Dengan kata lain Misi adalah berbagai upaya untuk mencapai visi. Adapun Misi Kabupaten Dharmasraya untuk 20 (Dua puluh) tahun ke depan, yaitu:

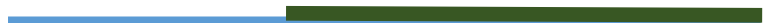
1. Meningkatkan kualitas manusia agar bisa membawa kemajuan daerah disegala bidang dan berkontribusi sebagai pusat pengembangan pendidikan dan kesehatan dalam wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat.
2. Memanfaatkan kekayaan sumber daya alam (pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, industri) dengan optimal dan bernilai tambah besar sebagai upaya mensejahterakan masyarakat sekaligus menjadikan Kabupaten Dharmasraya sebagai pusat pengembangan ekonomi bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat.
3. Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
4. Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat (seperti kelompok tani, koperasi paguyuban, kelembagaan adat, karang taruna dan lainnya) sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi.
5. Menyediakan berbagai prasarana dan sarana pendukung kegiatan ekonomi dan sosial yang mampu mendorong perkembangan ekonomi dan mewujudkan pemerataan pembangunan antar kawasan.
6. Menegakkan kehidupan beragama dan beradat sebagai norma sosial dan semangat membangun serta melestarikan identitas daerah.
7. Mewujudkan tata kelola pembangunan yang andal dan maju serta melibatkan semua potensi peran kelembagaan daerah yang mampu membangun manfaat yang besar, kemandirian dan keadilan dalam pembangunan.

Tabel 4.1 : Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Dharmasraya

Visi	Misi
<p>Kabupaten Dharmasraya Maju Berbudaya</p>	
<p>Kabupaten Dharmasraya maju. <i>Pengertian maju: Masyarakat sejahtera dan mandiri serta Kabupaten Dharmasraya berperan sebagai pusat pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025.</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas manusia agar bisa membawa kemajuan daerah disegala bidang dan berkontribusi sebagai pusat pengembangan pendidikan dan kesehatan dalam wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat. 2. Memanfaatkan kekayaan sumber daya alam dengan optimal dan bernilai tambah besar sebagai upaya mensejahterakan masyarakat sekaligus menjadikan Kabupaten Dharmasraya sebagai pusat pengembangan ekonomi bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat. 3. Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. 4. Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi. 5. Menyediakan berbagai prasarana dan sarana pendukung kegiatan ekonomi dan sosial yang mampu mendorong perkembangan ekonomi dan mewujudkan pemerataan pembangunan antar kawasan.
<p>Kabupaten Dharmasraya berbudaya. <i>Pengertian berbudaya: Masyarakat cerdas, pembangunan berkeadilan, serta kehidupan berlandaskan adat, iman dan taqwa</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 6. Menegakkan kehidupan beragama dan beradat sebagai norma sosial dan semangat membangun serta melestarikan identitas daerah. 7. Mewujudkan tata kelola pembangunan yang andal dan maju serta melibatkan semua potensi peran kelembagaan daerah yang mampu membangun manfaat yang besar, kemandirian dan keadilan dalam pembangunan.

RPJPD KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2005-2025

BAB V **ARAHAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN** **JANGKA PANJANG DAERAH**



BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Sasaran pokok menggambarkan kondisi yang diinginkan dengan pencapaian visi/misi pada akhir periode 20 (dua puluh) tahun.

Arah kebijakan adalah instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok RPJPD bertahap.

Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

5.1 Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Dharmasraya



Sasaran pembangunan yang diturunkan dari 7 (tujuh) misi pembangunan Kabupaten Dharmasraya yaitu terdiri dari 28 sasaran pokok dan 63 arah kebijakan pembangunan diuraikan berikut ini.

Tabel 5.1: Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
Misi 1 : Meningkatkan kualitas manusia agar bisa membawa kemajuan daerah disegala bidang dan berkontribusi sebagai pusat pengembangan pendidikan dan kesehatan dalam wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat	1. Tercapainya penurunan laju pertumbuhan penduduk.	(1) Menggalakkan program Keluarga Berencana.
	2. Meningkatnya nilai IPM mencapai rata-rata provinsi Sumatera Barat.	(2) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara promotif dan preventif. (3) Meningkatkan partisipasi pendidikan pada tingkat SD, SMP, dan SMA. (4) Memeratakan akses sarana sekolah pada setiap kecamatan. (5) Meningkatkan kualitas sekolah (dengan mengembangkan berbagai bentuk program seperti mengadakan sekolah berstandar nasional pada jenjang SD, SMP dan SMA atau program "full day school") (6) Membebaskan kabupaten dari buta huruf. (7) Peningkatan kualitas keluarga.
	3. Terlayannya pelayanan pendidikan dan kesehatan di nagari tertinggal.	(8) Menyediakan pelayanan pendidikan dan kesehatan di nagari tertinggal.
	4. Tercapainya Kabupaten Dharmasraya sebagai pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan di wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat.	(9) Mengembangkan pelayanan kesehatan dan pendidikan skala regional dengan: - Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas dan rumah sakit untuk pelayanan wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat dan sekitarnya dengan meningkatkan sumberdaya kesehatan dan sarana prasarana kesehatan. - Mengembangkan lembaga pendidikan tinggi dan kejuruan khususnya bidang pertanian dan kesehatan.
Misi 2 : Memanfaatkan kekayaan sumber daya alam (pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, industri) dengan optimal dan bernilai tambah besar sebagai upaya mensejahterakan masyarakat sekaligus menjadikan Kabupaten Dharmasraya	Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	(10) Mengendalikan alih fungsi lahan sawah yang ada dengan regulasi dan memberikan insentif produksi bagi petani. Kebijakan didukung dengan penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada area beririgasi teknis. (11) Menambah luas lahan sawah D.I. Batanghari seluas 1.715 Ha dalam jangka menengah dan mencapai 5.000 Ha dalam jangka panjang. (12) Meningkatkan pengairan D.I. kabupaten yang tersebar pada kecamatan di Kabupaten Dharmasraya dan revitalisasi sawah pada lahan lebih kurang 3.500 Ha.
	5. Peningkatan produksi dan produktifitas padi sawah untuk memantapkan peran Kabupaten Dharmasraya dalam mendukung ketahanan pangan. 6. Berkembangnya klaster agribisnis hortikultura berdaya saing tinggi.	(13) Mengembangkan agribisnis hortikultura buah-buahan khas daerah seperti: manggis, duku, durian

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
<p>sebagai pusat pengembangan ekonomi bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat.</p>		<p>dan salak dengan pola klaster.</p>
	<p>Bidang Perikanan</p> <p>7. Berkembangnya kawasan minapolitan Kabupaten Dharmasraya sebagai salah satu sentra perikanan darat pada wilayah Sumatera Barat bagian tenggara.</p>	<p>(14) Meningkatkan produksi perikanan sehingga memiliki kontribusi besar pada produksi wilayah Sumatera Barat bagian tenggara (yang meliputi Kabupaten Solok, Solok Selatan, Sijunjung dan Dharmasraya) mencapai lebih 300%.</p> <p>(15) Mengembangkan dan membangun prasarana sarana pendukung kawasan minapolitan (balai benih, balai penelitian, pasar minapolitan).</p>
	<p>Bidang Perkebunan</p> <p>8. Berkembangnya usaha perkebunan rakyat yang maju dan mandiri.</p>	<p>(16) Meningkatkan produksi dan produktifitas produk unggulan karet, kelapa sawit dan komoditi lainnya seperti kopi dan kakao.</p> <p>(17) Peremajaan tanaman perkebunan sawit dan karet.</p> <p>(18) Membangun pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dengan kapasitas PKS 150 ton/jam.</p> <p>(19) Membangun pabrik pengolahan industri hilir makanan (minyak goreng) untuk pasar Sumatera Barat dan wilayah sekitar.</p> <p>(20) Mengembangkan pengolahan karet dalam bentuk slab dan sheet ditingkat petani dan pengolahan lebih lanjut produk karet.</p> <p>(21) Mengembangkan komoditi potensial perkebunan lainnya seperti kakao dan kopi untuk mendukung ketahanan ekonomi wilayah.</p> <p>(22) Mengembangkan industri rakyat skala mikro dan kecil berbasis pengolahan sumber daya pertanian (sawit, karet, kopi dan kakao).</p> <p>(23) Mengembangkan pasar lelang agro hasil perkebunan.</p> <p>(24) Membangun pola investasi usaha budidaya perkebunan dan industri yang mendorong kemandirian petani dengan melibatkan potensi pengelolaan dan pembiayaan yang ada di daerah (seperti lembaga perbankan, kelompok tani, koperasi, nagari, pemerintah).</p> <p>(25) Meningkatkan akses menghubungkan kawasan budidaya perkebunan dengan jalur transportasi regional.</p>
	<p>Bidang Peternakan</p>	<p>(26) Memberdayakan petani peternak</p>

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
	9. Berkembangnya budidaya sapi potong dengan strategi utama pengembangan integrasi kelapa sawit - sapi potong.	dalam budidaya sapi potong mencapai minimal 2 kali lipat dari jumlah sapi sekarang (mencapai minimal 50.000 ekor). (27) Mengembangkan dan melengkapi sarana pendukung sentra peternakan (pasar ternak, rumah potong hewan, puskesmas dan sarana lainnya).
	Bidang Pertambangan 10. Berkembangnya kegiatan pertambangan dan pengolahan hasil tambang yang berkelanjutan dan memberi manfaat yang besar untuk kesejahteraan masyarakat.	(28) Mengorientasikan kegiatan pertambangan yang memberi dampak besar kepada kesejahteraan masyarakat (29) Mengembangkan eksploitasi pertambangan yang ramah lingkungan. (30) Mengembangkan industri pengolahan hasil tambang. (31) Melakukan reklamasi lahan yang bermanfaat bagi masyarakat.
	11. Berkembangnya usaha skala mikro kecil dan menengah (UMKM) prospektif	(32) Percepatan peningkatan produksi dan pasar industri dan usaha skala mikro, kecil dan menengah prospektif.
Misi 3 : Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	12. Terjaganya kelestarian kawasan hutan berfungsi lindung di Kabupaten Dharmasraya.	(33) Mengembangkan kegiatan usaha pemanfaatan nilai ekonomi hutan kayu dan non kayu secara lestari bagi penduduk sekitar. (34) Pengembangan industri hasil hutan.
	13. Terkendalinya pemanfaatan lahan budidaya sesuai aturan tata ruang	(35) Menjaga kualitas dan debit air sungai Batanghari (36) Minimalnya kerawanan bencana longsor dan erosi lahan. (37) Mengarahkan kegiatan budidaya pertanian dan eksploitasi pertambangan sesuai dengan rencana zonasi/tata ruang.
Misi 4 : Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi	14. Berkembangnya fungsi sosial-budaya dan sosial-ekonomi nagari.	(38) Memperkuat fungsi nagari sebagai pelaku kegiatan sosial-budaya.
	15. Meningkatnya kemandirian ekonomi terkait pengelolaan usaha, distribusi barang, pengolahan hasil, dan pemasaran.	(39) Mengembangkan fungsi nagari sebagai pelaku sosial-ekonomi. (40) Memberdayakan berbagai lembaga pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat.
Misi 5 : Menyediakan berbagai sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi dan sosial yang mampu mendorong perkembangan ekonomi dan mewujudkan pemerataan pembangunan	16. Tersedianya pusat perdagangan dan jasa untuk pelayanan internal daerah serta menjadikan Kabupaten Dharmasraya sebagai orientasi perdagangan dan jasa di wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat dan sekitarnya.	(41) Revitalisasi pasar-pasar nagari sebagai tempat pemenuhan kebutuhan harian penduduk yang nyaman.
		(42) Pengembangan pasar tematik (berupa pasar lelang agro hasil perkebunan, pasar agropolitan ternak, dan pasar minapolitan) untuk mendukung fungsi Kabupaten Dharmasraya sebagai sentra produksi perkebunan, peternakan, dan perikanan.
		(43) Mengembangkan pusat perdagangan dan jasa di kawasan Sungai Rumbai, Koto Baru, Pulau Punjung, kawasan perkotaan yang berprospek

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
antar kawasan.		berkembang dimasa depan seperti Padang Laweh serta rest area pada koridor Jalan Lintas Sumatera.
	17. Terpenuhinya sarana prasarana untuk mengentaskan kawasan tertinggal.	(44) Menyediakan sarana prasarana nagari tertinggal
	18. Berkembangnya kawasan dan objek wisata dan rekreasi dan tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) serba guna.	(45) Membangun: <ul style="list-style-type: none"> - Kawasan terpadu wisata alam-budaya serta - Taman rekreasi bertema (<i>theme park</i>). (46) Mengembangkan objek wisata dan rekreasi prioritas kawasan. (47) Membangun RTH serbaguna pada tingkatan kabupaten, kecamatan dan nagari (untuk kegiatan olahraga dan kegiatan sosial).
	19. Terpenuhinya kebutuhan prasarana energi, telekomunikasi, air bersih dan sanitasi lingkungan permukiman minimal mencapai standar pelayanan minimal.	(48) Meningkatkan akses pelayanan listrik di seluruh kabupaten dengan alternatif peluang memanfaatkan energi baru dan terbarukan (seperti mikrohidro dan tenaga surya). (49) Meningkatkan akses terhadap sumber air minum di perkotaan dan perdesaan minimal mencapai standar MDGs. (50) Terlayaninya air bersih perpipaan pada kawasan cepat tumbuh (Pulau Punjung – Sitiung – Kotobaru dan Sungai Rumbai). (51) Menuju Kabupaten Dharmasraya sehat lingkungan dengan meningkatkan pelayanan sanitasi dan penyehatan lingkungan permukiman. <ul style="list-style-type: none"> – Meningkatkan jumlah rumah tangga perkotaan dan perdesaan dengan akses sanitasi layak minimal mencapai standar MDGs. – Melengkapi kebutuhan prasarana sanitasi dengan membangun sarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). – Meningkatkan pelayanan persampahan pada pusat-pusat kegiatan perdagangan dan pemerintahan dengan dukungan sarana pelayanan persampahan yang memadai yang mampu melayani wilayah bagian utara dan selatan kabupaten. (52) Mengurangi keberadaan lingkungan permukiman dan perumahan kumuh dan tidak layak huni.
20. Tersedianya dukungan prasarana sumber daya air pendukung kegiatan produktif.	(53) Membangun Prasarana Pengairan <ul style="list-style-type: none"> – Pengembangan jaringan irigasi dalam D.I. Batanghari dan D.I. Kabupaten. – Mengembangkan manajemen air 	

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
		irigasi yang handal.
	21. Tingginya tingkat keterjangkauan (aksesibilitas) antar kawasan di daerah.	(54) Membangun jaringan transportasi antar kawasan. <ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan akses menuju pusat-pusat kegiatan pelayanan dan kawasan pertanian. - Membangun prasarana terminal pada pusat perdagangan. - Mengembangkan moda transportasi sungai Batanghari sebagai bagian atraksi wisata alam dan budaya.
	22. Terjalannya konektivitas wilayah Kabupaten Dharmasraya dan kabupaten sekitarnya (Kabupaten Solok Selatan, Sijunjung, Kuantan Singingi, Bungo, dan Tebo) dengan pusat kegiatan ekonomi koridor Pulau Sumatera.	(55) Membangun jaringan transportasi antar wilayah untuk akses ekonomi menuju koridor timur Pulau Sumatera dan kabupaten berbatasan. <ul style="list-style-type: none"> - Membangun akses menghubungkan kabupaten Dharmasraya dengan kawasan pengembangan ekonomi koridor timur Pulau Sumatera sebagai sentra pengembangan perkebunan dan lumbung energi (batu bara). - Mengembangkan akses jalan lingkaran utara dan selatan Kabupaten Dharmasraya untuk menghubungkan pusat-pusat kegiatan wilayah dan mengurangi beban jalan Lintas Sumatera. - Mengembangkan akses menuju wilayah kabupaten yang berbatasan yaitu dengan Kabupaten Solok Selatan; Kabupaten Sijunjung; Kabupaten Tebo; Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Bungo; - mengkaji lebih lanjut peluang alternatif moda transportasi udara
Misi 6 : Menegakkan kehidupan beragama dan beradat sebagai norma sosial dan semangat membangun serta melestarikan identitas daerah.	23. Tetap berperannya adat dan tradisi serta lestariannya identitas daerah.	(56) Memperkuat peran adat dalam pengelolaan tanah ulayat dan peri kehidupan masyarakat. (57) Melestarikan situs budaya dan pemanfaatannya sebagai objek wisata.
	24. Mewujudkan kehidupan yang religius.	(58) Mengembangkan kegiatan keagamaan di sekolah dan nagari.
Misi 7 : Mewujudkan tata kelola pembangunan yang andal dan maju serta melibatkan semua potensi peran kelembagaan daerah yang mampu membangun	25. Terbangunnya sistem perencanaan prioritas pembangunan daerah yang baku dan konsisten.	(59) Menyusun dan menyelenggarakan standar prosedur dan metoda baku sebagai pedoman penentuan prioritas pembangunan.
	26. Tersedianya sistem informasi pengelolaan pembangunan daerah yang akurat untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.	(60) Membangun basis data dan informasi pembangunan nagari. (61) Membangun sistem informasi pembangunan kabupaten berbasis teknologi informasi.
	27. Berkembangnya pola investasi pembangunan berbasis	(62) Membangun pola investasi usaha yang melibatkan potensi pengelolaan dan

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
manfaat yang besar, kemandirian dan keadilan dalam pembangunan.	kemandirian daerah.	pembiayaan yang ada di daerah (seperti lembaga perbankan, kelompok tani, koperasi, badan usaha pemerintah, nagari, dan CSR).
	28. Terbangunnya mekanisme pengendalian tata ruang yang efektif.	(63) Mengefektifkan aspek perijinan, pengawasan dan sanksi dalam pengendalian tata ruang terkait dengan pembangunan perumahan dan permukiman, alih fungsi lahan sawah dan kawasan hutan, serta lokasi kegiatan pertambangan.

5.2 Tahapan dan Prioritas Pembangunan

Tahapan dan prioritas pembangunan merupakan skenario pencapaian visi dan misi jangka panjang dalam periode 5 tahunan. Periode rencana jangka panjang dibagi 4 yaitu: periode I (2005-2010); periode II (2010-2015); periode III (2015-2020); periode IV (2020-2025). Dengan catatan Periode I adalah periode yang telah dilewati dan periode II sebagian sedang berjalan.

Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

Tahapan dan prioritas pembangunan merupakan penyederhanaan pembagian pencapaian visi misi pembangunan jangka panjang dalam bentuk fokus tema atau agenda pembangunan dalam setiap periode jangka menengah (5 tahun).

5.2.1 Prioritas Pembangunan Tahap I (2005-2010)

Pembangunan Kabupaten Dharmasraya dalam periode ini telah membawa perubahan berupa peningkatan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan penduduk kabupaten. Beberapa pencapaian dalam periode ini yaitu secara ekonomi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya termasuk tinggi di Provinsi Sumatera Barat; pembangunan infrastruktur jalan meningkat pesat; program pembangunan dibidang kesejahteraan sosial telah meningkat dengan laju pertumbuhan yang cukup tinggi meskipun pencapaiannya beberapa indikator kesejahteraan seperti IPM masih dibawah rata-rata Sumatera Barat. Dari evaluasi terlihat benang merah prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya yaitu:

Mengembangkan berbagai potensi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial dalam mengejar ketertinggalan dari daerah lain sebagai titik awal pembangunan sejak pemekaran wilayah.

5.2.2 Prioritas pembangunan Tahap II (2010-2015)

Prioritas pembangunan tahap II yaitu:

Menyiapkan landasan percepatan pembangunan Kabupaten Dharmasraya dan pemerataan pembangunan dengan membangun infrastruktur, kelembagaan tata kelola pembangunan yang maju dan peningkatan kualitas manusia.

Fokus tema/agenda pembangunan yang dilakukan pada tahap II yaitu:

- a. Memperkuat sistem perencanaan pembangunan agar terwujud konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.
- b. Membangun basis data dan informasi pembangunan nagari
- c. Membangun sistem informasi pembangunan kabupaten berbasis teknologi informasi
- d. Menyiapkan perangkat regulasi dan kelembagaan investasi pembangunan.
- e. Melakukan percepatan pemerataan pembangunan wilayah dengan memprioritaskan pembangunan kawasan tertinggal dan akses penduduk menuju pusat pelayanan.
- f. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat agar ranking IPM Kabupaten Dharmasraya di Provinsi Sumatera Barat meningkat.
- g. Pemberdayaan pengembangan ekonomi masyarakat.
- h. Membangun sarana prasarana pendukung produksi, pengolahan dan pemasaran.

5.2.3 Prioritas pembangunan Tahap III (2015-2020)

Prioritas pembangunan tahap III yaitu:

Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana dan mengembangkan kemandirian ekonomi daerah.

Fokus tema/agenda pembangunan yang dilakukan pada tahap III yaitu:

- a. Membangun lebih lanjut sarana dan prasarana produksi, pengolahan dan pemasaran.
- b. Meningkatkan kemampuan nagari dan masyarakat dalam pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi.
- c. Mengembangkan lebih lanjut produksi dan pengolahan hasil produksi untuk mendukung kemandirian perekonomian rakyat.
- d. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat agar ranking IPM Kabupaten Dharmasraya mencapai rata-rata Provinsi Sumatera Barat.

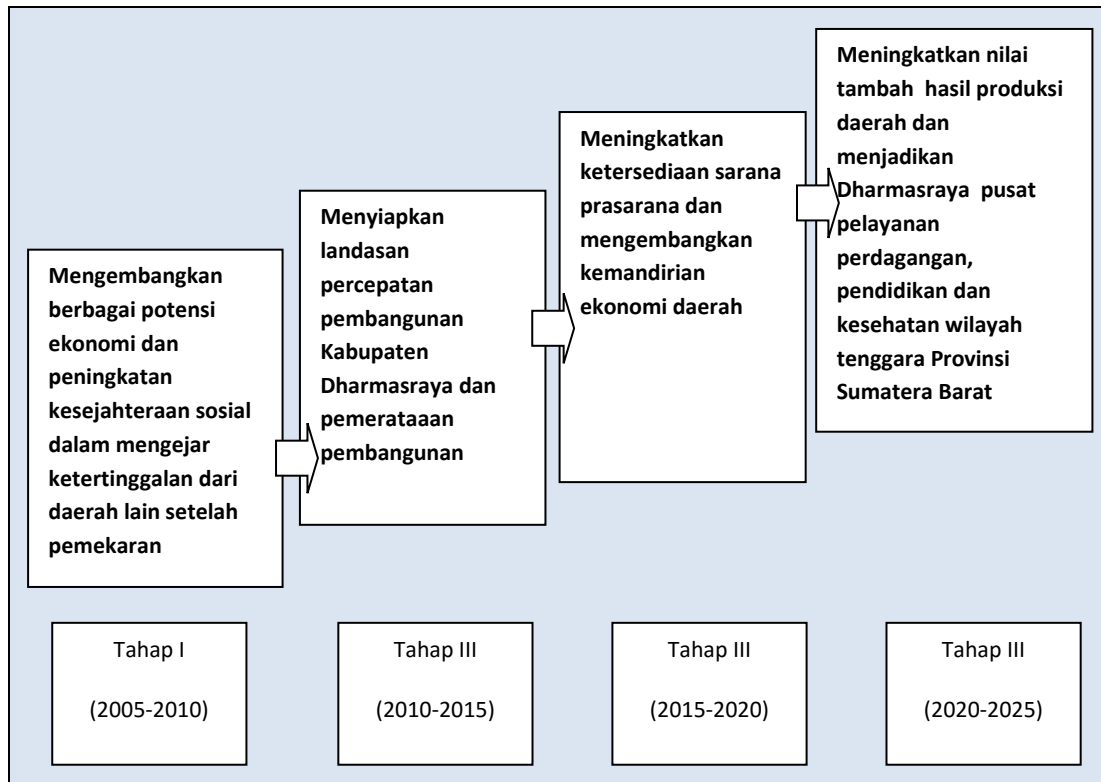
5.2.4 Prioritas pembangunan Tahap IV (2020-2025)

Meningkatkan nilai tambah hasil produksi daerah dan menjadikan Dharmasraya pusat pelayanan perdagangan, pendidikan dan kesehatan wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat.

Fokus tema/agenda pembangunan yang dilakukan pada tahap IV yaitu:

- Mengembangkan nilai tambah hasil pertanian dan pertambangan.
- Mengembangkan pasar sebagai usaha mewujudkan Kabupaten Dharmasraya sebagai pusat perdagangan.
- Mengembangkan lebih lanjut kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan wisata kabupaten sebagai pusat pertumbuhan wilayah.

Gambar 5.1: Tema/Agenda Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025



Tabel 5.2: Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Dharmasraya 2005-2025

No	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja Pembangunan (Tahun 2011)	Target				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				Tahap I (2005-2010)	Tahap II (2010-2015)	Tahap III (2015-2020)	Tahap IV (2020-2025)	
A.	URUSAN PENDIDIKAN							
1	Tercapainya penurunan laju pertumbuhan penduduk							
	1. Menggalakkan program Keluarga Berencana.	Jumlah peserta KB dan Laju pertumbuhan Penduduk (LPP)	Peserta keluarga KB aktif 14,5%. LPP 3,09% (2 kali lipat LPP nasional 1,49%; LPP sumbar 1,34%)	Konsolidasi program keluarga Berencana	Meningkatnya peserta KB aktif	Meningkatnya peserta KB aktif. LPP Menurun kurang dari 3%	Meningkatnya peserta KB aktif. LPP menurun mencapai kurang 2,5 %	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peserta Keluarga KB aktif termasuk tinggi di Provinsi Sumbar ▪ LPP dalam kategori sedang
2	Meningkatnya nilai IPM mencapai rata-rata provinsi Sumatera Barat		69,13 (Urutan 17 dari 19 daerah)	Konsolidasi pembangunan sosial	Meningkat (satu tingkat)	Menengah (meningkat 2 tingkat mendekati rata-rata Sumatera Barat)	Menengah (Rata-rata Sumatera Barat)	Pada rata-rata Sumatera Barat
	2. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara promotif dan preventif.	Angka harapan hidup	66 tahun (terendah di Sumatera Barat)	Konsolidasi pembangunan kesehatan	Peningkatan program pembangunan kesehatan	Peningkatan program pembangunan kesehatan	Meningkat (mendekati rata-rata Sumatera Barat)	Mendekati rata-rata Sumatera Barat
	3. Meningkatkan partisipasi pendidikan pada tingkat SD, SMP, dan SMA.	Rata-rata lama sekolah	7,77 tahun (urutan ke 8 dari 12 kabupaten)	Meningkat	Meningkat (satu tingkat)	Menengah (meningkat 2 tingkat mendekati rata-rata Sumatera Barat)	Menengah (rata-rata Sumatera Barat)	Pada rata-rata Sumatera Barat

No	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja Pembangunan (Tahun 2011)	Target				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				Tahap I (2005-2010)	Tahap II (2010-2015)	Tahap III (2015-2020)	Tahap IV (2020-2025)	
4.	Memeratakan akses sarana sekolah pada setiap kecamatan.	Meratanya akses sarana pendidikan	Masih ada 5 kecamatan tanpa sarana SMA dan akses yang jauh untuk sarana lainnya.	Pembangunan di kecamatan prioritas	Pembangunan di 1-2 kecamatan prioritas	Pembangunan di 1-2 kecamatan prioritas	Pembangunan di 1-2 kecamatan prioritas	Tersedianya sarana pendidikan menengah dalam radius akses pelajar di tiap kecamatan.
5.	Meningkatkan kualitas sekolah	Standar sekolah	Belum ada sekolah berstandar nasional	Perintisan sekolah	Adanya sekolah berstandar nasional	Meningkatnya jumlah sekolah	Meningkatnya jumlah sekolah	Dominannya jumlah sekolah berstandar nasional
6.	Membebaskan kabupaten dari buta huruf.	Angka melek huruf	96,38% (urutan ke 8 dari 12 kabupaten)	Meningkat	Meningkat 1 tingkat	Meningkat 2 tingkat	100%	Bebas buta huruf
7.	Peningkatan kualitas keluarga	Jumlah keluarga miskin	Keluarga miskin 10,56%	Menurun	menurun	menurun	menurun	Jumlah keluarga miskin berkurang dengan signifikan
		Pengeluaran per kapita rata-rata penduduk	Urutan 18 di Sumatera Barat	Meningkat	Meningkat 1 tingkat	Meningkat 2 tingkat	Menengah (rata-rata Sumatera Barat)	Pada rata-rata Sumatera Barat <i>(pencapaian kinerja pengeluaran per kapita bagian dari kinerja misi lain terutama misi ke-2 memanfaatkan sumberdaya alam)</i>
3	Terlayannya pelayanan pendidikan dan kesehatan di nagari tertinggal.							
8.	Menyediakan pelayanan pendidikan dan kesehatan di nagari tertinggal.	Pelayanan dasar nagari tertinggal dan terpencil	31 nagari tertinggal dan 16 nagari terpencil	Prioritas program pembangunan nagari tertinggal dan sangat terpencil	Berkurangnya 5-10 nagari tertinggal dan sangat terpencil	Berkurangnya 5-10 nagari tertinggal dan sangat terpencil	Berkurangnya 5-10 nagari tertinggal dan sangat terpencil	Terbebaskannya nagari dari ketertinggalan dan keterpencilan akses pendidikan dan kesehatan dasar
4	Tercapainya Kabupaten Dharmasraya sebagai pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan di wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat							
9.	Mengembangkan pelayanan kesehatan dan pendidikan skala	Kelengkapan sarana prasarana dan sumber daya	Orientasi pelayanan kesehatan penduduk kabupaten sebagian	Melengkapi sarana prasarana dan sumberdaya	Lengkapya sarana prasarana dan sumberdaya	Pelayanan penduduk lokal	Pelayanan lokal dan wilayah sekitar	Kabupaten Dharmasraya menjadi bagian orientasi pelayanan kesehatan

No	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja Pembangunan (Tahun 2011)	Target				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				Tahap I (2005-2010)	Tahap II (2010-2015)	Tahap III (2015-2020)	Tahap IV (2020-2025)	
	regional dengan: – peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas dan rumah sakit untuk pelayanan wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat dan sekitarnya – mengembangkan lembaga pendidikan tinggi dan kejuruan khususnya bidang pertanian dan kesehatan	manusia bidang kesehatan yang berkualitas Pelayanan pendidikan tinggi dan kejuruan untuk wilayah sekitar	masih keluar kabupaten Pelayanan lokal	kesehatan Perintisan pendidikan tinggi	kesehatan Berkembangnya pendidikan tinggi			wilayah tenggara Sumatera Barat dan sekitarnya. Kabupaten Dharmasraya menjadi bagian orientasi pendidikan wilayah tenggara Sumatera Barat dan sekitarnya.
5	Peningkatan produksi dan produktifitas padi sawah untukmemantapkan peran Kabupaten Dharmasraya dalam mendukung ketahanan pangan							
	10. Mengendalikan alih fungsi lahan sawah yang ada dengan regulasi dan memberikan insentif produksi bagi petani.	Pengendalian alih fungsi lahan sawah ke fungsi lain	Kecenderungan adanya alih fungsi lahan	Berkurang	Berkurang	Berkurang	Berkurang	Bertahannya luas sawah eksisiting
	11. Menambah luas lahan sawah D.I. Batanghari seluas 1.715 Ha dalam jangka menengah dan mencapai 5.000 Ha dalam jangka panjang.	Luas sawah Produktifitas sawah	Luas sawah 9.278 Ha (D.I. Batanghari 5.782 Ha dan lainnya 3.500 Ha). Produksi 50.713 Ha dengan produktifitas rata-rata 4,9 ton/Ha.	Penambahan luas sawah D.I. Batanghari 1.715 Ha dan peningkatan luas dan pengairan irigasi lainnya	Penambahan luas sawah D.I. Batanghari 1.715 Ha dan peningkatan luas dan pengairan irigasi lainnya	Penambahan luas sawah D.I. Batanghari dan peningkatan luas dan pengairan irigasi lainnya	Penambahan luas sawah D.I. Batanghari dan peningkatan luas dan pengairan irigasi lainnya	Bertambahnya luas sawah 1.715 Ha dalam jangka menengah dan mencapai 5.000 Ha dalam jangka panjang. Produktifitas meningkat menjadi 5,2 ton/ha. Produksi mencapai 74.270 ton (meningkat 146%).
	12. Meningkatkan pengairan D.I. kabupaten yang tersebar pada kecamatan di Kabupaten Dharmasraya dan revitalisasi sawah pada lahan lebih kurang 3.500 Ha.							

No	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja Pembangunan (Tahun 2011)	Target				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				Tahap I (2005-2010)	Tahap II (2010-2015)	Tahap III (2015-2020)	Tahap IV (2020-2025)	
6	Berkembangnya klaster agribisnis hortikultura berdaya saing tinggi							
	13. Mengembangkan agribisnis hortikultura buah-buahan khas daerah seperti: manggis, duku, durian dan salak dengan pola klaster	Produksi dan klaster	Belum berkembang	Studi kelayakan	Penjajakan dan persiapan pengembangan	Pengembangan produksi	Pengembangan agribisnis	Berkembangnya klaster. agribisnis hortikultura
7	Berkembangnya kawasan minapolitan Kabupaten Dharmasraya sebagai salah satu sentra perikanan darat pada wilayah Sumatera Barat bagian tenggara							
	14. Meningkatkan produksi perikanan sehingga memiliki kontribusi besar pada produksi wilayah Sumatera Barat bagian tenggara (yang meliputi Kabupaten Solok, Solok Selatan, Sijunjung dan Dharmasraya) mencapai lebih 300%.	Produksi bertambah 3 kali lipat	Produksi perikanan budidaya 1.555 ton	Studi kelayakan	Penjajakan dan persiapan pengembangan	Pengembangan produksi	Pengembangan agribisnis	Berkembangnya agribisnis kawasan minapolitan dengan produksi lebih 4.650 ton.
	15. Mengembangkan dan membangun prasarana sarana pendukung kawasan minapolitan	Ketersediaan sarana prasarana pendukung	Sebagian sarana telah tersedia	Studi kelayakan	Peningkatan	Peningkatan dan pembangunan	Peningkatan dan pembangunan	Berkembangnya prasarana sarana pendukung kawasan minapolitan (balai benih, balai penelitian, pasar minapolitan).

No	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja Pembangunan (Tahun 2011)	Target				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				Tahap I (2005-2010)	Tahap II (2010-2015)	Tahap III (2015-2020)	Tahap IV (2020-2025)	
8	Berkembangnya usaha perkebunan rakyat yang maju dan mandiri							
	16. Meningkatkan produksi dan produktifitas produk unggulan (karet, kelapa sawit dan komoditi lainnya seperti kopi dan kakao)	Produksi dan produktifitas	Produktifitas belum optimal. Masih tersedia lahan pengembangan.	Meningkatkan produktifitas dan ekstensifikasi lahan	Meningkatkan produktifitas dan ekstensifikasi lahan	Meningkatkan produktifitas dan ekstensifikasi lahan	Meningkatkan produktifitas	Produksi meningkat. Produktifitas sesuai standar nasional.
	17. Peremajaan tanaman perkebunan sawit dan karet.	Berkembangnya industri pengolahan olahan kayu peremajaan karet	Belum berkembang	Perintisan	Penjajakan dan persiapan Pengembangan	Pengembangan	Pengembangan	Terdapat industri pengolahan kayu karet untuk lebih kurang 316.800 m3/tahun
	18. Membangun pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dengan kapasitas PKS 150 ton/jam.	Kapasitas pabrik pengolahan sawit	Kapasitas 290 ton/jam	Perintisan	Pembangunan pabrik kapasitas 30 ton/jam	Lanjutan pembangunan pabrik	Lanjutan pembangunan pabrik	Tersedianya pabrik kelapa sawit dengan kapasitas mencapai 440 ton/jam
	19. Membangun pabrik pengolahan industri hilir untuk pasar Sumatera Barat dan wilayah sekitar.	Terbangunnya pabrik	Belum terbangun	Perintisan	Penjajakan	Pembangunan pabrik hilir	Peningkatan produksi	Tersedianya pabrik pengolahan hilir makanan dari sawit(seperti minyak goreng)
	20. Mengembangkan pengolahan karet dalam bentuk slab dan sheet ditingkat petani dan pengolahan	Pengolahan karet oleh petani	Belum berkembangnya pengolahan karet	Perintisan/pilot project	Sosialisasi dan pemberdayaan	Berkembang	Meningkat	Berkembangnya pengolahan karet

No	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja Pembangunan (Tahun 2011)	Target				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				Tahap I (2005-2010)	Tahap II (2010-2015)	Tahap III (2015-2020)	Tahap IV (2020-2025)	
	lebih lanjut produk karet.		dalam bentuk slab dan sheet ditingkat petani					ditingkat petani.
21.	Mengembangkan komoditi potensial perkebunan lainnya seperti kakao dan kopi untuk mendukung ketahanan ekonomi wilayah.	Produksi komoditi lain (seperti kopi dan kakao)	Luas kopi: 459 Ha, produktif 423 Ha. Luas kakao: 1.693 Ha, produktif 652 Ha	Peningkatan produksi dan produktifitas	Peningkatan produksi dan produktifitas	Pengembangan pengolahan hasil.	Berkembangnya Pengolahan hasil produksi.	Berkembangnya produksi dan pengolahan hasil komoditi perkebunan lain (kopi dan kakao).
22.	Mengembangkan industri rakyat skala mikro dan kecil berbasis pengolahan sumber daya pertanian (sawit, karet, kopi dan kakao).	Perkembangan industri pengolahan skala mikro dan kecil	Belum banyak berkembang	Perintisan	Stimulasi dan pemberdayaan	Berkembang	Peningkatan	Berkembangnya industri rakyat dalam pengolahan hasil perkebunan (sawit, karet, kopi dan kakao).
23.	Mengembangkan pasar lelang agro hasil perkebunan.	Perkembangan pasar lelang agro hasil perkebunan	Sudah terbangun fisik pasar agro untuk komoditi sawit	Pembangunan pasar	Pemantapan kelembagaan pasar	Peningkatan kapasitas pasar	Peningkatan kapasitas pasar	Berkembangnya kegiatan pasar agro hasil perkebunan yang menguntungkan petani.
24.	Membangun pola investasi usaha budidaya perkebunan dan industri yang mendorong kemandirian petani dengan melibatkan potensi pengelolaan dan pembiayaan yang ada di daerah.	pelibatan potensi pengelolaan dan pembiayaan yang ada di daerah	Pola investasi yang memberi manfaat sosial besar masih belum terbentuk	Perintisan	Studi alternatif pola investasi	Penerapan pola	Penerapan pola	Berkembangnya pola investasi yang memberi manfaat sosial yang besar.
25.	Meningkatkan akses menghubungkan kawasan budidaya perkebunan dengan jalur transportasi regional.	Penambahan biaya akibat kurangnya akses jalan	Harga jual hasil perkebunan ditingkat petani rendah karena	Peningkatan akses jalan	Peningkatan harga akibat Peningkatan akses jalan	Peningkatan harga akibat Peningkatan akses jalan	Peningkatan harga akibat Peningkatan akses	Tidak terdapat masalah harga jual akibat akses jalan area perkebunan.

No	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja Pembangunan (Tahun 2011)	Target				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				Tahap I (2005-2010)	Tahap II (2010-2015)	Tahap III (2015-2020)	Tahap IV (2020-2025)	
		perkebunan	akses yang buruk				jalan	
9	Berkembangnya budidaya sapi potong dengan strategi utama pengembangan integrasi kelapa sawit - sapi potong.							
	26. Memberdayakan petani peternak dalam budidaya sapi potong.	Jumlah sapi bertambah minimal 2 kali lipat	Jumlah sapi potong 25.773 ekor	Perintisan	Sosialisasi dan pemberdayaan	Peningkatan jumlah sapi setengah dari kondisi awal	Peningkatan jumlah sapi 2 kali lipat kondisi awal	Jumlah sapi mencapai lebih 50.000 ekor.
	27. Mengembangkan dan melengkapi sarana pendukung sentra peternakan (pasar ternak, rumah potong hewan, puskesmas).	Ketersediaan sarana prasarana pendukung	Sudah terdapat pasar ternak, rumah potong hewan.	Pembangunan	Peningkatan ketersediaan sarana prasarana	Terlengkapinya ketersediaan sarana prasarana	Optimalisasi pemanfaatan	Berfungsi optimalnya sarana pendukung sentra peternakan
10	Berkembangnya kegiatan pertambangan dan pengolahan hasil tambang yang berkelanjutan dan memberi manfaat yang besar untuk kesejahteraan masyarakat							
	28. Mengorientasikan kegiatan pertambangan yang memberi dampak besar kepada kesejahteraan masyarakat	Pendapatan pemerintah, nagari dan masyarakat	Belum optimalnya pertambangan yang terorganisir dan terkendali.	Perintisan	Penjajakan dan persiapan peraturan dan alokasi kawasan	Eksplorasi dan kegiatan lanjut	Eksplorasi dan kegiatan lanjut	Pertambangan yang memberi dampak besar bagi Pemda, nagari dan masyarakat
	29. Mengembangkan eksploitasi pertambangan yang ramah lingkungan.	Eksploitasi dengan teknologi ramah lingkungan	Penerapan belum optimal	Perintisan	Penerapan (pilot project)	Penerapan	Penerapan	Eksplorasi tambang yang ramah lingkungan

No	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja Pembangunan (Tahun 2011)	Target				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				Tahap I (2005-2010)	Tahap II (2010-2015)	Tahap III (2015-2020)	Tahap IV (2020-2025)	
	30. Mengembangkan industri pengolahan hasil tambang.	Terbangunnya industri	Belum terbangun	Perintisan	Penjajakan investasi	Pembangunan	Pembangunan	Berkembangnya industri pengolahan hasil tambang di Kabupaten.
	31. Melakukan reklamasi lahan yang bermanfaat bagi masyarakat.	Luas lahan direklamasi	Belum berlangsung	Perintisan	inventarisasi	Kegiatan reklamasi	Kegiatan reklamasi	Reklamasi lahan yang bermanfaat secara ekonomi bagi masyarakat.
11	Berkembangnya usaha skala mikro kecil dan menengah (UMKM)							
	32. Percepatan peningkatan produksi dan pasar usaha skala mikro, kecil dan menengah prospektif.	Perkembangan produksi dan pasar industri dan usaha prospektif.	Kecenderungan perkembangan lambat	Studi industri prospektif	Stimulasi perkembangan industri prospektif	Peningkatan	Peningkatan	Berkembangnya industri dan usaha skala mikro, kecil dan menengah prospektif
12	Terjaganya kelestarian kawasan hutan berfungsi lindung di Kabupaten Dharmasraya							
	33. Mengembangkan kegiatan usaha pemanfaatan nilai ekonomi hutan kayu dan non kayu secara lestari bagi penduduk sekitar.	Tutupan vegetasi hutan pada kawasan hutan berfungsi lindung seluas 17.368 Ha (5,74%).	Tutupan hutan dengan vegetasi primer 7.290 Ha.	Reboisasi	Reboisasi dan pemanfaatan hasil hutan	Reboisasi dan pemanfaatan hasil hutan	Reboisasi dan pemanfaatan hasil hutan	Terwujudnya kawasan hutan berfungsi lindung dengan tutupan vegetasi yang dapat dimanfaatkan hasil hutannya secara lestari.
	34. Pengembangan industri hasil hutan.	Berkembangnya produksi dan pengolahan hasil	Masih pada tahap pengembangan awal	Perintisan	Sosialisasi dan pemberdayaanPen	Pengembangan	Pengembangan	Berkembangnya produksi dan pengolahan hasil hutan kayu dan non kayu

No	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja Pembangunan (Tahun 2011)	Target				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				Tahap I (2005-2010)	Tahap II (2010-2015)	Tahap III (2015-2020)	Tahap IV (2020-2025)	
		hutan kayu dan non kayu			gembangan			pada kawasan hutan
13	Terkendalinya pemanfaatan lahan budidaya sesuai aturan tata ruang							
	35. Menjaga kualitas dan debit air sungai Batanghari	Terjaganya kualitas dan debit sungai Batanghari	Indikasi pencemaran sungai Batanghari	Konsolidasi pengendalian kegiatan pertambangan	Penguatan peraturan dan kelembagaan Pengendalian kegiatan pertambangan	Terkendalinya kegiatan pertambangan	Terkendalinya kegiatan pertambangan	Air sungai Batanghari tidak mengandung bahan berbahaya bagi lingkungan dan debit terjaga.
	36. Minimalnya kerawanan bencana longsor dan erosi lahan.	Tingkat kerawanan bencana longsor/erosi lahan	Masih adanya kawasan rawan longsor/erosi lahan	Deliniasi kawasan rawan bencana	Terkendalinya perijinan dan pengawasan budidaya sesuai karakteristik lahan	Terkendalinya perijinan dan pengawasan budidaya sesuai karakteristik lahan	Terkendalinya perijinan dan pengawasan budidaya sesuai karakteristik lahan	Minimalnya kerawanan bencana longsor/erosi lahan
	37. Mengarahkan kegiatan budidaya pertanian dan eksploitasi pertambangan sesuai dengan rencana zonasi/tata ruang.	Kesesuaian dengan rencana zonasi/tata ruang	Masih terdapat eksploitasi tidak sesuai zonasi/tata ruang	Penguatan perangkat perijinan	Penataan zonasi dan pengawasan	Efektifnya pengawasan dan penindakan	Efektifnya pengawasan dan penindakan	Eksploitasi pertambangan sesuai dengan peraturan zonasi/tata ruang

No	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja Pembangunan (Tahun 2011)	Target				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				Tahap I (2005-2010)	Tahap II (2010-2015)	Tahap III (2015-2020)	Tahap IV (2020-2025)	
14	Berkembangnya fungsi sosial-budaya dan sosial-ekonomi nagari							
	38. Memperkuat fungsi nagari sebagai pelaku kegiatan sosial-budaya.	Fungsi sosial-budaya nagari	Fungsi terbatas	Pemberdayaan nagari	Pemberdayaan nagari	Berkembangnya fungsi sosial budaya pada beberapa nagari	Berkembangnya fungsi sosial budaya sebagian besar nagari	Nagari berfungsi sebagai unit sosial-budaya
15	Meningkatnya kemandirian ekonomi terkait pengelolaan usaha, distribusi barang, pengolahan hasil, dan pemasaran							
	39. Mengembangkan fungsi nagari sebagai pelaku sosial-ekonomi.	Fungsi sosial ekonomi- nagari	Fungsi terbatas	Pemberdayaan nagari	Pemberdayaan nagari	Berkembangnya fungsi sosial ekonomi pada beberapa nagari	Berkembangnya fungsi sosial ekonomi sebagian besar nagari	Nagari berfungsi sebagai unit sosial-ekonomi
		Jumlah lembaga pengelola kegiatan ekonomi (distribusi, pengolahan, jasa)	Terbatas	Pemberdayaan nagari	Pemberdayaan nagari	Meningkatnya jumlah lembaga pengelola ekonomi	Meningkatnya jumlah lembaga pengelola ekonomi	Pengelolaan ekonomi lebih mandiri tidak banyak bergantung kepada pelaku ekonomi luar.
	40. Memberdayakan berbagai lembaga pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat.	Peran kelembagaan ekonomi oleh kelompok masyarakat	Terbatas	Pemberdayaan kelompok	Pemberdayaan kelompok	Meningkatnya peran kelompok masyarakat	Meningkatnya peran kelompok masyarakat	Meningkatnya peran kelompok masyarakat dalam pengelolaan kegiatan ekonomi.
16	Tersedianya pusat perdagangan dan jasa untuk							

No	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja Pembangunan (Tahun 2011)	Target				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				Tahap I (2005-2010)	Tahap II (2010-2015)	Tahap III (2015-2020)	Tahap IV (2020-2025)	
	pelayanan internal daerah serta menjadikan Kabupaten Dharmasraya sebagai orientasi perdagangan dan jasa di wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat dan sekitarnya							
41.	Revitalisasi pasar-pasar nagari sebagai tempat pemenuhan kebutuhan harian penduduk yang nyaman.	Kelengkapan fisik pasar	Terdapat 28 pasar nagari	Perbaikan dan peningkatan pasar	Perbaikan dan peningkatan 5-10 pasar	Perbaikan dan peningkatan 5-10 pasar	Perbaikan dan peningkatan 5-10 pasar	Tersedianya pasar nagari yang nyaman dan sehat sebagai orientasi penduduk kawasan.
42.	Pengembangan pasar tematik untuk mendukung fungsi Kabupaten Dharmasraya sebagai sentra produksi perkebunan, peternakan, dan perikanan.	Kelengkapan fisik pasar dan kelembagaan	Telah terbangun pasar ternak dan pasar lelang sawit	Pembangunan fisik pasar	Peningkatan fisik dan penataan kelembagaan pemasaran	Pembangunan dan penataan kelembagaan	Pembangunan dan penataan kelembagaan	Berkembangnya pasar pendukung produksi perkebunan, peternakan, dan perikanan yang menguntungkan petani dan peternak (berupa pasar lelang agro hasil perkebunan, pasar agropolitan ternak, dan pasar minapolitan)
43.	Mengembangkan pusat perdagangan dan jasa di kawasan Sungai Rumbai, Koto Baru, Pulau Punjung, dan kawasan perkotaan yang berprospek berkembang dimasa depan seperti Padang Laweh serta rest area pada koridor Jalan Lintas Sumatera.	Orientasi perdagangan regional	Pasar masih bersifat lokal dengan jenis barang sekunder terbatas dan kebutuhan sehari-hari	Perbaikan dan pembangunan pusat perdagangan Kabupaten	Perbaikan dan pembangunan pusat perdagangan Kabupaten	Perbaikan dan pembangunan pusat perdagangan kabupaten dan pengembangan pusat perdagangan regional baru	Pengembangan pusat perdagangan regional baru	Orientasi perdagangan regional wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat sekitarnya ke pusat perdagangan dan jasa Kabupaten Dharmasraya.

No	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja Pembangunan (Tahun 2011)	Target				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				Tahap I (2005-2010)	Tahap II (2010-2015)	Tahap III (2015-2020)	Tahap IV (2020-2025)	
17	Terpenuhinya sarana prasarana fisik untuk mengentaskan kawasan tertinggal							
	44. Menyediakan sarana prasarana nagari tertinggal	Nagari tertinggal dan terpencil secara fisik	31 nagari tertinggal dan 16 nagari terpencil	Perintisan Pembangunan sarana dan prasarana fisik nagari tertinggal dan sangat terpencil	Pembangunan sarana dan prasarana fisik 5-10 nagari tertinggal dan sangat terpencil	Pembangunan sarana dan prasarana fisik 5-10 nagari tertinggal dan sangat terpencil	Pembangunan sarana dan prasarana fisik 5-10 nagari tertinggal dan sangat terpencil	Terentaskannya nagari tertinggal dan terpencil dalam aspek ketersediaan sarana prasarana.
18	Berkembangnya kawasan dan objek wisata dan rekreasi dan tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) serba guna							
	45. Membangun kawasan terpadu wisata alam-budaya serta taman rekreasi bertema (<i>theme park</i>).	Berkembangnya kawasan	Belum ada fokus pengembangan	Identifikasi kawasan	Perencanaan	Pengembangan kawasan	Pengembangan kawasan	Berkembangnya: – kawasan cagar dan objek budaya. – taman rekreasi bertema.
	46. Mengembangkan objek wisata dan rekreasi kawasan prioritas.	Terpenuhinya kebutuhan rekreasi penduduk	Objek wisata dan rekreasi yang telah ramai dimanfaatkan Batu Bakawik dan	Identifikasi kawasan	Pengembangan objek wisata dan rekreasi pada kaw. prioritas	Pengembangan objek wisata dan rekreasi pada kaw. prioritas	Pengembangan objek wisata dan rekreasi pada kaw. prioritas	Berkembangnya Ruang Terbuka Hijau Rekreatif pada setiap klaster kawasan.

No	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja Pembangunan (Tahun 2011)	Target				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				Tahap I (2005-2010)	Tahap II (2010-2015)	Tahap III (2015-2020)	Tahap IV (2020-2025)	
			Danau Cinta.					
	47. Membangun RTH serbaguna pada tingkatan kabupaten, kecamatan dan nagari (untuk kegiatan olahraga dan kegiatan sosial).	Sarana olahraga multifungsi tingkat kabupaten, kecamatan, dan nagari	Belum tersedia	Perencanaan awal	Pembangunan stadion dan GOR tingkat kabupaten	Pembangunan tingkat kecamatan dan nagari	Pembangunan tingkat kecamatan dan nagari	Tersedianya pelayanan aktifitas olah raga dan sosial masyarakat.
19	Terpenuhinya kebutuhan prasarana energi, telekomunikasi, air bersih dan sanitasi lingkungan permukiman sesuai dengan standar pelayanan minimal							
	48. Meningkatkan akses pelayanan listrik di seluruh kabupaten dengan alternatif peluang memanfaatkan energi baru dan terbarukan (seperti mikrohidro dan tenaga surya).	Akses pelayanan listrik	Rasio elektrifikasi 89,89%	Peningkatan	Meningkat lebih 90%	Meningkat mencapai 95%	Meningkat (100%)	Rasio elektrifikasi 100%
	49. Meningkatkan akses terhadap sumber air minum di perkotaan dan perdesaan minimal mencapai standar MDGs.	Pelayanan air minum dan Akses sumber air minum layak.	Proporsi pelayanan air minum perpipaan baru 0,67%. Akses sumber air minum layak: perkotaan 49,18%; perdesaan 55,75%	Meningkat	Meningkat mencapai diatas 1%	Meningkat mencapai 5%	Meningkat mencapai rata-rata Sumbar	Mencapai rata-rata Sumatera Barat 2011 yaitu 15,95%. Mencapai standar MDGs akses air minum layak perkotaan 75,29% dan perdesaan 65,81%.
	50. Terlayannya air bersih perpipaan terutama pada kawasan cepat tumbuh (Pulau Punjung – Sitiung –	Daerah terlayani	Masih sedikit terlayani	Pelayanan kawasan pusat	Meningkatnya pelayanan	Meningkatnya pelayanan kawasan	Meningkatnya pelayanan	Terlayannya air bersih perpipaan terutama pada

No	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja Pembangunan (Tahun 2011)	Target				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				Tahap I (2005-2010)	Tahap II (2010-2015)	Tahap III (2015-2020)	Tahap IV (2020-2025)	
	Kotobaru dan Sungai Rumbai).			kegiatan pemerintahan	kawasan pusat pemerintahan	cepat tumbuh	kawasan cepat tumbuh	kawasan cepat tumbuh (Pulau Punjung – Sitiung – Kotobaru dan Sungai Rumbai)
51. Menuju Kabupaten Dharmasraya sehat lingkungan dengan meningkatkan pelayanan sanitasi dan penyehatan lingkungan permukiman.	Jumlah RT dengan sanitasi layak.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketersediaan SPAL tinja tertinggi kedua di kabupaten Sumatera Barat (57,42%) tetapi dengan proporsi pembuangan lubang tanah tertinggi di Sumatera Barat (20%). ▪ Sanitasi layak perkotaan 21,76%, perdesaan 57,31% 	Meningkatkan pelayanan SPAL tinja	Meningkatnya pelayanan sanitasi perkotaan mencapai lebih 30%	Meningkatnyapelayanan sanitasi perkotaan mencapai lebih 45%	Meningkatnyapelayanan sanitasi perkotaan mencapai standar MDGs	Mencapai standar MDGs akses sanitasi perkotaan minimal 76,82% dan perdesaan 55,55%.	
	Kelengkapan prasarana sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum tersedia IPLT dan IPAL 	Perencanaan	Perencanaan dan pembangunan	Pembangunan dan operasionalisasi sarana sanitasi	Pembangunan dan operasionalisasi sarana sanitasi	Tersedianya sarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).	
	Kasus penyakit akibat sanitasi buruk	Penderita diare tercatat 5.021 tahun 2010.	Menurun	Menurunnya kasus penderita	Menurunnya kasus penderita	Jarangnya kasus penderita	Sedikitnya kasus penyakit akibat sanitasi buruk	
	Daerah Pelayanan persampahan	Pelayanan terbatas pada beberapa	Meningkatnya pelayanan pada kawasan ibukota	Meningkatnya pelayanan pada kawasan pusat	Meningkatnya pelayanan pada kawasan pusat	Terlayannya persampahan pusat	Terlayannya persampahan kawasan komersial dan pelayanan	

No	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja Pembangunan (Tahun 2011)	Target				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				Tahap I (2005-2010)	Tahap II (2010-2015)	Tahap III (2015-2020)	Tahap IV (2020-2025)	
			kawasan.	kabupaten	pertumbuhan	pertumbuhan selatan	pertumbuhan kabupaten	umum di wilayah bagian utara dan selatan kabupaten.
	52. Mengurangi keberadaan lingkungan permukiman dan perumahan kumuh dan tidak layak huni.	Luas kawasan permukiman kumuh dan perumahan tidak layak huni	Masih banyaknya kawasan permukiman kumuh dan perumahan tidak layak huni	Berkurang	Berkurang	Berkurang	Berkurang	Berkurangnya kawasan permukiman kumuh dan perumahan tidak layak huni
20	Tersedianya dukungan prasarana sumber daya air pendukung kegiatan produktif							
	53. Membangun Prasarana Pengairan <ul style="list-style-type: none"> – pengembangan jaringan irigasi dalam D.I. Batanghari dan D.I. Kabupaten. – Mengembangkan manajemen air irigasi yang handal. 	Luas pelayanan irigasi	Luas sawah beririgasi teknis 5.155 Ha (55,56%); setengah teknis 1.421 Ha (15,32%); irigasi lainnya 2.702 Ha (29,13%)	Meningkatnya luas sawah	Meningkatnya luas sawah untuk mencapai target 1.715 Ha.	Meningkatnya luas sawah untuk mencapai target 1.715 Ha dan target jangka panjang.	Meningkatnya luas sawah untuk mencapai target 5.000 Ha	Pengembangan sawah irigasi dalam D.I. Batanghari telah direncanakan dalam jangka menengah seluas 1.715 Ha dan dalam jangka panjang 5.000 Ha.
21	Tingginya tingkat keterjangkauan (aksesibilitas) antar kawasan di daerah							
	54. Membangun jaringan transportasi antar kawasan. <ul style="list-style-type: none"> – Mengembangkan akses menuju pusat-pusat kegiatan pelayanan dan kawasan pertanian. – Membangun prasarana terminal 	Terbentuknya struktur jaringan transportasi	Masih perlu dibentuknya struktur jaringan transportasi sesuai dengan rencana tata	Konsolidasi struktur jaringan jalan kabupaten	Meningkatnya pembangunan jaringan transportasi penghubung antar	Meningkatnya pembangunan jaringan transportasi penghubung antar	Meningkatnya pembangunan jaringan transportasi penghubung antar	Terbangunnya: <ul style="list-style-type: none"> – akses jalan lingkaran utara dan selatan Kabupaten Dharmasraya serta ruas jalan lingkaran Sungai

No	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja Pembangunan (Tahun 2011)	Target				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				Tahap I (2005-2010)	Tahap II (2010-2015)	Tahap III (2015-2020)	Tahap IV (2020-2025)	
	<p>pada pusat perdagangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan moda transportasi sungai Batanghari sebagai bagian atraksi wisata alam dan budaya. - mengkaji lebih lanjut peluang alternatif moda transportasi udara dan sungai. 		ruang		kawasan	kawasan	kawasan	<p>Batanghari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akses menuju pusat-pusat kegiatan pelayanan. - Akses dari dan menuju kawasan pertanian. - Prasarana terminal pada pusat perdagangan. - Moda transportasi sungai Batanghari sebagai bagian atraksi wisata alam dan budaya. <p>Mengkaji lebih lanjut peluang alternatif moda transportasi udara dan sungai.</p>
22	Terjalannya konektivitas wilayah Kabupaten Dharmasraya dengan kabupaten sekitarnya dan dengan pusat kegiatan ekonomi koridor Pulau Sumatera							

No	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja Pembangunan (Tahun 2011)	Target				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				Tahap I (2005-2010)	Tahap II (2010-2015)	Tahap III (2015-2020)	Tahap IV (2020-2025)	
	55. Membangun jaringan transportasi antar wilayah untuk akses ekonomi menuju koridor timur Pulau Sumatera dan kabupaten berbatasan.	Keterkaitan akses	Belum terbentuknya struktur jaringan jalan menghubungkan kabupaten berbatasan dan kawasan ekonomi koridor timur Pulau Sumatera.	Perintisan pembangunan jaringan jalan	Pembangunan jaringan jalan lingkar dan akses menuju kabupaten berbatasan	Pembangunan jaringan jalan lingkar dan akses menuju kabupaten berbatasan	Pembangunan jaringan jalan lingkar dan akses menuju kabupaten berbatasan	<ul style="list-style-type: none"> - Akses menghubungkan kabupaten Dharmasraya dengan kawasan pengembangan ekonomi koridor timur Pulau Sumatera sebagai sentra pengembangan perkebunan dan lumbung energi (batu bara). - Mengembangkan akses jalan lingkar utara dan selatan Kabupaten Dharmasraya menghubungkan pusat-pusat kegiatan wilayah dan mengurangi beban jalan Lintas Sumatera. - Mengembangkan akses menuju wilayah Kabupaten yang berbatasan (Kabupaten Solok Selatan; Kabupaten Sijunjung; Kabupaten Tebo; Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Bungo)

No	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja Pembangunan (Tahun 2011)	Target				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				Tahap I (2005-2010)	Tahap II (2010-2015)	Tahap III (2015-2020)	Tahap IV (2020-2025)	
23	Tetap berperannya adat dan tradisi serta lestarnya identitas daerah							
	56. Memperkuat peran adat dalam pengelolaan tanah ulayat dan peri kehidupan masyarakat.	Kasus sengketa tanah ulayat Berfungsinya rumah gadang sebagai pusat organisasi sosial	Kecenderungan bergesernya pengelolaan tanah ulayat dan potensi konfliknya dimasa depan dan berkurangnya peran fungsional rumah gadang dan ninik mamak.	Penguatan kelembagaan dan regulasi	Penguatan kelembagaan dan regulasi	Berkurangnya kasus sengketa tanah ulayat dan berfungsinya rumah gadang sebagai pusat organisasi sosial	Berkurangnya kasus sengketa tanah ulayat dan berfungsinya rumah gadang sebagai pusat organisasi sosial	Berperannya norma dan kelembagaan adat dalam pengelolaan tanah ulayat dan adat Berfungsinya rumah gadang sebagai pusat organisasi sosial
	57. Melestarikan situs budaya dan pemanfaatannya sebagai objek wisata.	Pelestarian kawasan dan situs cagar budaya		Perintisan	Penetapan dan studi kawasan dan situs	Pemeliharaan dan Pengembangan kawasan dan situs	Pemeliharaan dan Pengembangan kawasan dan situs	Terwujudnya kawasan cagar budaya dan pelestarian situs budaya.
24	Mewujudkan kehidupan yang religius							
	58. Mengembangkan kegiatan keagamaan di sekolah dan nagari.	Pengembangan kegiatan keagamaan	Program kegiatan masih terbatas	Peningkatan kegiatan dengan target sekolah dan nagari	Peningkatan kegiatan dengan target sekolah dan nagari	Peningkatan kegiatan dengan target sekolah dan nagari	Peningkatan kegiatan dengan target sekolah dan nagari	Berkembangnya kegiatan keagamaan di sekolah dan nagari
25	Terbangunnya sistem perencanaan prioritas pembangunan daerah yang baku dan konsisten							

No	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja Pembangunan (Tahun 2011)	Target				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				Tahap I (2005-2010)	Tahap II (2010-2015)	Tahap III (2015-2020)	Tahap IV (2020-2025)	
	59. Menyusun dan menyelenggarakan standar prosedur dan metoda baku sebagai pedoman penentuan prioritas pembangunan	Perbandingan antara program prioritas diusulkan nagari dan penganggaran	Usulan program prioritas nagari belum baku disaring dalam prosedur penganggaran	Kajian awal	Tersusunnya prosedur dan metoda perencanaan pembangunan	Pelaksanaan secara konsisten	Pelaksanaan secara konsisten	Terpadunya perencanaan pembangunan dan penganggaran pembangunan
26	Tersedianya sistem informasi pengelolaan pembangunan daerahdaerah yang akurat untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan							
	60. Membangun basis data dan informasi pembangunan nagari.	Data dan informasi nagari yang akurat dan relevan untuk perencanaan	Basis data dan informasi dinagari masih sangat kurang	Kajian awal	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya format data dan informasi di nagari - Tersusunnya kelembagaan sistem informasi 	Peningkatan kelengkapan data dan informasi	Peningkatan kelengkapan data dan informasi	Tersedianya informasi pembangunan daerah berbasis nagari yang akurat dan relevan untuk dasar penyelenggaraan pembangunan
	61. Membangun sistem informasi pembangunan kabupaten berbasis teknologi informasi.	Penyimpanan, pengolahan, dan distribusi data berbasis teknologi informasi	Data dan informasi belum terkoordinasi pada satu satuan kerja	Kajian awal	Tersedianya infrastruktur sistem informasi	Pemantapan sistem informasi	Pemantapan sistem informasi	Berjalannya sistem informasi pembangunan daerah berbasis teknologi informasi
27	Berkembangnya investasi pembangunan berbasis kemandirian daerah							
	62. Membangun pola investasi usaha yang melibatkan potensi	Pola investasi yang	Pola umum investasi	Perintisan	Kajian	Berkembangnya	Berkembangnya	Berkembangnya pola

No	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja Pembangunan (Tahun 2011)	Target				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				Tahap I (2005-2010)	Tahap II (2010-2015)	Tahap III (2015-2020)	Tahap IV (2020-2025)	
	pengelolaan dan pembiayaan yang ada di daerah	mendukung kemandirian ekonomi	skala besar hanya oleh swasta		pengembangan pola investasi	investasi dengan modal daerah/masyarakat	investasi dengan modal daerah/masyarakat	investasi yang melibatkan berbagai potensi sumber daya daerah/masyarakat.
28	Terbangunnya mekanisme pengendalian tata ruang yang efektif							
	63. Mengefektifkan aspek perijinan, pengawasan dan sanksi dalam pengendalian tata ruang terkait dengan pembangunan perumahan dan permukiman, alih fungsi lahan sawah dan kawasan hutan, serta lokasi kegiatan pertambangan.	Penyimpangan pemanfaatan ruang	Masih terdapat penyimpangan pemanfaatan ruang	Berkurangnya kasus penyimpangan	Berkurangnya kasus penyimpangan	Berkurangnya kasus penyimpangan	Berkurangnya kasus penyimpangan	Efektifnya aspek pengendalian tata ruang (perijinan, pengawasan dan sanksi).

5.3 Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan

5.3.1 Integrasi dan Sinkronisasi RPJPD Tahun 2005-2025 dengan RTRW Tahun 2011-2031

Dokumen rencana pembangunan daerah dalam jangka panjang terdiri dari RPJPD dan RTRW. Kedua dokumen tersebut perlu diintegrasikan dan disinkronisasikan.

Rumusan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 yaitu: *“Mengembangkan Kabupaten Dharmasraya Sebagai Pusat Pengembangan Wilayah Bagian Tenggara Provinsi Sumatera Barat Bertumpu Pada Potensi Sumber Daya Alam dan Budaya”*.

Integrasi RPJP Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 dilakukan untuk mewujudkan struktur ruang, pola ruang dan rencana pengembangan kawasan strategis dalam arah kebijakan pembangunan.

a. Perwujudan Struktur Ruang

Perwujudan struktur ruang adalah upaya pengembangan pusat kegiatan perkotaan dan jaringan prasarana wilayah.

Rencana Pengembangan Pusat Kegiatan Perkotaan

Rencana pengembangan pusat kegiatan perkotaan di Kabupaten Dharmasraya dilakukan sesuai dengan fungsi kawasan perkotaan. Integrasi dan sinkronisasi perwujudan pusat kegiatan perkotaan dalam RTRW Kabupaten dengan RPJP Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.3: Arah Kebijakan Pembangunan dalam RPJP Untuk Mewujudkan Rencana Pusat Kegiatan Perkotaan dalam RTRW

Arah kebijakan pembangunan yang terkait Dalam RPJP	Rencana RTRW	
	Rencana Pusat Kegiatan	Fungsi
(9) Mengembangkan pelayanan kesehatan dan pendidikan skala regional dengan: <ul style="list-style-type: none">– Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas dan rumah sakit untuk pelayanan wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat dan sekitarnya– Mengembangkan lembaga pendidikan tinggi dan kejuruan khususnya bidang pertanian dan	Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) <ul style="list-style-type: none">• Pulau Punjung	<ul style="list-style-type: none">▪ Pusat pertumbuhan wilayah selatan provinsi Sumatera Barat▪ Pusat kegiatan perdagangan kabupaten dan wilayah perbatasan kabupaten.▪ Pusat kegiatan pemerintahan kabupaten▪ Pusat kegiatan sosial (pendidikan dan

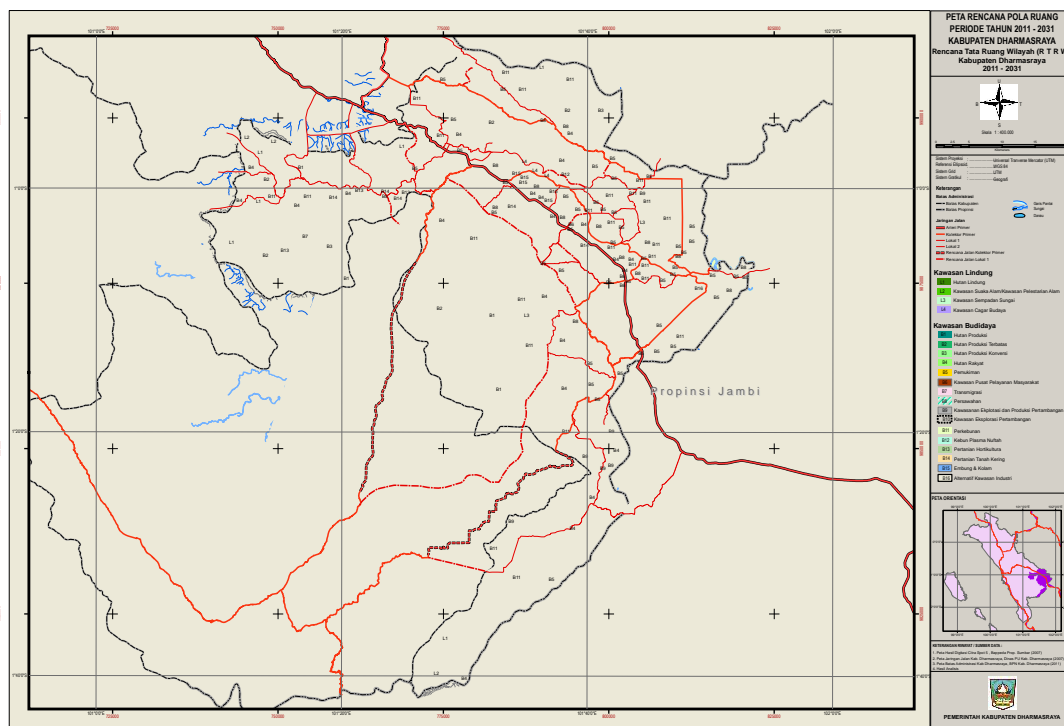
Arah kebijakan pembangunan yang terkait Dalam RPJP	Rencana RTRW	
	Rencana Pusat Kegiatan	Fungsi
<p>kesehatan.</p> <p>(23) Mengembangkan pasar lelang agro hasil perkebunan.</p> <p>(41) Revitalisasi pasar-pasar nagari.</p> <p>(42) Pengembangan pasar tematik (berupa pasar lelang agro hasil perkebunan, pasar agropolitan ternak, dan pasar minapolitan)</p> <p>(43) Mengembangkan pusat perdagangan dan jasa di kawasan Sungai Rumbai, Koto Baru, Pulau Punjung, kawasan perkotaan yang berprospek berkembang dimasa depan seperti Padang Laweh serta rest area pada koridor Jalan Lintas Sumatera.</p> <p>(47) Membangun RTH serbaguna pada tingkatan kabupaten, kecamatan dan nagari (untuk kegiatan olahraga dan kegiatan sosial).</p> <p>(49) Meningkatkan akses terhadap sumber air minum di perkotaan dan perdesaan minimal mencapai standar MDGs.</p> <p>(50) Terlayannya air bersih perpipaan pada kawasan cepat tumbuh (Pulau Punjung – Sitiung – Kotobaru dan Sungai Rumbai).</p> <p>(51) Menuju Kabupaten Dharmasraya sehat lingkungan dengan meningkatkan pelayanan sanitasi dan penyehatan lingkungan permukiman.</p> <p>(52) Mengurangi keberadaan lingkungan permukiman dan perumahan kumuh dan tidak layak huni.</p> <p>(54) Membangun jaringan transportasi antar kawasan.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Mengembangkan akses menuju pusat-pusat kegiatan pelayanan dan kawasan pertanian. – Membangun prasarana terminal pada pusat perdagangan. 	<p>Pusat Kegiatan Lokal (PKL)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sungai Rumbai <p>Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Koto Baru ▪ Sitiung <p>Pusat Pelayanan Kawasan Promosi (PPKp)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Padang Laweh <p>Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sungai Limau ▪ Silago ▪ Pinang Makmur ▪ Koto Salak ▪ Tiumang 	<p>kesehatan) kabupaten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gerbang tenggara Provinsi Sumatera Barat. ▪ Pusat kegiatan perdagangan wilayah perbatasan. ▪ Pusat kegiatan sosial kawasan selatan kabupaten. ▪ Pusat kegiatan perdagangan dan jasa bagian wilayah kabupaten. ▪ Pusat kegiatan sosial bagian wilayah Kabupaten dan perbatasan ▪ Pusat kegiatan perdagangan dan jasa promosi bagian wilayah perbatasan kabupaten. ▪ Pusat kegiatan sosial promosi bagian wilayah perbatasan kabupaten. ▪ Pusat kegiatan sosial kecamatan. ▪ Pusat kegiatan administrasi kecamatan. ▪ Pusat kegiatan perdagangan kebutuhan harian.

Arah kebijakan pembangunan yang terkait Dalam RPJPD	Rencana Peruntukan Ruang Dalam RTRW	Luas (Ha)
(36) sungaiBatanghari Minimalnya kerawanan bencana longsor dan erosi lahan.	- Kawasan Sempadan Sungai	4.709
(37) Mengefektifkan aspek perijinan, pengawasan dan sanksi dalam pengendalian tata ruang terkait dengan pembangunan perumahan dan permukiman, alih fungsi lahan sawah dan kawasan hutan, serta lokasi kegiatan pertambangan.	- Kawasan Cagar Budaya	918
		279.604
	Kawasan Hutan Berfungsi Budidaya	
	- Kawasan Hutan Produksi	26.161
	- Kawasan Hutan Produksi Konversi	15.568
	- Kawasan Hutan Produksi Terbatas	31.845
	- Kawasan Hutan Rakyat	25.239
	Kawasan Budidaya	
(10) Mengendalikan alih fungsi lahan sawah yang ada dengan regulasi dan memberikan insentif produksi bagi petani. Kebijakan didukung dengan penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada area beririgasi teknis.	Kawasan Pertanian Lahan Basah	14.643
(11) Menambah luas lahan sawah D.I. Batanghari seluas 1.715 Ha dalam jangka menengah dan mencapai 5.000 Ha dalam jangka panjang.	Kawasan Pertanian Lahan Kering	5.285
(12) Meningkatkan pengairan D.I. kabupaten yang tersebar pada kecamatan di Kabupaten Dharmasraya dan revitalisasi sawah pada lahan lebih kurang 3.500 Ha.		
(16) Meningkatkan produksi dan produktifitas produk unggulan karet, kelapa sawit dan komoditi lainnya seperti kopi dan kakao.	Kawasan Perkebunan	138.032
(17) Peremajaan tanaman perkebunan sawit dan karet.		
(20) Mengembangkan pengolahan karet dalam bentuk slab dan sheet ditingkat petani dan pengolahan lebih lanjut produk karet.		
(21) Mengembangkan komoditi potensial perkebunan lainnya seperti kakao dan kopi untuk mendukung ketahanan ekonomi wilayah.		
(22) Mengembangkan industri rakyat skala mikro dan kecil berbasis pengolahan sumber daya pertanian (sawit, karet, kopi dan kakao).		
(24) Membangun pola investasi usaha budidaya perkebunan dan industri		
(25) Meningkatkan akses menghubungkan kawasan budidaya perkebunan dengan jalur transportasi regional.		
(26) Memberdayakan petani peternak dalam		

Arah kebijakan pembangunan yang terkait Dalam RPJPD	Rencana Peruntukan Ruang Dalam RTRW	Luas (Ha)
<p>budidaya sapi potong mencapai minimal 2 kali lipat dari jumlah sapi sekarang (mencapai minimal 50.000 ekor).</p> <p>(27) Mengembangkan dan melengkapi sarana pendukung sentra peternakan (pasar ternak, rumah potong hewan, puskesmas dan sarana lainnya).</p> <p>(62) Membangun pola investasi</p>		
<p>(13) Mengembangkan agribisnis hortikultura buah-buahan khas daerah seperti: manggis, duku, durian dan salak dengan pola klaster.</p>	Kawasan Pertanian Hortikultura, Tanaman Kehutanan, dan Perkebunan	6.685
<p>(28) Mengorientasikan kegiatan pertambangan yang memberi dampak besar kepada kesejahteraan masyarakat</p>	Kawasan Pertambangan *)	
<p>(29) Mengembangkan eksploitasi pertambangan yang ramah lingkungan.</p>	- Kawasan Operasi Produksi	2.388
<p>(31) Melakukan reklamasi lahan yang bermanfaat bagi masyarakat.</p>	- Alokasi kawasan potensial pengembangan pertambangan	20.917
<p>(62) Membangun pola investasi</p>		
<p>(18) Membangun pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dengan kapasitas PKS 150 ton/jam.</p>	Kawasan Industri	500
<p>(19) Membangun pabrik pengolahan industri hilir makanan (minyak goreng) untuk pasar Sumatera Barat dan wilayah sekitar.</p>		
<p>(30) Mengembangkan industri pengolahan hasil tambang</p>		
<p>(62) Membangun pola investasi.</p>		
<p>(14) Meningkatkan produksi perikanan sehingga memiliki kontribusi besar pada produksi wilayah Sumatera Barat bagian tenggara (yang meliputi Kabupaten Solok, Solok Selatan, Sijunjung dan Dharmasraya) mencapai lebih 300%.</p>	Kawasan Peruntukan Perikanan (embung dan kolam)	134
<p>(15) Mengembangkan dan membangun prasarana sarana pendukung kawasan minapolitan (balai benih, balai penelitian, pasar minapolitan).</p>		
<p>(62) Membangun pola investasi</p>		
<p>(9) Mengembangkan pelayanan kesehatan dan pendidikan skala regional</p>	Kawasan Koridor Pusat Kegiatan Masyarakat	526
<p>(43) Mengembangkan pusat perdagangan dan jasa di kawasan Sungai Rumbai, Koto Baru, Pulau Punjung, kawasan perkotaan yang berprospek berkembang dimasa depan seperti Padang Laweh serta rest area pada koridor Jalan Lintas Sumatera.</p>		
<p>(46) Mengembangkan objek wisata dan rekreasi prioritas kawasan.</p>		
<p>(47) Membangun RTH serbaguna pada tingkatan kabupaten, kecamatan dan nagari (untuk</p>		

Arah kebijakan pembangunan yang terkait Dalam RPJPD	Rencana Peruntukan Ruang Dalam RTRW	Luas (Ha)
kegiatan olahraga dan kegiatan sosial). (50) Terlayaninya air bersih perpipaan pada kawasan cepat tumbuh (Pulau Punjung – Sitiung – Kotobaru dan Sungai Rumbai). (51) Menuju Kabupaten Dharmasraya sehat lingkungan dengan meningkatkan pelayanan sanitasi dan penyehatan lingkungan permukiman.		
(45) Membangun: – kawasan terpadu wisata alam-budaya serta – taman rekreasi bertema (theme park). (16) Meningkatkan produksi dan produktifitas produk unggulan karet, kelapa sawit dan komoditi lainnya seperti kopi dan kakao. (62) Membangun pola investasi	Kawasan Kebun Keragaman Hayati	771
(48) Meningkatkan akses pelayanan listrik di seluruh kabupaten dengan alternatif peluang memanfaatkan energi baru dan terbarukan (seperti mikrohidro dan tenaga surya). (49) Meningkatkan akses terhadap sumber air minum di perkotaan dan perdesaan minimal mencapai standar MDGs. (50) Terlayaninya air bersih perpipaan pada kawasan cepat tumbuh (Pulau Punjung – Sitiung – Kotobaru dan Sungai Rumbai). (51) Menuju Kabupaten Dharmasraya sehat lingkungan dengan meningkatkan pelayanan sanitasi dan penyehatan lingkungan permukiman. – Meningkatkan jumlah rumah tangga perkotaan dan perdesaan dengan akses sanitasi layak minimal mencapai standar MDGs. – Melengkapi kebutuhan prasarana sanitasi dengan membangun sarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). – Meningkatkan pelayanan persampahan pada pusat-pusat kegiatan perdagangan dan pemerintahan dengan dukungan sarana pelayanan persampahan yang memadai yang mampu melayani wilayah bagian utara dan selatan kabupaten. (52) Mengurangi keberadaan lingkungan permukiman dan perumahan kumuh dan tidak layak huni.	Rencana Kawasan Transmigrasi Kawasan Pemukiman	1.312 10.515
Luas Kabupaten		302.599

Gambar 5.3: Rencana Pola Ruang Kabupaten Dharmasraya



c. Perwujudan Kawasan Strategis

Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan. Arah kebijakan pembangunan dalam RPJP yang perlu disinkronkan dengan rencana RTRW untuk mewujudkan kawasan strategis dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

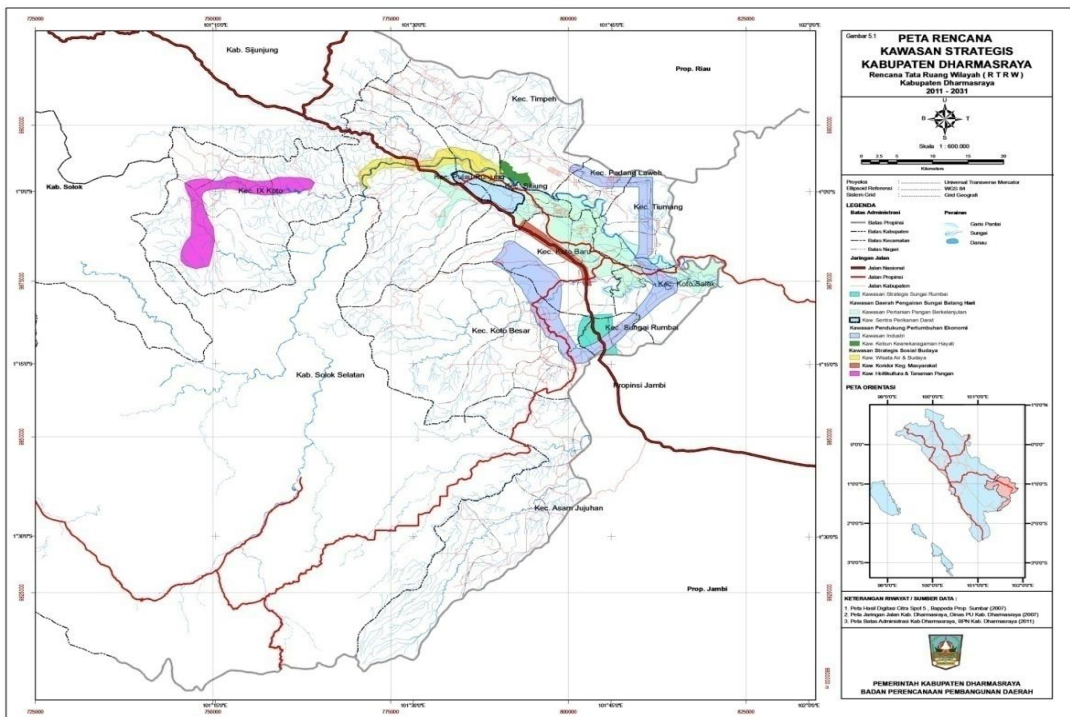
Tabel 5.5: Arah Kebijakan Pembangunan Dalam RPJPD untuk Mewujudkan Rencana Kawasan Strategis Dalam RTRW

Arah kebijakan pembangunan yang terkait Dalam RPJP	Rencana Kawasan Prioritas
A. Kawasan Strategis Nasional di Kabupaten Dharmasraya	
Terkait dengan arah kebijakan pelestarian kawasan hutan (No: 33 - 36) pengendalian tata ruang yang efektif (No: 63)	Kawasan TNKS yang termasuk kedalam wilayah Kabupaten Dharmasraya di Kec. Asam Jujuhan seluas 3.546 Ha
B. Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Dharmasraya	
Terkait dengan arah kebijakan menjadikan Kabupaten Dharmasraya sebagai orientasi perdagangan dan jasa di wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat dan sekitarnya (No:41 - 43)	Kawasan Strategis Sungai Rumbai <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gerbang tenggara Provinsi Sumatera Barat dengan penyediaan fasilitas rest area dilengkapi dengan fasilitas informasi tentang Sumatera Barat seperti taman

Arah kebijakan pembangunan yang terkait Dalam RPJP	Rencana Kawasan Prioritas
	miniatur Sumatera Barat. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasar komoditi hasil pertanian dari kecamatan sekitar, Kabupaten Kerinci, dan kawasan perbatasan Kabupaten Solok Selatan. ▪ Pasar kebutuhan penduduk dan pelayanan jasa Kabupaten Dharmasraya bagian selatan, kawasan perbatasan Kabupaten Solok Selatan, Kecamatan Jujuhan dan Kabupaten Tebo.
C. Kawasan Strategis Kabupaten di Kabupaten Dharmasraya	
1. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi	
Terkait dengan kebijakan bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura pengembangan klaster agribisnis dan bidang perikanan (No: 10 -15). pengendalian tata ruang yang efektif (No: 63).	a. Kawasan Daerah Pengairan Sungai Batanghari <ul style="list-style-type: none"> – Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah – Pengembangan Kawasan Sentra Perikanan Darat
Pengembangan kawasan industri terkait dengan kebijakan pengembangan industri (No: 18,19,30). Pengembangan kawasan kebun keragaman hayati terkait dengan kebijakan pengembangan kawasan terpadu wisata alam dan budaya serta taman rekreasi bertema (No: 45) serta pendukung bagi peningkatan produk unggulan perkebunan (pengembangan bibit unggul) (No:16). Membangun pola investasi (No:62)	b. Kawasan Pendukung Pertumbuhan Ekonomi <ul style="list-style-type: none"> – Kawasan Industri – Kawasan Kebun Keragaman Hayati
Terkait dengan pengembangan klaster agribisnis hortikultura berdaya saing tinggi (No: 13) Terkait dengan kelestarian kawasan hutan (No: 33-36)	c. Kawasan Hortikultura dan Tanaman Kehutanan
2. Kawasan Strategis Kabupaten Dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya	
Terkait dengan kebijakan pengembangan kawasan terpadu wisata alam dan budaya serta taman rekreasi bertema, objek wisata dan rekreasi prioritas kawasan (No: 45,46) Melestarikan situs budaya dan pemanfaatannya sebagai objek wisata (No:57) Pengembangan transportasi (No:55) Membangun pola investasi (No:62)	a. Kawasan wisata air dan budaya Kawasan wisata air Sungai Batanghari dan kawasan budaya yang terdapat di Siguntur, Padang Laweh dan Koto Besar dikembangkan sebagai produk wisata Kabupaten Dharmasraya yang memadukan wisata alam dengan wisata budaya sebagai magnet wisata sejarah dan budaya dibagian tengah Pulau Sumatera. Program utama: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan dermaga wisata di Bendungan Batu Bakawik, Sungai Dareh, dan Siguntur. ▪ Pengadaan transportasi wisata sungai. ▪ Pembangunan plaza sisi sungai di Sungai Dareh

Arah kebijakan pembangunan yang terkait Dalam RPJP	Rencana Kawasan Prioritas
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan jembatan (gantung) melintas Sungai Batanghari dari Siguntur ke kawasan cagar budaya. ▪ Pembangunan jalan Siguntur – Candi – Sungai Langek – Pisang Barabuih (menyeberang melalui ponton sebagai jalur wisata). ▪ Pengembangan kawasan wisata budaya bekas Kerajaan Dharmasraya di Siguntur, Padang Laweh dan Koto Besar.
<p>Terkait dengan mengembangkan pelayanan kesehatan dan pendidikan skala regional (No:9) Membangun RTH serbaguna pada tingkatan kabupaten, kecamatan dan nagari (untuk kegiatan olahraga dan kegiatan sosial) (No: 47) Membangun pola investasi (No:62)</p>	<p>b. Kawasan Koridor Kegiatan Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan kawasan kegiatan pendidikan tinggi bidang pertanian dan pendidikan kejuruan. ▪ Pengembangan pusat kegiatan olahraga terpadu di Kec. Koto Baru. ▪ Pengembangan sarana kesehatan dengan prakarsa swasta masyarakat terutama untuk pelayanan wilayah selatan Kabupaten Dharmasraya.

Gambar 5.4: Rencana Kawasan strategis Kabupaten Dharmasraya



5.3.2 Arah Kebijakan Dalam RPJP Yang Terkait Dengan Pemerataan Pembangunan

Pemerataan pembangunan merupakan salah satu nilai yang harus diwujudkan dalam pembangunan. Arah kebijakan yang terkait dengan pemerataan pembangunan di seluruh Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel berikut.

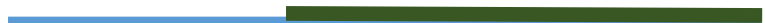
Tabel 5.6: Arah Kebijakan Pembangunan Dalam RPJP untuk Mewujudkan Pemerataan Pembangunan

Arah kebijakan	Wilayah administrasi
(1) Menggalakkan program Keluarga Berencana.	Setiap Jorong
(2) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara promotif dan preventif.	Setiap Jorong
(3) Meningkatkan partisipasi pendidikan pada tingkat SD, SMP, dan SMA.	
(4) Memeratakan akses sarana sekolah pada setiap kecamatan.	(setiap jorong untuk SD, Setiap Nagari untuk SMP, setiap Kecamatan untuk SMA)
(5) Meningkatkan kualitas sekolah (dengan mengembangkan berbagai bentuk program seperti mengadakan sekolah berstandar nasional pada jenjang SD, SMP dan SMA atau program "full day school")	Sekurang-kurangnya terdapat setiap kecamatan 1 sd, 1SMP dan 1SMA berstandar nasional dan full day
(6) Membebaskan kabupaten dari buta huruf.	Setiap jorong
(7) Peningkatan kualitas keluarga	Setiap jorong
(8) Menyediakan pelayanan pendidikan dan kesehatan di nagari tertinggal	Nagari tertinggal dan terpencil
(44) Menyediakan sarana prasarana nagari tertinggal	
(32) Percepatan peningkatan produksi dan pasar industri dan usaha skala mikro, kecil dan menengah prospektif.	Setiap Nagari
(37) Mengarahkan kegiatan budidaya pertanian dan eksploitasi pertambangan sesuai dengan rencana zonasi/tata ruang.	Setiap Nagari
(39) Memperkuat fungsi nagari sebagai pelaku kegiatan sosial-budaya	Setiap Nagari
(40) Memberdayakan berbagai lembaga pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat.	
(48) Meningkatkan akses pelayanan listrik di seluruh kabupaten dengan alternatif peluang memanfaatkan energi baru dan terbarukan (seperti mikrohidro dan tenaga surya).	Setiap Nagari
(49) Meningkatkan akses terhadap sumber air minum di perkotaan dan perdesaan minimal mencapai standar MDGs	
(56) Memperkuat peran adat dalam pengelolaan tanah ulayat dan peri kehidupan masyarakat.	Setiap Nagari

Arah kebijakan	Wilayah administrasi
(60) Membangun basis data dan informasi pembangunan nagari. (61) Membangun sistem informasi pembangunan kabupaten berbasis teknologi informasi.	Setiap Nagari
(62) Membangun pola investasi usaha yang melibatkan potensi pengelolaan dan pembiayaan yang ada di daerah (seperti lembaga perbankan, kelompok tani, koperasi, badan usaha pemerintah, nagari, dan CSR).	Setiap Nagari

RPJPD KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2005-2025

BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN



BAB VI

KAJIDAH PELAKSANAAN

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan arah kebijakan daerah jangka panjang. Pada bagian ini diuraikan langkah-langkah pelaksanaan dari visi misi dan arah kebijakan yang telah disusun dalam dokumen RPJPD



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025 berisi visi, misi, sasaran pokok, dan arah kebijakan merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan.

RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025 memberi pedoman dalam memelihara, memupuk, dan pengembangan berbagai modal pembangunan daerah dalam jangka panjang sesuai dengan aspirasi dan visi pembangunan daerah.

RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025 dibagi menjadi 4 tahapan yaitu: Tahap I (Tahun 2005-2010), Tahap II (Tahun 2010-2015), Tahap III (Tahun 2015-2020) dan Tahap IV (Tahun 2020-2025). Tahapan-tahapan tersebut selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan setiap periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut ::

1. Pedoman dalam penyusunan Visi, Misi dan program calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah;
2. RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan sebagai pedoman bagi seluruh pelaku

- pembangunan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Dharmasraya;
3. RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025 merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
 4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
 5. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
 6. RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025 bersandingan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan dalam jangka panjang.

Sebagai dokumen pembangunan jangka panjang, RPJPD berfungsi sebagai pedoman pengambilan kebijakan publik bagi para pengambil keputusan di daerah dan untuk membangun komitmen bagi seluruh pelaku pembangunan. Kabupaten Dharmasraya maju dan berbudaya dapat terwujud kalau nilai-nilai pembangunan yang menjadi aspirasi bersama yaitu mewujudkan masyarakat yang cerdas, sejahtera, mandiri, adil dan berbudaya berlandaskan iman dan taqwa dapat ditegakkan.

Pj. BUPATI DHARMASRAYA,

ttd

SYAFRIZAL